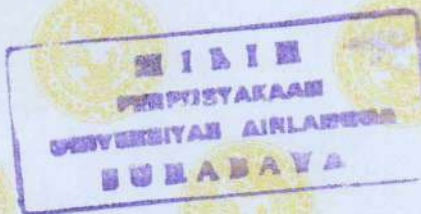


IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
**PROFIL DAN DETERMINAN KERENTANAN KEMISKINAN
RUMAH TANGGA DI INDONESIA**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**



KEB
KE
C-154/16
ADN
P



**DIAJUKAN OLEH
ACHINTYA WIDHI ADNYANI**

NIM: 041211133062

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

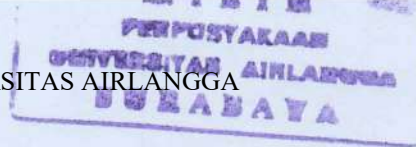
Surabaya, 1 Agustus 2016

Skripsi telah selesai dan siap untuk di uji

Dosen Pembimbing



Dr. Lilik Sugiharti, S.E., M.Si



SKRIPSI

**PROFIL DAN DETERMINAN KERENTANAN KEMISKINAN
RUMAH TANGGA DI INDONESIA**

DIAJUKAN OLEH:

ACHINTYA WIDHI ADNYANI

NIM: 041211133062

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lilik Sugiharti'.

Dr. Lilik Sugiharti, SE., M.Si

TANGGAL 18-08-2016

KETUA DEPARTEMEN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muryani'.

Dr. Muryani, SE., M.Si., MEMD

TANGGAL 18-08-2016

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Achintya Widhi Adnyani, 041211133062), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah hasil asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.



Surabaya, 1 Agustus 2016



Achintya Widhi

NIM. 041211133062

DECLARATION

I, (Achintya Widhi Adnyani, 041211133062), declare that :

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another a person work made under may name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic, degree in Airlangga University or in any other universities/collage.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by any one, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the references.
3. This statement is true; if on the future this statement is proven ti the fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and other sanctios in accordance with the prevailing norms and regulations in Airlangga University.

Surabaya,.....1 Agustus 2016

Declared by,



Achintya Widhi Adnyani

NIM.: 041211133062

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Berkah dan Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Profil dan Determinan Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga di Indonesia”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari program S-1, Departemen Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Kedua orang tua terkasih, papa Kukuh Ari Wuryanto dan mama Ni Putu Meirna yang selalu memberikan motivasi, arahan, teguran, dan doa yang tidak pernah putus setiap hari untuk penulis. Terimakasih karena telah mengupayakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya.
2. Prof. Dr. Hj. Dian Agustia, S.E., M.Si., AK. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
3. Dr. Lilik Sugiharti, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih karena telah berkenan meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga karena telah menjadi sumber inspirasi bagi penulis.

4. Dr. Muryani, S.E.,M.Si.,MEMD selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
5. Ni Made Sukartini, S.E., MSi., MIDEK selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
6. Rossanto Dwi Handoyo, S.E.,M.Si.,Ph.D, selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
7. Dosen penguji, Dr. Nurul Istifadah, S.E., M.Si, Dr. H. Bustani Berachim, Drs. Ec. Widya Sylviana, S.E., M.Si, dan Rumayya Batubara, S.E., M.Reg.Dev., Ph.D. Terimakasih atas apresiasi dan saran yang diberikan selama sidang skripsi berlangsung
8. Dosen wali tercinta, Dr. Nurul Istifadah, S.E., M.Si yang selalu berusaha meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengontrol progress penulis selama kuliah. Terimakasih untuk konsultasi yang diberikan kepada penulis.
9. Martha Rangi Primanthi, S.E.,MIDEK, Sochrul Rohmatul Ajjah, S.E., M.Ec, dan Gigih P., S.E., M.SE., yang telah berbaik hati meluangkan waktu untuk menjelaskan materi-materi yang belum penulis pahami selama proses penyusunan skripsi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama Dosen Departemen Ilmu Ekonomi yang sudah memberikan pengetahuan kepada penulis.
11. Staf Departemen Ilmu Ekonomi, Akademik dan Kemahasiswaan yang sudah membantu melancarkan administrasi skripsi penulis.
12. *Sweet Lullaby*. Adilah (kanjeng), Deby (debidut), Riris (yis), Fina (pina), dan Edria (boty). Terimakasih karena selalu saling memberi semangat,

mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi penghibur paling mujarab saat kebuntuan melanda, sekaligus tempat curhat dan ladang rumpik paling asik. Selamat mewujudkan impian-impian kita selanjutnya! *See you on top, guys.*

13. Teman-teman seperjuangan sekaligus mahasiswa bimbingan Ibu Lilik. Niastiti, Riris, Niastiti, Dhila, Andrias, Rudy, Esti, Seli, Mbak Poo, dan Mas Deny. Perjuangan kalian luar biasa.
14. Teman-teman KKN-BBM 51 di Kalisari, Ridho, Haye, Anisa, Fama, Irma, Daniel, Arief, Ratna, Clarina, Anggi, Lilik, dan Yusuf. Terimakasih untuk kerjasama dan semua cerita-cerita lucu dan berkesan selama KKN.
15. Sahabat-sahabat tergokil, yang selalu ada saat *ups and downs*, Resti Perslami, Sondeany, dan Elza. Terimakasih ya rek, buat semua perhatian dan semangat yang kalian berikan.
16. Seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2012 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. *You guys are unforgettable.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja. Kritik dan saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata besar harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Agustus 2016

Penulis

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
DAFTAR No. :

ABSTRAK
SKRIPSI SARJANA EKONOMI

NAMA : ACHINTYA WIDHI ADNYANI
N.I.M. : 041211133062
TAHUN PENYUSUNAN : 2016

JUDUL:

*PROFIL DAN DETERMINAN KERENTANAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA
DI INDONESIA*

ISI :

Konsep kerentanan kemiskinan muncul karena adanya guncangan sebagai suatu dimensi penting dari kemiskinan. Keberadaan guncangan menyebabkan ketidakamanan pada kesejahteraan rumah tangga. Pengukuran kerentanan kemiskinan ini mengukur besarnya probabilitas rumah tangga untuk jatuh miskin di masa mendatang. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kerentanan kemiskinan dan mengkaji determinannya berdasarkan data survei rumah tangga di Indonesia. Data sampel yang digunakan merupakan data sekunder dari IFLS 5 (*Indonesia Family Live Survery*) tahun 2014. Pengukuran kerentanan kemiskinan menggunakan *Three Stage FGLS (Feasible Generalized Least Square)*, sedangkan analisis determinannya menggunakan metode regresi logit. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat memiliki rata-rata nilai kerentanan kemiskinan tinggi. Bahkan, Lampung menjadi provinsi yang paling rentan pada tahun 2014. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa usia kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tabungan, kepemilikan tanah, dan lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga.

Kata Kunci : Kemiskinan, Kerentanan Kemiskinan, *Three Stage FGLS*, Logit, Indonesia.

STUDY PROGRAM : ECONOMIC DEVELOPMENT
LIST No. :.....

ABSTRACT
GRADUATE ECONOMICS THESIS

NAME : ACHINTYA WIDHI ADNYANI
N.I.M. : 041211133062
YEAR OF PREPARATION : 2016

THEME:

PROFILE AND DETERMINANT HOUSEHOLD VULNERABILITY TO POVERTY IN INDONESIA

CONTENT :

Concept of vulnerability to poverty appears by a presence of shocks as an important dimension of poverty. The existence of shocks lead to insecurity in household welfare. This measurement of vulnerability to poverty is trying to measure probability of households fall in to poverty in the future. This study aims to measure household vulnerability to poverty and examine its determinants on the basis of a household survey data for Indonesia. Sampel data used is secondary data from IFLS 5 (Indonesia Family Life Survey) year 2014. The measurement of vulnerability to poverty is analyzed using three stage FGLS (Feasible Generalized Least Square), while its determinant is analyzed using logit regression methods. Results of this study show that Lampung province, DKI Jakarta, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat have a high average value of vulnerability to poverty. Moreover, Lampung Province is the most vulnerable in 2014. Furthermore, this study find that age of household head, education of household head, household size, location, saving ownership, and land ownership have a significant effect on household value of vulnerability to poverty.

Keywords: *Poverty, Vulnerability to Poverty, Three Stage FGLS, Logit, Indonesia*



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	iii
Declaration.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstraksi.....	viii
Abstract.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	10
1.3.Tujuan Penelitian.....	11
1.4.Manfaat Penelitian.....	11
1.5.Sistematika Skripsi.....	11
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Landasan Teori.....	13
2.1.1. Teori Kesejahteraan.....	13
2.1.2. Teori Kemiskinan.....	15

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA	
2.1.3. Definisi Kemiskinan.....	19
2.1.4. Identifikasi Kemiskinan.....	21
2.1.4.1 Pendekatan Absolut.....	21
2.1.4.2 Pendekatan Relatif.....	23
2.1.5. Konsep Kerentanan Kemiskinan.....	24
2.1.6. Definisi Kerentanan Kemiskinan.....	27
2.1.7. Pendekatan Kerentanan Kemiskinan.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu.....	32
2.3. Hipotesis dan Model Analisis.....	37
2.3.1 Hipotesis.....	37
2.3.2 Model Analisis.....	37
2.4. Kerangka Berfikir.....	39

BAB 3 : METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian.....	42
3.2. Identifikasi Variabel.....	43
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	45
3.4. Jenis dan Sumber Data	48
3.5. Prosedur Pengumpulan Data.....	50
3.6. Teknik Analisis.....	50
3.6.1. Teknik Analisis Penghitungan Nilai Kerentanan Kemiskinan.....	50
3.6.2. Teknik Analisis Determinan Kerentanan Kemiskinan.....	55

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
4.1.1. Kondisi dan Distribusi Kemiskinan di Indonesia.....	62
4.1.2. Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin.....	64
4.1.2.1. Karakteristik Demografi.....	64
4.1.2.2. Karakteristik Ekonomi.....	68
4.1.2.3. Karakteristik Sosial.....	72
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	77
4.2.1 Hasil Penghitungan Nilai Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga.....	77
4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Logit.....	81
4.2.3 Uji Z-statistik.....	83
4.2.4 Uji <i>Likelihood ratio</i>	83
4.2.5 Uji <i>Goodness of fit</i> dan <i>Pseudo R2</i>	84
4.2.6 Pembuktian Hipotesis.....	84
4.3. Pembahasan.....	85
4.4. Kelemahan Penelitian.....	106

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	107
5.2. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jenis-Jenis Guncangan.....	26
Tabel 2.2 Perbandingan Pendekatan Kerentanan Kemiskinan.....	31
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1 Variabel Dependen dalam Model Penghitungan Nilai Kerentanan KemiskinanDeterminan Kerentanan Kemiskinan...	44
Tabel 3.2 Variabel dalam Model Determinan Kerentanan Kemiskinan...	44
Tabel 4.1 Distribusi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Kepemilikan Tabungan.....	69
Tabel 4.2 Distribusi Rumah Tangga Rentan Tinggi Berdasarkan Kepemilikan Tabungan.....	70
Tabel 4.3 Distribusi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Kepemilikan Tanah.....	71
Tabel 4.4 Distribusi Rumah Tangga Rentan Tinggi Berdasarkan Kepemilikan Tanah.....	72
Tabel 4.5 Rata-Rata Nilai Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga Berdasarkan Provinsi Tahun 2014.....	80
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Model Logit Status Kerentanan Kemiskinan	82
Tabel 4.7 Jenis-Jenis Resiko Kerentanan Kemiskinan.....	86
Tabel 4.8 Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi Tahun 2010, 2012, dan 2014.....	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
	Tahun 2002-2014..... 3
Gambar 1.2	Profil Kerentanan Kemiskinan di Indonesia..... 6
Gambar 2.1	Karakteristik Kemiskinan Rumah Tangga..... 18
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir..... 41
Gambar 3.1	Alur Pendekatan Penelitian Profil dan Determinan
	Kerentanan Kemiskinan..... 43
Gambar 3.2	Persebaran Sampel Rumah Tangga per Provinsi..... 49
Gambar 4.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
	Periode September 2010-2014..... 62
Gambar 4.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan
	Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2010-2014..... 63
Gambar 4.3	Distribusi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan
	Usia Kepala Rumah Tangga Tahun 2014..... 65
Gambar 4.4	Kondisi Usia Kepala Rumah Tangga Berstatus Rentan
	Tinggi dan Rentan Rendah..... 66
Gambar 4.5	Karakteristik Rumah Tangga Miskin Berdasarkan
	Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2014..... 67

Gambar 4.6	Karakteristik Rumah Tangga Rentan Tinggi Berdasarkan Jumlah Anggota Rumah Tangga.....	68
Gambar 4.7	Struktur Kemiskinan Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal Tahun 2014.....	73
Gambar 4.8	Persebaran Rumah Tangga Rentan Tinggi dan Rentan Rendah Berdasarkan Wilayah.....	74
Gambar 4.9	Karakteristik Kemiskinan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Tahun 2014.....	75
Gambar 4.10	Karakteristik Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga.....	76
Gambar 4.11	Kurva CDF Hasil Penghitungan Skor Z Terhadap Nilai Kerentanan Kemiskinan.....	78
Gambar 4.12	Perkembangan Inflasi Jakarta dan Nasional Tahun 2014.....	93
Gambar 4.13	Hubungan Usia Kepala Rumah Tangga Terhadap Kerentanan Kemiskinan.....	98
Gambar 4.14	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Rumah Tangga Berdasarkan Wilayah Tahun 2014.....	103
Gambar 4.15	Framework <i>Asset and Sustainable Livelihoods</i>	104

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Deskripsi variabel untuk analisis kerentanan kemiskinan
- Lampiran 2 Statistik deskriptif variabel
- Lampiran 3 Hasil estimasi metode regresi logistic
- Lampiran 4 Hasil penghitungan titik minimum usia kuadratik kepala rumah tangga terhadap kerentanan kemiskinan
- Lampiran 5 Garis Kemiskinan per Provinsi berdasarkan desa/kota tahun 2014 menurut Badan Pusat Statistik



BAB 1
PENDAHULUAN

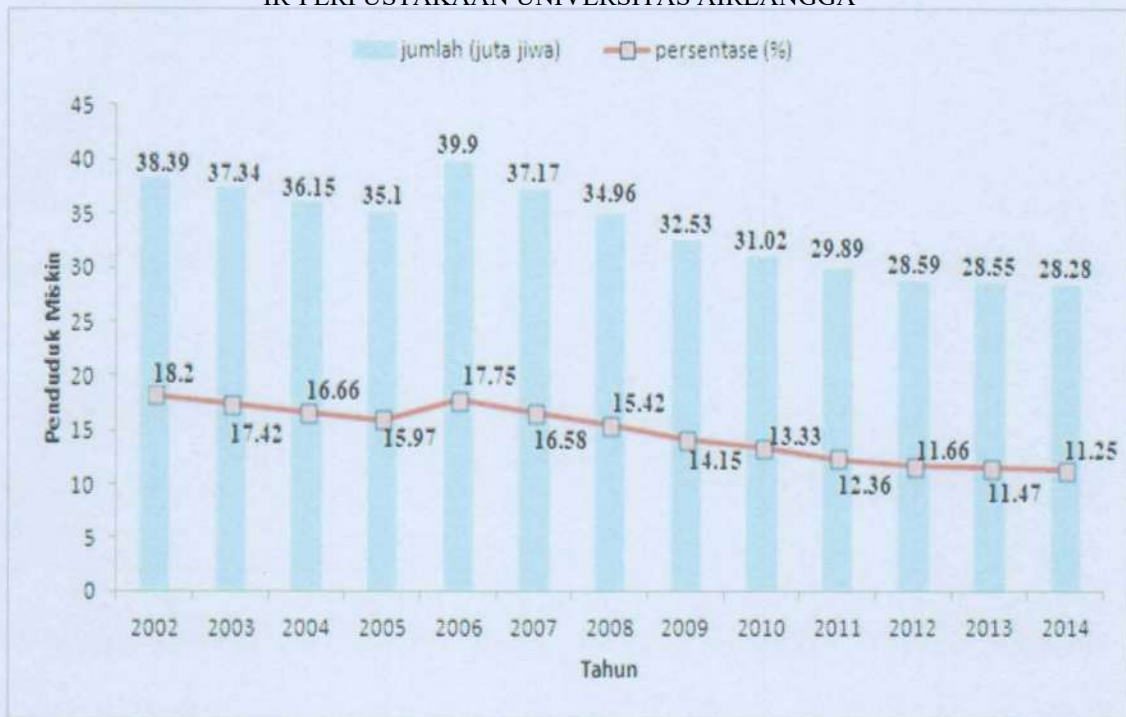
BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat global. Secara garis besar, permasalahan dalam kemiskinan berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara, baik individu maupun rumah tangga. Kesejahteraan (*well-being*) digambarkan melalui kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan akses terhadap sumber daya (Haughton dan Khadker, 2010:2). Selain itu, kesejahteraan juga dilihat dari kemampuan kunci (*key capabilities*) individu untuk dapat berfungsi dalam masyarakat. Ketiadaan kemampuan kunci tersebut menjadi salah satu penyebab individu atau rumah tangga jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

Kompleksitas permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensi tersebut membentuk komitmen pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk bekerjasama mengentaskan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) di tingkat global merujuk pada kesepakatan *Millenium Development Goals* pada tahun 2000 (PBB, 2013). Berdasarkan kesepakatan tersebut, pada tahun 2015 *World Bank* dan *United Nations (UN)* menargetkan pengurangan setengah dari populasi penduduk dunia yang berada dalam kemiskinan (Thirwall, 2006:20). Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga bersepakat menargetkan pengurangan kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 7,5 persen dari 27,2 juta penduduk miskin Indonesia yang terdaftar pada tahun 1990 (Bappenas, 2008). Komitmen pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan juga tercermin dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

2005-2009 yang merupakan bagian dari Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) (World Bank, 2006). Target yang ditetapkan pemerintah yaitu mengurangi angka kemiskinan sebesar 10 persen pada tahun 2009 dari 18,2 persen angka kemiskinan pada tahun 2002.

Program pengentasan kemiskinan tersebut telah memberikan hasil yang cukup baik bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya tren penurunan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 mengalami penurunan dari 38,39 juta jiwa menjadi 35,1 juta jiwa pada tahun 2002. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Selanjutnya, penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia terus terjadi selama periode tahun 2007 hingga tahun 2014. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin mencapai angka 37,17 juta jiwa atau sebanyak 16,58 persen. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai angka 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen. Secara keseluruhan, selama periode tahun 2006 hingga 2010, penurunan angka kemiskinan mampu mencapai 8,88 juta jiwa, sedangkan pada periode tahun 2010 hingga 2014 angka kemiskinan hanya mampu diturunkan sebesar 2,74 juta jiwa. Secara lebih ringkas, perkembangan kemiskinan di Indonesia pada periode 2002-2014 dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



Sumber: BPS, 2014

Gambar 1.1
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2002-2014

Namun, perlu diingat bahwa program pengentasan kemiskinan dihadapkan pada kendala yang besar, seperti adanya resiko-resiko sosial, ekonomi dan politik, ketidakpastian, serta kemampuan yang terbatas untuk memulihkan diri (*recovery*) (Dutta dkk, 2010). Dampak dari kendala tersebut dapat dilihat dari peningkatan angka kemiskinan yang terjadi pada tahun 2006. Jumlah penduduk miskin meningkat dari 35.1 juta jiwa atau 15.97 persen pada tahun 2005 menjadi 39.3 juta jiwa atau secara relatif 17.75 persen pada tahun 2006. Kenaikan angka kemiskinan tersebut disebabkan adanya guncangan ekonomi berupa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak dua kali pada bulan Maret dan Oktober 2005. Pada bulan Maret

harga bensin premium meningkat sebesar 33 persen, minyak solar meningkat sebesar 27 persen, dan minyak tanah meningkat sebesar 22 persen. Sementara itu, pada bulan Oktober harga bensin premium dan minyak solar masing-masing mengalami peningkatan sebesar 88 persen dan 105 persen, sedangkan minyak tanah turun sebesar 9 persen. Selanjutnya, pascakenaikan BBM harga bahan pokok khususnya beras melambung tinggi yakni mencapai 33 persen (Bank Dunia, 2006). Jika harga beras naik, kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan kalori akan menurun.

Guncangan akibat kenaikan harga BBM subsidi tersebut kembali terjadi pada November tahun 2014. Harga bensin premium ditetapkan dari Rp. 6.500/liter menjadi Rp. 8.500/liter, minyak solar ditetapkan dari Rp. 5.500/liter menjadi Rp. 7.500/liter, sedangkan harga minyak tanah tidak mengalami perubahan. Adanya kebijakan kenaikan harga BBM dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi kenaikan harga bahan makanan (Bank Indonesia, 2014). Hal ini tidak terlepas dari kenaikan biaya produksi atau biaya angkut untuk pendistribusian barang dan jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak terkontrol dapat menyebabkan inflasi yang pada akhirnya berimbas pada perlambatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kerentanan kemiskinan.

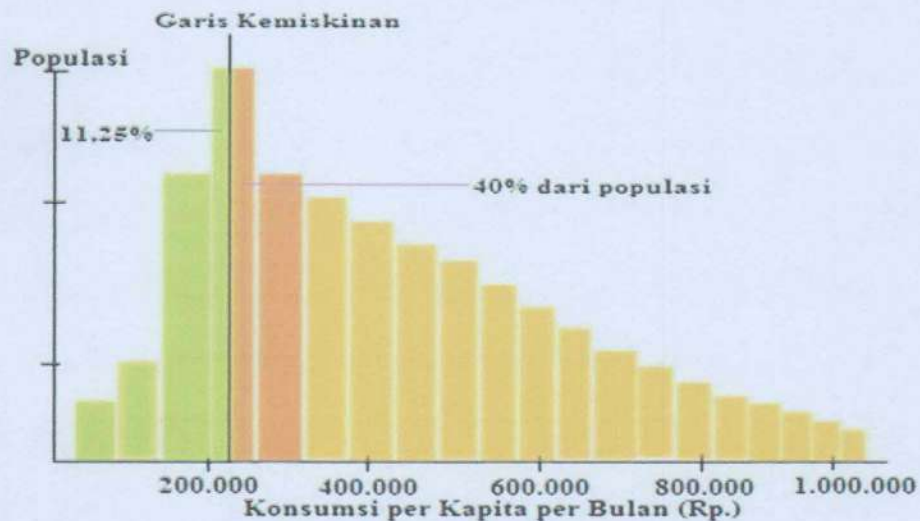
Guncangan (*shocks*) memang merupakan salah satu penyebab paling krusial dalam kemiskinan. Jenis guncangan yang dimaksud berkaitan dengan kondisi ekonomi, seperti guncangan finansial (*financial shocks*) pada pendapatan, pengeluaran, harta dan aset keuangan, serta resiko-resiko non-finansial lainnya (Dercon, 2011). Umumnya, rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga yang

banyak cenderung lebih rentan terhadap guncangan dibandingkan rumah tangga dengan anggota keluarga yang sedikit. Di sisi lain, individu yang tidak memiliki aset keuangan dan berpenghasilan rendah tidak mampu mengatasi guncangan. Dengan demikian, adanya guncangan dapat memperbesar kemungkinan bagi masyarakat untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan atau mengalami kerentanan kemiskinan (*vulnerability to poverty*) (Ligon dan Schechter, 2004).

Suatu individu atau rumah tangga dikatakan rentan miskin apabila berada tepat di atas garis kemiskinan. Bank Dunia (2006) melaporkan bahwa hampir 42 persen dari seluruh penduduk Indonesia berada di antara garis kemiskinan, yaitu USD\$1 dan USD\$2 per hari berdasarkan standart *Purchasing Power Parity* (PPP). Kelompok penduduk inilah yang dikatakan sebagai penduduk rentan miskin. Jika dilakukan penetapan standart PPP sebesar USD\$1, terdapat 7,4% penduduk yang tergolong miskin. Saat terjadi kenaikan standart PPP menjadi USD\$2 per hari, maka jumlah penduduk yang tergolong miskin menjadi 49 %. Hal serupa juga dialami penduduk Indonesia saat dihadapkan pada kondisi garis kemiskinan. Ketika garis kemiskinan dinaikkan menjadi USD\$1,55 per hari, maka terdapat 16,7% penduduk Indonesia yang tergolong miskin.

Konsep kerentanan kemiskinan menurut Suryahadi dan Sumarto (2001) dijelaskan sebagai risiko sebuah rumah tangga untuk jatuh miskin dalam waktu mendatang. Bahkan dalam penelitiannya dikatakan bahwa jumlah penduduk yang tergolong rentan miskin di Indonesia masih banyak. Laporan TNP2K pada gambar 1.2 menunjukkan kondisi kerentanan kemiskinan penduduk di Indonesia. Distribusi

pengeluaran per kapita per bulan penduduk terkonsentrasi di sebelah kiri garis kemiskinan. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat kelompok penduduk yang tergolong miskin atau memiliki pengeluaran per kapita sebulan dibawah Rp. 200.000,- yaitu sebanyak 11,25 persen. Sementara itu, terdapat sejumlah penduduk yang berada tepat atau sedikit di atas garis kemiskinan. Penduduk tersebut hidup diantara 1 dan 2 dolar AS per hari atau 1,4 kali sedikit di atas garis kemiskinan nasional (Bank Dunia, 2007). Penduduk-penduduk inilah yang kemudian dikatakan rentan miskin. Berdasarkan data TNP2K tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah kelompok yang rentan miskin mencakup paling tidak 40 persen dari total populasi di Indonesia (TNP2K, 2015). Secara ringkas, kondisi kerentanan di Indonesia dapat dilihat dari grafik berikut :



Sumber : TNP2K, 2010

Gambar 1.2
Profil Kerentanan Kemiskinan di Indonesia

Penetapan pengukuran kerentanan kemiskinan (*vulnerability to poverty*) dilakukan terkait adanya keterbatasan pengukuran kemiskinan, yaitu *headcount poverty rate* (Bah, 2013). Metode ini hanya menyajikan informasi mengenai rumah tangga yang berada di bawah dan di atas garis kemiskinan. Hal ini dapat diartikan bahwa metode *headcount povert rate* mengabaikan rumah tangga yang berada tepat di garis kemiskinan atau rentan menjadi miskin. Selain itu, konsep pengukuran ini bersifat statis dan *ex post*, sehingga baru dapat dilakukan setelah individu atau rumah tangga tersebut jatuh miskin (Dercon, 2011). Padahal, fenomena kemiskinan yang terjadi saat ini bersifat stokastik sehingga memiliki konsep yang berseberangan dengan *headcount poverty rate* (Chaudhuri, 2003).

Analisis kerentanan kemiskinan bersifat *ex ante* atau dampak di masa mendatang. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis profil kerentanan kemiskinan rumah tangga. Hal ini penting dilakukan terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penduduk yang rentan miskin (*vulnerable people*) jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan (Haughton dan Khadker, 2010:232). Namun, perlu diingat bahwa kebijakan pencegahan kerentanan kemiskinan tidak terlepas dari determinannya. Determinan tersebut berupa karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi rumah tangga. Secara garis besar, karakteristik rumah tangga yang dimaksud meliputi faktor usia kepala rumah tangga yang tinggi (Deressa, 2013), memiliki jumlah anggota rumah tangga yang besar (Navignon, 2010), tingkat pendidikan yang rendah (Princhett dkk, 2000), individu atau rumah tangga yang berada di perdesaan (Jha dkk, 2009), rumah tangga yang tidak memiliki tabungan

(Narayan dan Petesch, 2007), dan rumah tangga yang tidak memiliki tanah (Haq, 2014).

Faktor usia kepala rumah tangga yang tinggi menjadi penyebab kerentanan kemiskinan karena penduduk berusia tua cenderung tidak produktif. Menurut Robert (2001) dalam Baiyegunhi dan Fraser (2010), dana pensiun atau jaminan hari tua yang diterima dari pemerintah tidak mampu membantu mereka keluar dari kerentanan kemiskinan. Umumnya, penduduk berusia tua yang tergolong tidak rentan miskin dikarenakan memiliki anak-anak dengan pekerjaan yang baik, penurunan rasio ketergantungan dalam keluarga, dan aset keuangan yang semakin meningkat seiring dengan penambahan usia.

Faktor demografi lain yang juga menjadi faktor kerentanan kemiskinan adalah jumlah anggota rumah tangga yang banyak (Chaudhuri, 2003). Besarnya jumlah anggota rumah tangga berdampak pada rasio ketergantungan yang tinggi (Kasirye, 2007). Akibatnya, pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang banyak dalam rumah tangga, seperti kebutuhan akan makanan (Bank Dunia, 2007).

Faktor lokasi rumah tangga yang berada di wilayah perdesaan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kerentanan kemiskinan (Chaudhuri dkk, 2002). Salah satu penyebab penduduk di perdesaan tergolong rentan miskin adalah infrastruktur dan transportasi yang kurang berkembang (Jha dkk, 2009). Hal ini menjadi faktor penghambat bagi penduduk dalam mengakses pasar, fasilitas layanan kesehatan, dan pendidikan.

Faktor tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab rumah tangga mengalami kerentanan kemiskinan (Ligon dan Schechter, 2003). Menurut Imai dan Azam (2009), tingkat pendidikan memengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Hal ini disebabkan *skill* dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas modal manusia pada masing-masing individu. Keterbatasan pengetahuan menyebabkan mereka tidak mampu mengakses berbagai macam sumber daya sehingga rentan untuk jatuh miskin (Todaro, 2006:143).

Faktor ekonomi berupa keterbatasan terhadap kepemilikan aset keuangan, seperti tabungan juga menjadi faktor kunci meningkatnya resiko kerentanan kemiskinan (Matul, 2009). Terutama bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki tabungan. Sebab, mereka akan kesulitan mendapatkan dana untuk pendidikan atau merintis usaha di tahun mendatang (Narayan dan Petesch, 2007). Selain itu, mereka juga tidak mampu menghadapi guncangan ekonomi seperti bencana alam dan kenaikan harga (Haughton dan Khadker, 2010: 244-245).

Faktor penting lain dari kerentanan kemiskinan adalah aset fisik berupa kepemilikan tanah oleh rumah tangga (Haq, 2014). Umumnya, mereka yang memiliki harta atau aset fisik cenderung tidak rentan miskin (Philip dan Rayhan, 2004). Rumah tangga yang memiliki aset fisik diyakini memiliki konsumsi yang lebih besar di tahun mendatang (Iqbal, 2013). Kepemilikan tanah juga dapat menjadi sumber pendapatan lain untuk menghadapi guncangan negatif pada pendapatan utama (Haq, 2014)

Suryahadi dan Sumarto (2001) telah melakukan penelitian mengenai kerentanan kemiskinan dengan menggunakan data SUSENAS tahun 1996 dan 1999. Namun, penelitian tersebut hanya mengkaji profil kerentanan kemiskinan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam analisis lanjutan ini penulis mencoba untuk menganalisis profil kerentanan kemiskinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Studi ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Deressa (2013) dengan pengembangan pada analisisnya. Temuan fakta empiris pada studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi kerentanan kemiskinan. Maka dari itu, penulis menganggap perlu dilakukan penelitian mengenai **“Profil dan Determinan Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah profil kerentanan kemiskinan rumah tangga di Indonesia pada tahun 2014 ?
2. Apakah variabel usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tabungan, kepemilikan tanah, dan lokasi tempat tinggal berpengaruh terhadap nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengukur dan menganalisis profil kerentanan kemiskinan rumah tangga di Indonesia pada tahun 2014.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh variabel usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tabungan, kepemilikan tanah, dan lokasi tempat tinggal terhadap nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi bagi pembaca terkait profil kerentanan kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan kemiskinan di Indonesia, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Memberikan gambaran bagi pemerintah tentang kondisi kerentanan kemiskinan rumah tangga di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bagian dimana pembahasannya saling terkait, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat landasan teori, kerangka konsep, penelitian sebelumnya, serta hipotesis dan metode analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat gambaran umum kemiskinan dan profil kerentanan di Indonesia, deskripsi hasil uji empiris, analisis model dan pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memuat simpulan hasil penelitian yang ditarik oleh penulis dan saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

Daftar Pustaka

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2**TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Landasan Teori****2.1.1 Teori Kesejahteraan**

Mengukur tingkat kemiskinan dan karakteristik rumah tangga miskin memerlukan sebuah teori kesejahteraan (*well-being*) yang dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan (Nallari dan Griffith, 2011:15). Haughton dan Khandker (2010:2-3) menjelaskan kesejahteraan melalui tiga pendekatan. Pendekatan pertama mengarah pada penguasaan atas barang secara umum. Dalam hal ini, kesejahteraan masyarakat dinilai dari penguasaan yang besar atas sumberdaya. Pendekatan kedua melihat kemampuan individu atau rumah tangga dalam memperoleh barang atau jasa tertentu. Pendekatan ketiga terhadap kesejahteraan mengacu pada pendapat Sen (1987) dalam Haughton dan Khandker (2010:3), yang menyatakan bahwa kesejahteraan berasal dari kemampuan untuk menjalankan fungsi dalam masyarakat.

Selanjutnya, Cahyat et al (2007 : 2-3) membagi kesejahteraan menjadi dua bagian, yaitu kesejahteraan subjektif (*subjective wellbeing*) dan kesejahteraan inti. Kesejahteraan subjektif bersifat sementara dan berupa kejadian-kejadian sesaat. Secara umum, kesejahteraan ini berkaitan dengan kualitas hidup, kebahagiaan, dan aspek-aspek kehidupan secara multidimensi (World Bank, 2007). Penilaian kesejahteraan subjektif juga berkaitan dengan perasaan yang dirasakan individu atau rumah tangga terhadap kondisi hidup yang meliputi rasa bahagia, rasa miskin, rasa serba kekurangan, dan perasaan-perasaan lainnya. Sementara itu, menurut World

: 18). Pengeluaran per kapita menunjukkan pengeluaran minimum yang dilakukan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar atau tingkat kepuasannya (*levels of utility*).

Adapun Debraj Rayy (2001:137) sepakat bahwa tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari pendapatan. Menurut Pigao (1932:3) dalam Easterlin (2003), jika pendapatan meningkat secara substansial, maka kesejahteraan ekonomi dan sosial akan berubah ke arah yang sama. Kesejahteraan sosial tersebut dapat diukur dari tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*), dan pembangunan manusia (*human development*) (Ackerman *et al*,1997:137). Namun, penetapan pendapatan sebagai indikator kesejahteraan cenderung susah untuk diukur karena sifatnya yang fluktuatif. Selain itu, rumah tangga lebih mampu memberikan penjelasan mengenai apa yang mereka konsumsi dibandingkan apa yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan proxy pengeluaran per kapita sebagai indikator kesejahteraan untuk menganalisis kemiskinan.

2.1.2 Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang berhubungan erat dengan indikator - indikator kesejahteraan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Sumodiningrat, 1989:26). Arsyad (2010: 299) membagi kemiskinan menjadi dua aspek,yaitu (1) aspek primer yang berupa miskin harta (aset), organisasi sosial politik, keterampilan, dan pengetahuan. (2) aspek sekunder yang berupa miskin terhadap jaringan sosial, informasi, dan sumber-sumber keuangan. Secara umum,

masyarakat yang mengalami kemiskinan memiliki ciri – ciri tertentu. Salim (1984: 63) memaparkan ciri – ciri kemiskinan sebagai berikut: (1) Masyarakat tidak memiliki aset produksi sendiri, seperti tanah dan keterampilan. (2) mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. (3) Mereka rata-rata memiliki pendidikan yang rendah. (4) Sebagian besar masyarakat miskin tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai petani. Di sisi lain, masyarakat miskin di perkotaan tergolong berusia muda, berpendidikan rendah, dan tidak memiliki keterampilan khusus.

Selain ciri – ciri kemiskinan tersebut, faktor – faktor penyebab kemiskinan juga perlu mendapat perhatian. Sharp *et al* (1996) dalam Kuncoro (1997: 131) mengidentifikasi penyebab – penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama, adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam hal ini, individu atau rumah tangga miskin memiliki kualitas yang rendah dan sumberdaya yang terbatas. Kedua, adanya perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan produktivitas dan upah yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Ketiga, adanya keterbatasan akses terhadap modal sehingga produktivitas individu atau rumah tangga rendah.

Namun, analisi penyebab kemiskinan pada individu atau rumah tangga tidak hanya bersifat materi. Haughton dan Khadker (2009: 173) menjelaskan kemiskinan pada rumah tangga secara spesifik melalui tiga klasifikasi karakteristik, sebagai berikut:

1. Karakteristik Demografi

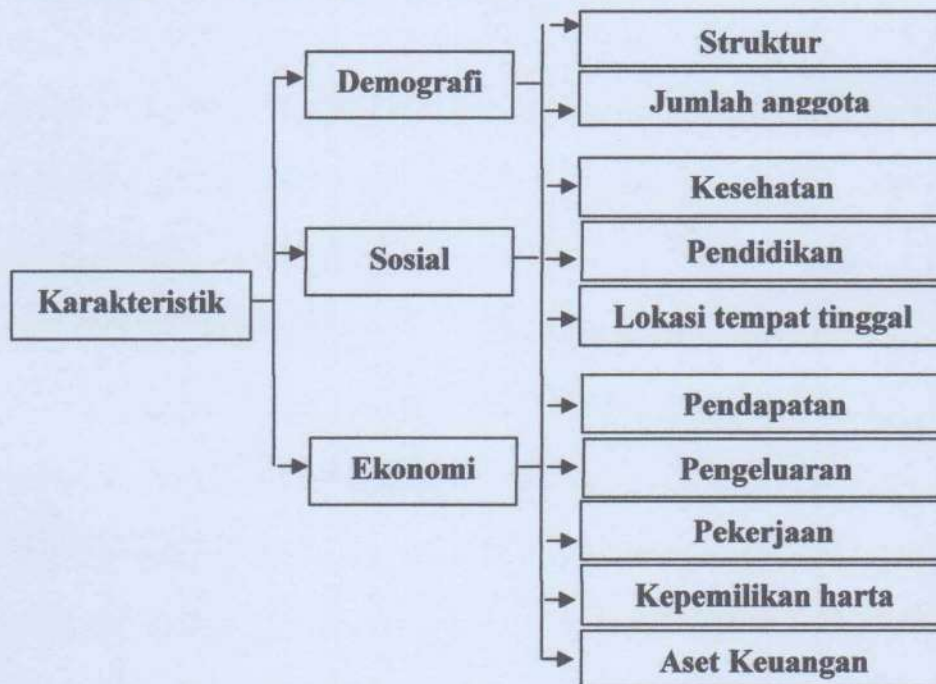
Karakteristik demografi memakai struktur dan jumlah anggota rumah tangga sebagai indikator. Jika dilihat dari segi struktur (*structure*), rumah tangga miskin didominasi kepala rumah tangga dengan usia lebih dan memiliki banyak anak. Rumah tangga dengan jumlah anak yang banyak berpotensi menjadi miskin karena pendapatan yang diperoleh digunakan untuk membiayai lebih banyak anggota keluarga (TNP2K, 2010). Lebih lanjut, dari segi jumlah anggota rumah tangga (*household size*), rumah tangga miskin berpeluang lebih lama mengalami kemiskinan bila jumlah anggota rumah tangga semakin besar dan jumlah anggota bukan angkatan kerja (anggota tidak produktif) semakin banyak. Hal tersebut akan menambah tingkat ketergantungan dalam rumah tangga dan akan mengarah pada kemiskinan kronis (Dartanto dan Nurcholis, 2013).

2. Karakteristik sosial

Indikator yang digunakan untuk menganalisis kemiskinan berdasarkan karakteristik sosial adalah status kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Status kesehatan yang dimaksud meliputi status nutris (berat badan, tinggi badan, dan usia), status penyakit (malaria, diare, infeksi pernapasan, dan polio) ,dan ketersediaan akses pelayanan kesehatan (jarak dan lokasi pusat pelayanan kesehatan, serta ketersediaan tenaga medis). Sementara itu, status pendidikan dapat berupa literasi dan jenjang pendidikan.

3. Karakteristik ekonomi

Karakteristik kemiskinan rumah tangga dari sisi ekonomi digambarkan melalui beberapa indikator kesejahteraan, seperti pendapatan dan pengeluaran, pekerjaan rumah tangga, serta kepemilikan harta dan aset keuangan. Secara khusus, kemiskinan rumah tangga dari sisi pekerjaan (*household employment*) dapat dilihat dari status pekerjaan, jam bekerja, status pekerjaan ganda, dan intensitas berganti pekerjaan. Sementara itu, dari segi kepemilikan harta dan aset keuangan dapat dilihat dari kepemilikan tanah, peralatan elektronik, bangunan, dan kepemilikan tabungan atau aset keuangan lainnya. Indikator – indikator karakteristik rumah tangga secara ringkas dapat dilihat dari gambar 2.1 berikut ini :



Sumber: Haughton dan Khadker, 2009

Gambar 2.1
Karakteristik Kemiskinan Rumah Tangga

2.1.3 Definisi Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu ketidakmampuan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Runciman dan Townsend, definisi kemiskinan dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam pemenuhan nutrisi minimal dan pemerataan pendapatan masyarakat (Maxwell, 1999; Philip dan Rayhan, 2004). Kemiskinan adalah kekurangan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok (Suyanto dan Karnaji, 2005:1). Selain itu, International Labour Organization (ILO) dalam Maxwell (1999) menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya didefinisikan sebagai pendapatan atau pemenuhan nutrisi, akan tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

Selanjutnya, definisi dan konsep kemiskinan semakin berkembang dengan terminologi dan rumusan yang ditentukan oleh berbagai instansi baik nasional maupun internasional. Badan Pusat Statistik (2004) menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi kebutuhan makan dan non makan. Kuncoro (2003: 116) menambahkan pula bahwa acuan yang digunakan dalam mengukur kebutuhan makan adalah 2.100 kalori per hari, sedangkan kebutuhan non-makan terdiri dari pengeluaran untuk berbagai barang dan jasa yang diperlukan, pakaian, dan rumah. Proses klasifikasi penduduk miskin dan tidak miskin dilakukan dengan membandingkan tingkat konsumsi terhadap garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. Penduduk

dikatakan miskin bila pengeluaran per kapita berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Dipihak lain, instansi internasional seperti *World Bank* dalam Haughton dan Khandker (2006:2) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well-being*). Konsep keterkaitan antara kesejahteraan dan kemiskinan secara luas dijelaskan oleh Sen (1987) dalam Haughton dan Khandker (2006:3) yang menyatakan bahwa "*Poverty arises when people lack key capabilities, and so have inadequate income or education, or poor health, or insecurity, or low self-confidence, or a sense of powerlessness, or the absence of rights such as freedom of speech*". Dalam hal ini, batas kemiskinan setiap individu ditetapkan berdasarkan pendapatan, pengeluaran, pendidikan, kesehatan, dan dimensi kesejahteraan lainnya (Bourguignon dan Chakravarty, 2003).

Kemudian, definisi tentang kemiskinan menjadi lebih kompleks. Hal ini didukung oleh Chambers (1987) dalam Suryono (2001:113) yang menyatakan bahwa permasalahan pokok dari kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut *deprivation trap*. Chambers (2001) dalam Abustan (2010) menjelaskan bahwa *deprivation trap* terdiri dari lima dimensi yang meliputi kemiskinan itu sendiri (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), keterasingan (*isolation*), kerentanan (*vulnerability*), dan ketergantungan (*dependence*). Kelima unsur ini merupakan perangkap kemiskinan yang saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga berbahaya bagi peluang hidup orang atau kelompok miskin. Diantara kelima unsur *deprivation trap*, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini

dikarenakan kerentanan memicu adanya *poverty rackets*. Selain itu, kerentanan menyebabkan keluarga yang miskin akan menjadi lebih miskin di masa mendatang karena harus menjual harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Moser (1998), keluarga dikatakan tidak rentan miskin apabila memiliki banyak aset. Sebaliknya, bila aset yang dimiliki mengalami erosi yang besar maka semakin besar pula peluang untuk rentan miskin.

2.1.4 Identifikasi Kemiskinan

2.1.4.1 Pendekatan Absolut

Pandangan kemiskinan berdasarkan pendekatan absolut menitikberatkan pada standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (*poverty line*) yang bersifat mutlak. *The European Anti Poverty Network* (EAPN) mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai berikut: "*Absolute or extreme poverty is when people lack the basic necessities for survival. For instance they may be starving, lack clean water, proper housing, sufficient clothing or medicines and be struggling to stay alive.*" Pada dasarnya, kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan konsep kebutuhan pokok minimum yang dinyatakan dalam bentuk uang. Kebutuhan pokok minimum diartikan sebagai serangkaian barang dan jasa yang dibutuhkan individu atau rumah tangga untuk kelangsungan hidup.

Kemampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa barang dan jasa tersebut ditentukan oleh daya beli. Daya beli inilah yang selanjutnya dijadikan sebagai garis batas. Penetapan garis batas yang dikenal dengan istilah garis kemiskinan ini bertujuan untuk menggolongkan orang-orang

yang miskin dan tidak miskin. Badan Pusat Statistik (2014) menetapkan penduduk yang memiliki pendapat lebih kecil dari garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Di Indonesia, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS menggunakan metode *head count index*. Pendekatan kebutuhan dasar atau *basic needs approach* digunakan sebagai acuan untuk menghitung garis kemiskinan. Garis kemiskinan dibagi menjadi dua kelompok, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan non makanan. Pengukuran yang digunakan dalam pendekatan ini melihat dari besarnya rupiahnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum baik makanan maupun non makanan. Garis kemiskinan makanan mengarah pada pengeluaran konsumsi per kapita per bulan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Sementara garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan non makanan meliputi kesehatan, pendidikan, pakaian, serta barang dan jasa lainnya.

Secara Internasional, Bank Dunia (2008) menetapkan garis batas yang sama untuk membandingkan kemiskinan antar negara. Kemiskinan absolut digambarkan dengan tingkat hidup yang memiliki pendapatan dibawah US \$1 per hari dan untuk tingkat hidup dengan pendapatan dibawah US \$2 per hari dikatakan sebagai kemiskinan menengah. Di negara sedang berkembang, seseorang yang berpendapatan kurang dari \$ US 1 per hari disebut miskin. US dolar yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*) bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*).

2.1.4.2 Pendekatan Relatif

Pendekatan relatif mengarah pada perbedaan kesejahteraan masyarakat secara relatif. Menurut Nacional De Estadistica Institute (2010), kemiskinan relatif didefinisikan sebagai seseorang yang berada pada situasi yang tidak menguntungkan secara finansial maupun sosial dibandingkan orang-orang disekitarnya. Kelompok masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin apabila berada di persentil derajat kemiskinan paling bawah. Philip dan Rayhan (2004:7) mengatakan bahwa:

“Relative poverty compares the lowest segments of a population with upper segments, usually measured in income quintiles or deciles, may be quantified by concentrating on a small number of key indicators such as the share, in national wealth or income, possessed by 20% of the poorest inhabitants of a country”.

Pendapat Philip dan Rayhan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan relatif memandang kemiskinan dari aspek ketimpangan antar penduduk. Pandangan ini berfokus pada besarnya ketimpangan antara 20 atau 10 persen masyarakat yang berada di posisi paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lain. Oleh karena itu, pendekatan ketimpang berorientasi pada upaya memperkecil perbedaan antara masyarakat miskin dan masyarakat makmur dalam differesiasi sosial dan dimensi stratifikasi. Ketimpangan dan kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Apabila suatu populasi masih memiliki ketimpangan, maka kemiskinan akan tetap ada.

Garis kemiskinan dalam pendekatan relatif tidak mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Oleh karena itu, tidak dapat digunakan untuk

membandingkan kesejahteraan antar negara dan waktu. Ravallion (1998) dalam BPS (2012) mengatakan bahwa garis kemiskinan di negara kaya relative lebih tinggi dibandingkan negara miskin. Di sisi lain, dalam mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, penggunaan garis kemiskinan relatif perlu disesuaikan dengan tingkat pembangunan wilayah secara keseluruhan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan absolut. Hal ini disebabkan untuk mempermudah dalam membandingkan kemiskinan antar provinsi dan waktu di Indonesia.

2.1.5 Konsep Kerentanan Kemiskinan

Metode pengukuran kerentanan kemiskinan muncul karena adanya kelemahan ukuran kemiskinan dalam mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin (Dercon, 2011). Pengukuran kemiskinan saat ini dinilai kurang relevan untuk menganalisis penduduk miskin di tahun yang akan datang karena transisi penduduk yang keluar dan masuk ke dalam kemiskinan masih relatif tinggi. Hal ini menyebabkan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, kebijakan yang menggunakan ukuran kemiskinan *ex post* perlu dilengkapi dengan pengukuran *ex ante* agar program pengentasan kemiskinan lebih optimal.

Secara umum, terdapat dua garis batas (*thresholds*) yang digunakan untuk memisahkan kelompok penduduk yang rentan miskin dan tidak rentan miskin (Haughton dan Khadker, 2010:235). Pertama, penentuan garis batas dengan berdasarkan pada kemungkinan individu atau rumah tangga untuk menjadi miskin

sebesar 50 persen atau 0,5. Rumah tangga yang memiliki kemungkinan menjadi miskin di tahun mendatang diatas 50 persen digolongkan ke dalam kelompok rentan tinggi. Kedua, garis batas dengan menggunakan P_0 (*headcount poverty rate*). Apabila kemungkinan rumah tangga untuk menjadi miskin lebih besar dibandingkan tingkat kemiskinan, maka rumah tangga tersebut digolongkan rentan tinggi.

Pengurangan kerentanan kemiskinan merupakan salah satu tantangan bagi pembangunan (Sen, 1999). World Bank (1998) dalam Foster *et al* (2010) menambahkan bahwa bagi negara-negara berkembang (NSB), melindungi kelompok yang rentan miskin sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Chaudhuri (2001) dalam Jha dan Dang (2008) mengemukakan empat alasan pentingnya memperhatikan kerentanan kemiskinan, yaitu (1) pendekatan kesejahteraan dengan penilaian kemiskinan masih bersifat statis. Aplikasi kebijakan yang diambil hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan yang terjadi di masa depan saja. (2) Penilaian kerentanan mampu menganalisis intervensi pencegahan kemiskinan *ex ante* dan intervensi pengurangan kemiskinan *ex post*. (3) Analisis kerentanan dapat mengamati sumber dan bentuk resiko rumah tangga. (4) Kerentanan memuat aspek intrinsik kesejahteraan (*well-being*) dengan asumsi bahwa individu sebagai penentang resiko.

Pada dasarnya, tingkat kerentanan kemiskinan berkaitan dengan kemampuan individu atau rumah tangga dalam merespon resiko. Alawang, Siegel, dan Jorgensen (2001) menambahkan bahwa rumah tangga rentan untuk kehilangan kesejahteraan karena mengalami risiko. Konsep kerentanan dari sisi risiko memiliki 5 prinsip, yaitu

: (1) memandang ke depan (*forward-looking*) dan dapat didefinisikan sebagai probabilitas seseorang mengalami suatu kehilangan dimasa mendatang yang relatif terhadap tolok ukur kesejahteraan; (2) kerentanan disebabkan oleh peristiwa yang tidak pasti; (3) tingkat kerentanan tergantung pada karakteristik risiko dan kemampuan rumah tangga untuk menanggapi mereka; (4) kerentanan tergantung pada horison waktu; dan (5) baik orang miskin maupun tidak miskin bisa rentan karena terbatasnya akses mereka terhadap aset dan kemampuan untuk merespon risiko.

Hoddinot dan Quisumbing (2003) menjelaskan bahwa risiko rumah tangga untuk mengalami kerentanan kemiskinan disebabkan adanya guncangan (*shocks*) yang memengaruhi aset, aktivitas, dan hasil (*outcomes*). Jenis-jenis guncangan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Jenis-Jenis Guncangan

Guncangan	Contoh guncangan secara khusus
Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bencana alam, seperti hujan lebat, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, badai, dan angin kencang. 2. Permasalahan sosial, seperti kriminalitas, terorisme, dan perang dunia. 3. Guncangan kesehatan, seperti kecelakaan, penyakit kronis, dan disabilitas. 4. Guncangan perekonomian, seperti pengangguran dan kehilangan nilai dari aset finansial karena inflasi
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehilangan akses terhadap input dan keterbatasan mendapatkan output karena adanya bencana alam, serta guncangan sosial dan politik. 2. Resiko kenaikan harga output karena ketidakpastian kebijakan ekonomi, seperti perubahan kebijakan penetapan harga.
<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resiko kenaikan harga pada pasar kebutuhan pokok, seperti pasar makanan. 2. Ketersediaan makanan 3. Ketidakpastian terhadap akses publik, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan

Sumber: Hoddinot dan Quisumbing (2003)

2.1.6 Definisi Kerentanan Kemiskinan

Secara umum, kerentanan terhadap kemiskinan dapat diartikan sebagai kemungkinan individu atau rumah tangga untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan di masa yang akan datang. Beberapa peneliti juga menyampaikan definisi yang berbeda tentang kerentanan terhadap kemiskinan. Chaudhuri dkk (2002) mendefinisikan kerentanan terhadap kemiskinan sebagai suatu probabilitas untuk menjadi atau tetap pada status miskin pada waktu $t + 1$. Terdapat empat alasan penting untuk fokus pada masalah kerentanan, yaitu (1) pendekatan kesejahteraan yang temporal atau statis, seperti penilaian kemiskinan, penggunaannya masih sebatas dalam memikirkan intervensi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan yang hanya dapat terjadi di masa depan. (2) Penilaian kerentanan menyoroti perbedaan antara intervensi pencegahan kemiskinan *ex-ante* (*ex-ante poverty prevention interventions*) dan intervensi pengurangan kemiskinan *ex-post* (*ex-post poverty alleviation interventions*). (3) Analisis kerentanan membantu dalam penyelidikan sumber dan bentuk risiko rumah tangga. Hal tersebut dapat membantu dalam perancangan program-program jaring pengaman yang tepat untuk mengurangi kerentanan atau mengurangi risiko. (4) Kerentanan adalah aspek intrinsik kesejahteraan (*well-being*) dengan asumsi bahwa individu adalah penentang risiko (*risk averse*).

Selanjutnya, Coudoul, Hentschel, dan Wodon (2002) mendefinisikan kerentanan dari dimensi kesejahteraan sebagai berikut:

“the vulnerability dimension of well-being, defined here as the probability or risk today of being in poverty—or falling deeper into poverty—at some point in the future. Vulnerability is a key dimension of well-being, since it affects individuals’ behavior (in terms of investment, production patterns, coping strategies) and their perception of their own situation”

Pemahaman mengenai kerentanan tersebut sesuai dengan pernyataan Haughton dan Khandker (2006) bahwa perilaku individu dalam hal investasi, pola produksi, strategi penanggulangan, dan persepsi situasi dipengaruhi oleh kerentanan. Terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan dalam konsep kerentanan, yaitu (1) partisipasi rumah tangga dalam sektor informal; (2) Pola konsumsi dan pendapatan per kapita rumah tangga; (3) persepsi masyarakat terhadap kerentanan dan faktor penyebab kerentanan; dan (4) strategi yang dilakukan rumah tangga untuk keluar dari kerentanan, seperti menjual aset produktif dan mengurangi tingkat konsumsi.

Adapun Bank Dunia mendefinisikan kerentanan sebagai kemungkinan seseorang atau rumah tangga untuk akan tetap miskin, jatuh ke dalam kemiskinan, atau jatuh lebih jauh di bawah garis kemiskinan. Bank Dunia (2001) dalam Ceriani (2007) juga menambahkan bahwa tujuan mempelajari kemiskinan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang miskin pada saat ini, namun juga mencegah penduduk jatuh miskin pada masa mendatang. Alasan tersebut yang mendasari dibutuhkan adanya konsep kemiskinan dengan melihat kedepan (*forward looking concept*). Hal tersebut dikarenakan distribusi pendapatan di masa yang akan datang tidak diketahui. Penelitian ini menggunakan konsep dan pengertian kerentanan terhadap kemiskinan menurut Bank Dunia dan Chaudhuri. Sebab, kedua konsep tersebut banyak digunakan dalam dunia akademis.

2.1.7 Pendekatan Kerentanan Kemiskinan

Penilaian kerentanan terhadap kemiskinan dilakukan melalui 3 pendekatan (Hoddinot dan Quisumbing, 2003), yaitu (1) *vulnerability as expected poverty* (VEP); (2) *vulnerability as low expected utility* (VEU); dan (3) *vulnerability as uninsured exposure to risk* (VER). Berikut ini penjelasan mengenai pengukuran dari masing-masing pendekatan:

Berdasarkan Holzman dkk (2003), idealnya, implementasi pengukuran kerentanan membutuhkan data panel dan informasi mengenai: (1) guncangan (*shock*) yang mempengaruhi rumah tangga; (2) kemampuan rumah tangga untuk bertahan terhadap guncangan, namun beberapa data tidak tersedia, terutama di negara berkembang. Pada kasus-kasus tertentu, data *cross section* dapat digunakan untuk mengestimasi kerentanan. Hal tersebut merujuk pada konsep pendekatan *vulnerability as expected poverty* (VEP). Untuk mengestimasi kerentanan kemiskinan suatu rumah tangga, perlu diestimasi ekspektasi pengeluaran dan varians pengeluaran rumah tangga tersebut terlebih dahulu.

Namun, metode *vulnerability as expected poverty* (VEP) dianggap tidak konsisten dengan kerangka utilitas yang diharapkan (*the expected utility framework*). Oleh karena itu, para peneliti mengusulkan pengukuran dengan menggunakan *Vulnerability as Low Expected Utility* (VEU) sebagai pendekatan yang lebih tepat (Ligon dan Schechter, 2003). VEU menggunakan data panel longitudinal untuk melihat pola utilitas dari setiap individu. Dalam hal ini, pola utilitas yang digunakan

mengacu pada pendekatan utilitas dalam teori ekonomi mikro. Ada korelasi antara kerentanan, risiko, dan ketidakpastian. Teori ekspektasi utilitas memberitahu kita bahwa ekspektasi utilitas dari penolakan risiko individu jatuh ketika variabilitas pengeluaran meningkat, dan ketika aspek lainnya dianggap sama. Jika kita mengetahui fungsi utilitas dan pola ekspektasi pengeluaran dari semua individu, maka kita dapat menganalisis kemiskinan. (Kamanou dan Morduch, 2002)

Metode yang terakhir adalah *vulnerability as uninsured exposure to risk* (VER). Pada dasarnya, VER dirancang untuk menilai kerugian pasca hilangnya kesejahteraan dari guncangan negatif, misalnya bencana alam ataupun krisis. Metode VER menggunakan data longitudinal rumah tangga dan menganut perpektif *backward looking*. Oleh karena itu, VER berlawanan dengan penilaian kemiskinan masa *ex ante* (VEP). Perspektif *backward looking* menjelaskan bahwa dengan tidak adanya strategi manajemen risiko yang efektif, guncangan (*shock*) mengakibatkan hilangnya kesejahteraan hingga berdampak pada pengurangan pengeluaran. Penelitian ini menggunakan metode pengukuran *vulnerability as expected poverty* (VEP). Pertimbangan pemilihan metode dilihat dari ketersediaan data dan tujuannya. Data yang tersedia pada survey rumah tangga di Indonesia adalah *cross section* sehingga lebih tepat jika menggunakan VEP.

Tabel 2.2
Perbandingan Pendekatan Kerentanan Kemiskinan

Perbandingan	VEP	VEU	VER
Definisi	Kerentanan rumah tangga h pada waktu t. Vht adalah probabilitas kesejahteraan (pengeluaran) rumah tangga pada waktu t+1 (Cht+1) akan ada dibawah garis kemiskinan z.	Kerentanan adalah perbedaan utilitas yang berasal dari beberapa tingkat kepastian setara pengeluaran.	Penilaian ex-post akibat adanya guncangan negative (<i>negative shocks</i>) yang menyebabkan hilangnya kesejahteraan.
Keunggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relatif lebih mudah diukur dan dapat menghasilkan angka kerentanan 2. Dapat mengetahui rumah tangga yang saat ini tidak miskin, namun berisiko jatuh miskin. 3. Dapat dianalisis dengan data <i>single cross-section</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pemitanah data antara kerentanan karena kemiskinan dan kerentanan karena tidak dijamin (<i>uninsured risk</i>) 2. Dapat digunakan untuk mengukur kerentanan secara agregat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bukti bahwa manajemen resiko yang ada buruk dalam melindungi rumah tangga dari guncangan pendapatan 2. Dapat menunjukkan apakah kovariat dan atau guncangan idosinkratik adalah penyebab utama dari kerugian kesejahteraan
Kelemahan	Variabilitas data cross section harus mampu menangkap variabilitas temporal.	Memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Pada negara berkembang, sulit untuk mengukur utilitas.	Penilaian bersifat <i>ex-post</i> . Selain itu, membutuhkan data panel minimal tiga tahun untuk menghasilkan estimasi yang kredibel.

Sumber : Hoddinot dan Quisumbing, 2003

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, penelitian ini berawal dari penelitian yang telah dilakukan oleh Suryahadi dan Sumarto (2001) mengenai kerentanan kemiskinan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2001 tersebut berjudul "*The Chronic Poor, The Transient Poor, and The Vulnerable In Indonesia Before and After The Crisis*". Studi ini bertujuan untuk menilai kerentanan kemiskinan di Indonesia sebelum dan sesudah krisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data *cross-section* survei rumah tangga tahun 1996 dan 1999 yang berasal dari SUSENAS dan PODES. Selain itu, untuk garis kemiskinan tahun 1996 dan 1999 menggunakan data publikasi Badan Pusat Statistik yang dispesifikasikan menurut provinsi. Penelitian mengenai kerentanan kemiskinan ini diestimasi melalui pendekatan *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP).

Selanjutnya, variabel yang digunakan berupa karakteristik rumah tangga secara ekonomi, sosial, demografi, serta karakteristik komunitas. Variabel tersebut meliputi jumlah anggota rumah tangga, kuadrat jumlah anggota rumah tangga, *dependency ratio* (rasio ketergantungan), usia kepala rumah tangga, kuadrat usia kepala rumah tangga, *dummy* pendidikan kepala rumah tangga, *dummy* status pernikahan, *dummy* pekerjaan, dan *dummy* gender, kepadatan populasi, proporsi rumah tangga miskin, *dummy* ketersediaan listrik, *dummy* akses terhadap kesehatan, *dummy* akses terhadap transportasi umum, *dummy* akses terhadap sekolah, *dummy* terdapat industri, *dummy* akses perdagangan, *dummy* akses terhadap lembaga

finansial, *dummy* fasilitas komunikasi, *dummy* cara akses air, *dummy* kepemilikan toilet, dan *dummy* pendidikan kepala desa.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Suryahadi dan Sumarto ini menunjukkan bahwa proporsi tingkat kemiskinan, kemiskinan kronis, dan kerentanan di Indonesia meningkat akibat adanya krisis. Peningkatan kemiskinan kronis akibat krisis cenderung lebih tinggi dibandingkan kemiskinan sementara (*transient poor*). Wilayah Indonesia bagian Timur, seperti Nusa Tenggara dan Kalimantan menguasai sebagian besar porsi kemiskinan kronis. Sementara itu, kemiskinan kronis yang rendah terjadi di sebagian besar provinsi di Jawa dan Sumatra.

Di sisi lain, krisis juga berdampak pada peningkatan tajam sebesar 15,6 persen pada proporsi kelompok rentan di Indonesia, dari 18,1 persen menjadi 33,7 persen. Proporsi penduduk yang mengalami kerentanan tinggi (High Vulnerability) juga mengalami peningkatan tajam sebesar tiga kali lipat, dari 6,8 persen sebelum krisis menjadi 18,4 persen setelah krisis. Demikian pula pada kelompok dengan kerentanan rendah yang mengalami lonjakan proporsi dari 4,7 persen menjadi 13,4 persen. Secara garis besar, meningkatkan kerentanan kemiskinan dapat dilihat dari peningkatan yang tajam pada rata-rata kelompok rentan miskin di tahun 1996 dan 1999. Proporsi peningkatan rata-rata kerentanan kemiskinan menjadi 27,2 persen di tahun 1999 dibandingkan 16,4 persen pada tahun 1996.

Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan kemiskinan. Proporsi kelompok rentan miskin di perkotaan cenderung lebih besar dibandingkan di desa. Hal ini disebabkan krisis yang

terjadi pada tahun 1997 menjadi guncangan besar bagi sector industry dan sektor perdagangan dan jasa di perkotaan. Faktor lain yang berpengaruh adalah pendidikan kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga yang tidak tamat pendidikan dasar mengalami kerentanan kemiskinan tinggi yang lebih besar dibandingkan kepala rumah tangga yang berpendidikan *primary*, *secondary*, dan *tertiary*. Proporsi kelompok dengan kerentanan tinggi yang berasal dari kepala rumah tangga yang tidak tamat pendidikan dasar meningkat hampir dua kali lipat, dari 4,3 persen pada tahun 1996 menjadi 8,4 persen pada tahun 1999. Sementara itu, kepala rumah tangga berpendidikan tinggi yang mengalami kerentanan tinggi meningkat dari 0,0 persen menjadi 0,1 persen setelah krisis.

Kemudian, pada tahun 2009, Milcher (2009) melakukan penelitian mengenai kemiskinan dan kerentanan antara Roma dan non-Roma. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa perbandingan kemiskinan dan kerentanan di Roma dan negara-negara non-Roma di Eropa Tenggara. Data dari penelitian yang dilakukan Milcher ini berasal dari *United Nations Development Programme (UNDP) cross country household survey* tahun 2004. Selain itu, metode yang digunakan berupa pendekatan *Vulnerability as Expected Poverty (VEP)* dan model ekonometri dari penelitian kerentanan kemiskinan Chaudhuri, Jalan, Suryahadi (2002)

Dalam penelitiannya, Milcher menggunakan karakteristik rumah tangga sebagai variabel independen. Karakteristik demografi yang digunakan berupa usia kepala rumah tangga, kuadrat usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan kuadrat jumlah anggota rumah tangga. Karakteristik sosial meliputi

lamanya waktu bersekolah dari kepala rumah tangga, *dummy* akses fasilitas kesehatan, dan akses terhadap sanitasi. Karakteristik ekonomi menggunakan *dummy* pendapatan, kepemilikan telepon, dan jumlah ruangan di rumah. Sementara itu, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah log pengeluaran per bulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara non-Roma memiliki tingkat kerentanan kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan negara Roma. Kerentanan kemiskinan yang dialami Roma berasal dari resiko. Resiko tersebut muncul dari permasalahan kemiskinan dan kerentanan pada karakteristik rumah tangga. Proporsi penduduk yang tergolong rentan di Roma sebesar 49 persen, sementara negara non-Roma 17 persen. Disisi lain, 42 persen rumah tangga di Roma mengalami kerentanan tinggi, sedangkan non Roma hanya 4 persen.

Penelitian tentang kerentanan kemiskinan juga telah dilakukan oleh Adepoju dan Yusuf (2012) di Nigeria yang berjudul "*Poverty and Vulnerability in South-West Nigeria*". Pada dasarnya, tujuan dari studi yang dilakukan Adepoju dan Yusuf adalah Mencari kemiskinan, determinan kemiskinan, mengukur kerentanan, dan determinan kerentanan. Penelitian ini menggunakan FGT untuk mencari indeks kemiskinan dan regresi probit untuk menganalisis determinan kemiskinan. Selain itu, metode *three-step* FGLS digunakan untuk mengukur kerentanan, sedangkan determinan kerentanan menggunakan regresi tobit.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang meningkatkan kerentanan di Negeria adalah meningkatnya usia kepala rumah tangga, besarnya

jumlah anggota rumah tangga, penambahan jumlah anggota keluarga yang tidak bekerja, penyakit malaria yang dialami anggota rumah tangga, dan gender kepala rumah tangga, dimana kepala rumah tangga laki-laki berpotensi meningkatkan kerentanan. Selanjutnya, variabel yang dapat menurunkan kerentanan terdiri dari pendidikan yang diselesaikan kepala rumah tangga, partisipasi terhadap organisasi, memiliki akses kredit, dan akses terhadap remitan.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Sumber	Metode	Hasil Penelitian
Navignon (2010) <i>"Estimating Household Vulnerability to Poverty from Cross Section Data: An Empirical Evidence from Ghana"</i>	Pengukuran kerentanan dengan FGLS dan determinan kerentanan dengan logit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata kerentanan kemiskinan di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan. 2. Guncangan kesehatan, jumlah anggota rumah tangga, dan keikutsertaan dalam pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kerentanan.
Gaiha dkk (2007) <i>"Vulnerability and Poverty Dynamics in Vietnam"</i>	Pengukuran kerentanan dengan FGLS dan determinan kerentanan dengan probit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk miskin cenderung memiliki kerentanan yang tinggi. Penduduk yang tidak miskin cenderung untuk miskin di tahun mendatang. 2. Etnis, kesenjangan pendidikan, dan tidak memiliki tanah berhubungan positif dengan kerentanan dan kemiskinan.
Jha dkk (2009) <i>"Vulnerability to Poverty in Fiji"</i>	Pengukuran kerentanan dan determinan dengan FGLS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerentanan kemiskinan merupakan fenomena yang lebih besar melanda wilayah perdesaan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan kemampuan dalam menghadapi guncangan, seperti bencana alam. 2. Jumlah anggota rumah tangga yang besar, rasio ketergantungan yang tinggi, gender kepala rumah tangga, dan etnis merupakan variabel yang dapat meningkatkan kerentanan.

2.3 Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1 Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, teori, dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata kerentanan kemiskinan rumah tangga di Indonesia yang mengalami kerentanan tinggi (*highly vulnerable*) adalah Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu provinsi yang mengalami kerentanan rendah adalah Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatra Barat, Banten, Bali, D.I Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.
2. Variabel usia kepala rumah tangga, usia kuadratik kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, status pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tanah, kepemilikan tabungan, dan lokasi tempat tinggal berpengaruh terhadap nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga

2.3.2 Model Analisis

Penelitian ini menggunakan model analisis yang terbagi menjadi dua bagian. Kedua model ini mengacu pada penelitian Chaudhuri (2002) beserta Deressa (2013) dengan modifikasi. Model pertama merupakan penghitungan nilai kerentanan kemiskinan. Metode statistik digunakan untuk menghitung nilai kerentanan tersebut.

Model kedua merupakan determinan yang mempengaruhi nilai kerentanan kemiskinan. Metode regresi logit digunakan untuk mengestimasi model determinan nilai kerentanan. Model ini terdiri dari nilai kerentanan kemiskinan sebagai variabel dependen, sementara variabel independen berupa pendidikan kepala rumah tangga,

usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, kepemilikan tanah, kepemilikan tabungan, dan lokasi tempat tinggal. Persamaan dari model nilai kerentanan kemiskinan dan determinan kerentanan kemiskinan dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Persamaan penghitungan nilai kerentanan kemiskinan

$$\hat{V} = \Phi \left(\frac{\ln z - X_h \hat{\beta}}{\sqrt{X_h \hat{\theta}}} \right) \dots \dots \dots (2.1)$$

Keterangan :

\hat{V} : nilai kerentanan kemiskinan

z : logaritma natural garis kemiskinan

$X_h \hat{\beta}$: estimasi ekspektasi log konsumsi per kapita

$\sqrt{X_h \hat{\theta}}$: akar dari estimasi ekspektasi varians log konsumsi

Φ : simbol distribusi standar normal (*cumulative distribution/density function*)

2. Persamaan determinan kerentanan kemiskinan

$$\hat{V}_i = \beta_0 + \beta_1 age_i + \beta_2 agesquare_i + \beta_3 hhszize_i + \beta_4 Dsaving_i + \beta_5 Deduc_i + \beta_6 Dlocation_i + \beta_7 Dlandown_i + e_i \dots \dots \dots (2.2)$$

Keterangan :

\hat{V}_i : Nilai kerentanan terhadap kemiskinan

Age : usia kepala rumah tangga

- Agesquare* : kuadratik usia kepala rumah tangga
- Hhsize* : jumlah anggota rumah tangga
- Dsaving* : *dummy* kepemilikan tabungan. 1 jika memiliki tabungan; 0 jika lainnya.
- Deduc* : *dummy* status pendidikan kepala rumah tangga. 1 jika berpendidikan tinggi; 0 jika lainnya
- Dlocation* : *dummy* lokasi tempat tinggal rumah tangga. 1 jika berada di perkotaan; 0 jika lainnya
- Dlandown* : *dummy* kepemilikan tanah oleh rumah tangga. 1 jika memiliki tanah; 0 jika lainnya
- e* : error term

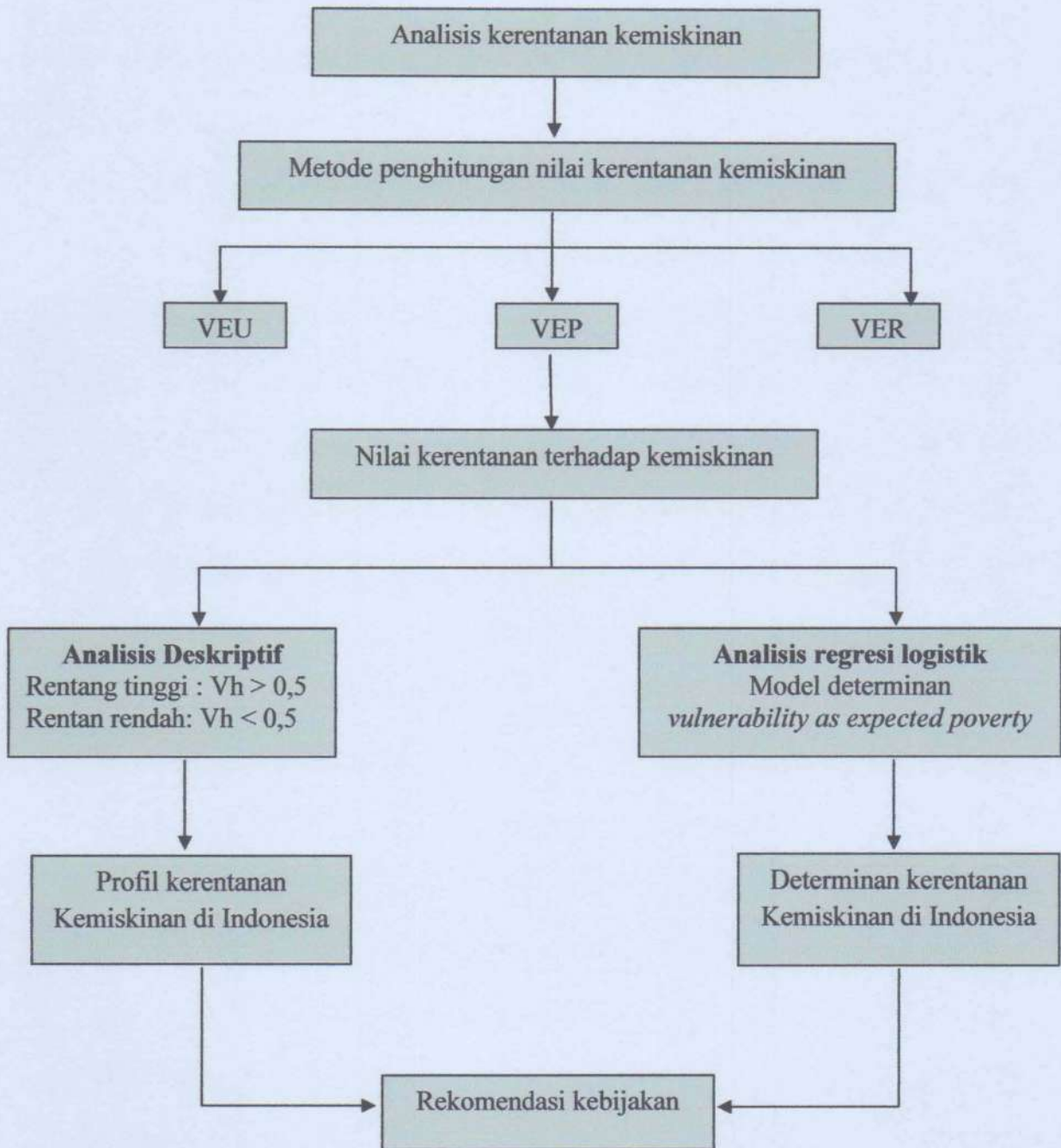
2.4 Kerangka Berpikir

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai kerentanan kemiskinan dan determinannya. Langkah pertama adalah melakukan estimasi nilai kerentanan kemiskinan di level rumah tangga terlebih dahulu. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam pengukuran kerentanan kemiskinan, yaitu *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP), *Vulnerability as Expected Utility* (VEU), dan *Vulnerability as Exposure Risk* (VER). Studi ini menggunakan metode *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP) dengan hasil estimasi berupa nilai probabilitas. Nilai kerentanan kemiskinan yang diperoleh melalui penghitungan statistik dan ekonometrik tersebut akan digunakan untuk menganalisis profil

kerentanan kemiskinan dan mengestimasi determinan yang memengaruhi kerentanan kemiskinan rumah tangga.

Analisa kondisi kerentanan dilakukan dengan mengelompokkan rumah tangga menjadi dua bagian, yaitu rentan tinggi dan rentan rendah. Adapun ambang batas yang digunakan dalam studi ini mengikuti penelitian yang telah dilakukan oleh Chaudhuri dkk (2002), yaitu sebesar 0,5. Rumah tangga dikatakan rentan tinggi apabila nilai kerentanannya lebih dari sama dengan 0,5. Sementara itu, bagi rumah tangga yang memiliki nilai kerentanan di bawah 0,5 termasuk kelompok rentan rendah. Tujuan dari pengelompokkan rumah tangga ke dalam rentan tinggi dan rentan rendah adalah untuk mengetahui profil rumah tangga pada masing-masing provinsi.

Penelitian dilanjutkan dengan menganalisa determinan kerentanan kemiskinan. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan kemiskinan rumah tangga tersebut dilakukan dengan menggunakan metode regresi logit. Nilai kerentanan kemiskinan yang sudah diketahui akan digunakan sebagai variabel dependen, yaitu status kerentanan kemiskinan. Variabel dependen akan bernilai 1 jika tergolong rentan tinggi dan bernilai 0 jika tergolong rentan rendah. Untuk variabel independen menggunakan usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tabungan, kepemilikan tanah, dan lokasi tempat tinggal rumah tangga. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi kelompok rumah tangga yang rentan tinggi. Uraian analisis kerentanan kemiskinan tersebut dapat digambarkan melalui bagan kerangka berpikir berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB 3
METODE PENELITIAN

BAB 3

METODE PENELITIAN

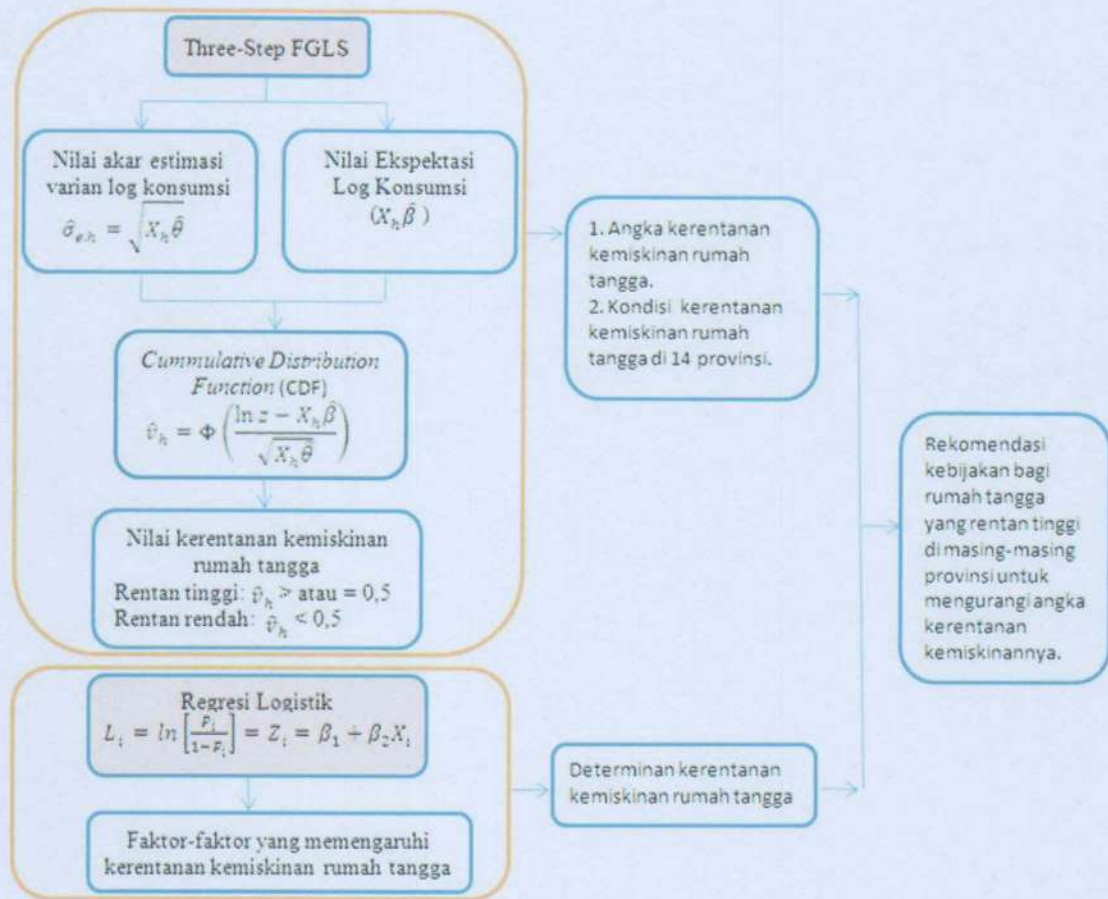
3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif terbagi menjadi dua bagian, yakni:

1. *Cumulative Distribution Function* (CDF) sebagai penghitungan statistik untuk menghitung nilai kerentanan kemiskinan. Sebelum melakukan penghitungan statistik pada model 2.1, perlu dilakukan regresi dengan metode ekonometrik *Three-Step Feasible Generalized Least Square* (FGLS). Metode ekonometri dilakukan untuk memperoleh nilai ekspektasi log konsumsi ($X_h\hat{\beta}$) dan akar estimasi varian log konsumsi ($\sqrt{X_h\hat{\theta}}$). Hasil penghitungan dengan kedua metode tersebut akan menghasilkan angka kerentanan kemiskinan dan kondisi kerentanan kemiskinan rumah tangga pada 14 provinsi di Indonesia.

2. Regresi logistik digunakan sebagai pendekatan ekonometri untuk mencari determinan status kerentanan kemiskinan rumah tangga. Penggunaan regresi logistik disebabkan variabel dependen dalam model bersifat diskrit, dimana variabel dependen bernilai 1 jika rentan tinggi dan bernilai 0 jika rentan rendah. Selain itu, error dari model regresi yang digunakan tidak berdistribusi normal. Pada akhirnya, analisis kerentanan kemiskinan bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan bagi upaya mengurangi kerentanan kemiskinan rumah tangga yang tergolong rentan

tinggi. Secara ringkas, alur pendekatan penelitian dalam studi ini tertuang dalam Gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1

Alur Pendekatan Penelitian Profil dan Determinan Kerentanan Kemiskinan

3.2 Identifikasi Variabel

Variabel dependen yang digunakan untuk menghitung nilai kerentanan kemiskinan terdiri dari logaritma natural pengeluaran per kapita dan error kuadrat. Sementara itu, variabel dependen yang digunakan untuk mengestimasi determinan kerentanan kemiskinan adalah *dummy* status kerentanan kemiskinan per rumah

tangga. Variabel independen yang digunakan terdiri dari usia kepala rumah tangga, kuadrat usia kepala rumah tangga, jumlah anggota kepala rumah tangga, *dummy* status pendidikan kepala rumah tangga, *dummy* lokasi, *dummy* kepemilikan tabungan, dan *dummy* kepemilikan tanah. Variabel dependen dan independen secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Variabel Dependen dalam Model Penghitungan Nilai Kerentanan Kemiskinan

Variabel	Keterangan	Simbol
Dependen	Logaritma natural pengeluaran per kapita	$\ln pce$
	Error kuadrat	(e^2)

Adapun variabel – variabel independen yang digunakan untuk penghitungan nilai kerentanan kemiskinan sama dengan variabel independen yang digunakan untuk mengestimasi determinan kerentanan kemiskinan. Keseluruhan variabel dependen dan independen tersebut terdapat dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Variabel dalam Model Determinan Kerentanan Kemiskinan

Variabel	Keterangan	Simbol
dependen	status kerentanan kemiskinan per rumah tangga	\hat{v}
Independen	usia kepala rumah tangga	Age
	Kuadrat usia kepala rumah tangga	Agesquare
	jumlah anggota rumah tangga	Hhsize
	<i>dummy</i> status pendidikan kepala rumah tangga	Dedu
	<i>dummy</i> lokasi	Dlocation
	<i>dummy</i> kepemilikan tabung	Dsaving
	<i>dummy</i> kepemilikan tanah	Dlandown

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mendefinisikan atau memberi penjelasan mengenai variabel – variabel yang akan diidentifikasi sehingga terkandung pemaparan yang lebih jelas serta terdapat skala pengukuran dan dapat dioperasionalkan. Variabel – variabel yang digunakan dalam model analisis statistik dan regresi logit adalah sebagai berikut :

1. Status kerentanan kemiskinan per rumah tangga (\hat{v})

Variabel status kerentanan kemiskinan dalam penelitian ini menggambarkan status rentan tinggi atau rentan rendah pada rumah tangga. Penentuan di antara keduanya adalah dengan mengelompokkan berdasarkan penghitungan nilai kerentanan kemiskinan pada model (2.1). Dalam penelitian ini, variabel status kerentanan kemiskinan adalah berupa variabel *dummy*, dimana $D=1$ jika berstatus rentan tinggi dan $D=0$ jika berstatus rentan rendah. Rumah tangga dikatakan rentan tinggi apabila memiliki nilai kerentanan di atas 0,5, sedangkan dikatakan rentan rendah apabila nilai kerentanannya di bawah 0,5.

2. Logaritma natural pengeluaran per kapita ($\ln pce$)

Variabel ini mengacu pada penelitian Deressa (2013) yang merupakan total pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan dan non makanan per kapita per bulan. Variabel ini berbentuk logaritma natural (\ln), dimana total pengeluaran tersebut di log kan. Penggunaan logaritma natural bertujuan untuk membentuk model dengan elastisitas konstan (Wooldridge, 2012: 688).

Sebab, model dengan elastisitas konstan mudah untuk diinterpretasikan, yakni dinyatakan dengan persen. Satuan untuk pengeluaran per kapita adalah rupiah (Rp).

3. Error kuadrat (e^2)

Variabel ini adalah residual dari regresi pada model (3.1). Residual merupakan selisih antara nilai duga (*predicted value*) dengan nilai pengamatan yang sebenarnya pada data sampel. Hasil residual yang telah diperoleh tersebut kemudian dikuadratkan. Kuadratik error dilakukan karena adanya heteroskedastisitas pada data sampel yang mengakibatkan penaksiran koefisien regresi menjadi tidak efisien (Gujarati, 2003:387-394).

4. Usia kepala rumah tangga (*age*)

Variabel ini menunjukkan usia kepala rumah tangga dalam satuan tahun. Penghitungan usia ini dilakukan berdasarkan usia pada waktu ulang tahun terakhir. Pemilihan usia ditentukan dari usia kepala rumah tangga diatas 15 tahun.

5. Kuadrat Usia Kepala Rumah Tangga (*agesquare*)

Variabel ini merupakan kuadrat dari usia kepala rumah tangga. Kuadratik usia kepala rumah tangga tersebut disebabkan adanya hubungan nonlinear antara usia dan kerentanan kemiskinan. Satuan yang digunakan untuk variabel ini adalah tahun. Variabel kuadrat usia kepala rumah tangga diperoleh dari usia kepala rumah tangga yang dikuadratkan.

6. Jumlah anggota rumah tangga (*hsize*)

Variabel ini memuat informasi mengenai jumlah individu yang masih hidup dan bertempat tinggal di rumah tangga tersebut. Misalkan dalam satu rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak, maka jumlah anggota rumah tangga adalah lima. Satuan variabel ini adalah satuan orang.

7. Dummy status pendidikan kepala rumah tangga (*Dedu*)

Variabel *dummy* pendidikan menggambarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan kepala rumah tangga. Variabel *dummy* bernilai 1 jika kepala rumah tangga berpendidikan tinggi, yaitu memiliki ijazah SMA ke atas. Sebaliknya, variabel *dummy* bernilai 0 jika individu berpendidikan rendah, yaitu memiliki ijazah SMP ke bawah.

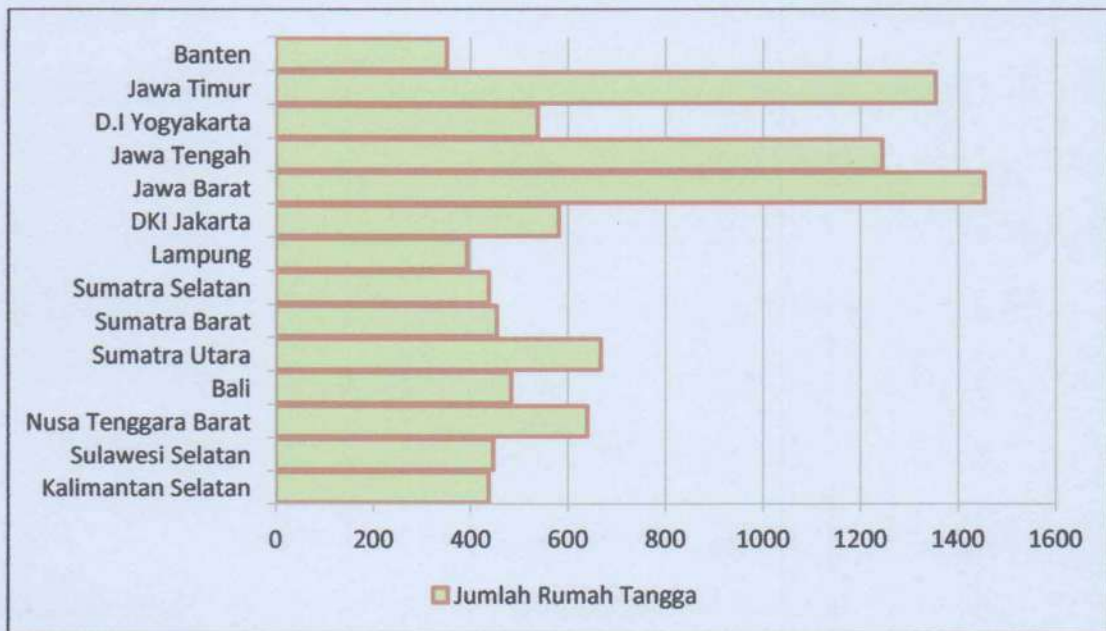
8. Dummy lokasi rumah tangga (*Dlocation*)

Variabel *dummy* ini menunjukkan lokasi tempat tinggal rumah tangga. Lokasi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu perdesaan atau perkotaan. Variabel *dummy* ini bernilai 1 jika rumah tangga tinggal di perkotaan dan 0 jika tinggal di perdesaan.

9. Dummy kepemilikan tabungan (*Dsaving*)

Variabel *dummy* ini menunjukkan kepemilikan aset keuangan rumah tangga berupa tabungan. Variabel *dummy* ini bernilai 1 jika rumah tangga memiliki tabungan dan 0 jika tidak memiliki tabungan.

provinsi pada tahun 2014 yang akan diamati. Provinsi-provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan (438 rumah tangga), Sulawesi Selatan (447 rumah tangga), Nusa Tenggara Barat (640 rumah tangga), Bali (484 rumah tangga), Sumatra Utara (668 rumah tangga), Sumatra Barat (454 rumah tangga), Sumatra Selatan (438 rumah tangga), Lampung (393 rumah tangga), DKI Jakarta (582 rumah tangga), Jawa Barat (1.455 rumah tangga), Jawa Tengah (1.245 rumah tangga), D.I Yogyakarta (538 rumah tangga), Jawa Timur (1.354 rumah tangga), dan Banten (352 rumah tangga). Jumlah rumah tangga per provinsi tersebut secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini:



Sumber: IFLS 5 (2014)

Gambar 3.2
Persebaran Sampel Rumah Tangga per Provinsi

Pemilihan 14 provinsi tersebut dilihat berdasarkan kelengkapan variabel dependen dan independen per rumah tangga yang dimiliki masing-masing provinsi. Selain IFLS, penelitian ini juga menggunakan Garis Kemiskinan (GK) per provinsi di Indonesia tahun 2014 yang dipublikasikan oleh BPS dan dibagi menurut desa/kota.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber yang telah disebutkan di atas untuk selanjutnya dilakukan pengotanan data. Langkah berikutnya adalah proses filterisasi atau *cleaning data*. Pada proses ini, rumah tangga yang digunakan memiliki data pengeluaran per kapita, usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, status pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tabungan, kepemilikan tanah, dan lokasi rumah tangga.

3.6 Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan dua teknik estimasi model. Pertama, penghitungan statistik dengan menggunakan *cumulative distribution function* (CDF) untuk menghitung nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga. Kedua, pendekatan regresi logistik untuk mengestimasi determinan nilai kerentanan kemiskinan. Oleh karena data yang digunakan adalah data survey rumah tangga yang jumlahnya ribuan, maka penghitungan regresi dilakukan dengan menggunakan bantuan software STATA 13.

3.6.1 Teknik Analisis Penghitungan Nilai Kerentanan Kemiskinan

Penghitungan nilai kerentanan kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan metode VEP. Metode ini terdiri dari tiga tahap, dimana dua tahap pertama menggunakan metode ekonometri dan satu tahap terakhir menggunakan metode

statistik. Metode ekonometri yang digunakan adalah regresi *Three-Step FGLS* (*Feasible Generalized Least Square*), sedangkan metode statistik berupa *Cummulative distribution function*.

Persamaan untuk menghitung nilai kerentanan kemiskinan terdapat pada model (2.1). Akan tetapi untuk melakukan penghitungan statistik pada persamaan tersebut, nilai ekspektasi log konsumsi ($X_h \hat{\beta}$) dan akar estimasi varian log konsumsi ($\sqrt{X_h \hat{\theta}}$) harus diketahui terlebih dahulu. Berikut akan dijelaskan tahapan-tahapan untuk mendapatkan komponen-komponen dalam penghitungan nilai kerentanan kemiskinan:

1. Mendapatkan Nilai Akar Estimasi Varian Log Konsumsi ($\sqrt{X_h \hat{\theta}}$)

Model regresi linear yang digunakan untuk mendapatkan nilai ekspektasi log konsumsi terdapat pada model (3.1) berikut ini :

$$\ln pce_i = \beta_0 + \beta_1 age_i + \beta_2 agesquare_i + \beta_3 hhsiz_e + \beta_4 Dsaving_i + \beta_5 Deduc_i + \beta_6 Dlocation_i + \beta_7 Dlandown_i + e_i \dots\dots\dots(3.1)$$

$\ln pce$ merupakan variabel dependen yang berupa logaritma natural pengeluaran konsumsi per kapita per rumah tangga. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengeluaran konsumsi per kapita adalah bagian dari indikator kesejahteraan rumah tangga. Variabel independen yang digunakan pada model (3.1) sama dengan variabel yang digunakan untuk mengestimasi determinan kerentanan kemiskinan pada model (2.2). Melalui regresi OLS ini, akan diperoleh nilai

ekspektasi log konsumsi dan *residual*. Selanjutnya, *residual* tersebut dikuadratkan.

Persamaan untuk model tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$(e^2) = \beta_0 + \beta_1 \text{age}_i + \beta_2 \text{agesquare}_i + \beta_3 \text{hhsiz}_i + \beta_4 \text{Dsaving}_i + \beta_5 \text{Deduc}_i + \beta_6 \text{Dlocation}_i + \beta_7 \text{Dlandown}_i + e_i \dots\dots\dots(3.2)$$

e^2 adalah variabel dependen pada model (3.2) yang merupakan nilai kuadrat residual yang telah dihasilkan dari model (3.1). Sementara itu, variabel independen yang digunakan sama dengan variabel independen yang terdapat pada model (3.1) di atas. Hasil estimasi pada model (3.2) digunakan untuk mentransformasikan persamaan tersebut menjadi bentuk berikut ini:

$$\frac{e^2}{X_h \hat{\theta}_{OLS}} = \left(\frac{X_h}{X_h \hat{\theta}_{OLS}} \right) \theta + \frac{\eta_h}{X_h \hat{\theta}_{OLS}} \dots\dots\dots(3.3)$$

Dari langkah kedua ini, akan diperoleh nilai estimasi varian, $X_h \hat{\theta}_{FGLS}$. Nilai varian tersebut kemudian diakarkan untuk mendapatkan nilai ekspektasi varian log konsumsi (*expected varian log consumption*), $\sqrt{X_h \hat{\theta}}$, dimana:

$$\hat{\sigma}_{e,h} = \sqrt{X_h \hat{\theta}}$$

2. Mendapatkan Nilai Ekspektasi Log Konsumsi ($X_h \hat{\beta}$)

Selanjutnya, model regresi OLS kembali digunakan untuk mendapatkan nilai ekspektasi log konsumsi. Tahapan kedua ini menggunakan *Weighted Least Square* (WLS) atau pembobotan. Pembobotan (*Weighted*) bertujuan untuk mentransformasikan persamaan pada model (3.1) agar menghasilkan estimasi yang

efisien. Pembobot yang digunakan berupa $\frac{1}{\sqrt{X_h \hat{\theta}}}$, dimana $\sqrt{X_h \hat{\theta}}$ atau $\hat{\sigma}_{e,h}$ diperoleh

dari regresi OLS tahap pertama. Persamaan bentuk transformasi tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\ln c_h}{\hat{\sigma}_{e,h}} = \left(\frac{X_h}{\hat{\sigma}_{e,h}} \right) \beta + \frac{e_h}{\hat{\sigma}_{e,h}} \dots \dots \dots (3.4)$$

Variabel dependen dan independen yang digunakan untuk regresi tahap kedua ini sama seperti variabel yang ada pada model (3.1). Melalui regresi OLS ini akan diperoleh nilai ekspektasi log konsumsi (*expected log consumption*), $X_h \hat{\beta}$.

3. Penghitungan Nilai Kerentanan Kemiskinan

Nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga pada persamaan (2.1) dihitung dengan metode statistik, yaitu *cumulative distribution function*. *Cummulative distribution function* merupakan sebuah fungsi yang memberikan probabilitas dari suatu variabel acak (*random*) yang kurang dari atau sama dengan setiap bilangan real tertentu (Wooldridge, 2009:793). Teknik statistik ini digunakan untuk menghitung nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga pada model 3. Fungsi distribusi kumulatif (cdf) dari distribusi normal ini dinyatakan sebagai :

$$f_N(x, \mu_x, \sigma_x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_N(x, \mu_x, \sigma_x) dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2}} dt$$

Penghitungan probabilitas $P(a \leq x \leq b)$ dengan parameter μ_x dan σ_x dari suatu variabel acak kontinu x yang terdistribusi normal perlu melakukan proses pengintegralan dari $x = a$ sampai $x = b$ pada persamaan di atas. Namun, tidak ada

satupun teknik pengintegralan yang bisa digunakan untuk menentukan integral tersebut. Untuk menyederhanakan penghitungan, para ahli statistik dan matematika memperkenalkan distribusi normal standar (*Standard Normal Distribution*). Distribusi ini merupakan fungsi kepadatan probabilitas normal khusus dengan $\mu_x = 0$ dan $\sigma_x = 1$. Variabel acak dari distribusi standar normal dinotasikan dengan Z . Fungsi distribusi kumulatif (cdf) dari distribusi normal standar ini dinyatakan sebagai:

$$f_N(z; 0, 1) = P(Z \leq z) = \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Distribusi normal dari variabel acak kontinu X dengan nilai mean (μ_x) dan standar deviasi (σ_x) berapapun dapat diubah menjadi distribusi normal kumulatif standar. Namun, dengan syarat variabel acak kontinu X diubah ke dalam bentuk variabel acak standar Z_x . Nilai Z_x tersebut merupakan skor Z dari variabel acak X . Dengan demikian, penghitungan probabilitas distribusi normal kumulatif standar dapat dilakukan dengan formula berikut :

$$Z_x = \frac{x - \mu_x}{\sigma_x}$$

Distribusi normal kumulatif standar yang digunakan untuk menghitung nilai kerentanan kemiskinan tersebut diaplikasikan melalui persamaan berikut :

$$\hat{v}_h = \hat{Pr}(\ln c_h < \ln z | X_h) = \Phi \left(\frac{\ln z - X_h \hat{\beta}}{\sqrt{X_h \hat{\theta}}} \right) \dots \dots \dots (3.4)$$

$\ln z$ adalah logaritma natural garis kemiskinan. $X_h\hat{\beta}$ merupakan ekspektasi log konsumsi yang diperoleh melalui model (3.4). $\sqrt{X_h\hat{\theta}}$ merupakan akar kuadrat dari ekspektasi varians log konsumsi pada model (3.3).

Nilai kerentanan kemiskinan yang telah dihitung digunakan untuk membagi rumah tangga ke dalam dua kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari rumah tangga rentan tinggi dan rumah tangga rentan rendah. Sementara itu, ambang batas yang digunakan sebagai acuan dalam studi ini mengikuti ambang batas dari penelitian Chaudhuri dkk (2002), yaitu 0,5. Berikut penjelasan mengenai pengelompokan kerentanan kemiskinan rumah tangga berdasarkan ambang batasnya :

1. Rumah tangga dengan nilai $\hat{v}_h \geq 0,5$ digolongkan ke dalam rumah tangga rentan tinggi (*the highly vulnerable*)
2. Rumah tangga dengan nilai $\hat{v}_h < 0,5$ digolongkan ke dalam rumah tangga rentan rendah (*low vulnerable*)

3.6.2 Teknik Analisis Determinan Kerentanan Kemiskinan

Metode regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Penggunaan regresi logistik disebabkan kondisi variabel dependen yang bersifat kualitatif atau binari. Oleh karena itu, model ekonometri yang dianggap sesuai adalah model logit. Secara umum, model logit bertujuan untuk menemukan probabilitas dari sebuah kejadian (Gujarati dan Poter, 2012 : 172). Dalam studi ini, model logit digunakan untuk mencari kemungkinan (*probability*) individu untuk berstatus rentan tinggi (*highly vulnerable*) atau rentan rendah (*low vulnerable*)

Secara matematis, kemungkinan seseorang untuk rentan miskin atau tidak dinyatakan dengan :

$$\hat{V}_i = \frac{1}{1+e^{-(\beta_1+\beta_2 X_i)}} \dots\dots\dots (3.5)$$

Persamaan (3.1) dapat disederhanakan sebagai berikut :

$$\hat{V}_i = \frac{1}{1+e^{-Z_i}} = \frac{e^Z}{1+e^Z} \dots\dots\dots (3.6)$$

Dimana $Z_i = \beta_1 + \beta_2 X_i$

Jika \hat{V}_i adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa (individu rentan miskin), maka kemungkinan tidak terjadinya suatu peristiwa ($1 - \hat{V}_i$) atau individu tidak rentan miskin adalah :

$$1 - \hat{V}_i = \frac{1}{1+e^{Z_i}} \dots\dots\dots (3.7)$$

Sehingga dapat ditulis

$$\frac{P_i}{1-P_i} = \frac{1+e^{Z_i}}{1+e^{-Z_i}} = e^{Z_i} \dots\dots\dots (3.8)$$

$\frac{P_i}{1-P_i} = e^{Z_i}$ merupakan rasio peluang (*odd ratio*) suatu peristiwa, yaitu rasio kemungkinan terjadi suatu peristiwa terhadap kemungkinan tidak terjadinya suatu peristiwa. Dalam studi ini berarti rasio kemungkinan individu berstatus rentan miskin terhadap kemungkinan individu berstatus tidak rentan miskin.

Jika persamaan (3.1.6) ditransformasikan ke dalam logaritma natural maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

$$L_i = \ln \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right] = Z_i = \beta_1 + \beta_2 X_i \dots\dots\dots (3.9)$$

L_i merupakan rasio peluang yang tidak hanya linier pada X_i dan parameter. L_i disebut logit, sehingga model logit terdapat pada persamaan (3.9)

Gujarati dan Porter (2012:198-202) menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mengestimasi model logit, yaitu sebagai berikut :

1. Uji signifikansi koefisien secara statistik menggunakan *Z-statistic* (distribusi normal)

Model estimasi yang digunakan dalam mengestimasi model logit adalah metode *maximum likelihood*. Secara umum, metode ini digunakan untuk sampel besar, sehingga menghasilkan estimasi *standart error* yang bersifat *asymptotic*. Dengan demikian, uji signifikansi koefisien secara statistik menggunakan *z-statistic* yang terdapat pada tabel distribusi normal.

Pemahaman mengenai distribusi normal dijelaskan oleh Gujarati (2012: L22-L23), dimana suatu variabel dikatakan terdistribusi normal jika memiliki rata-rata sama dengan nol dan varians sama dengan satu. Variabel yang terdistribusi normal dapat dilambangkan sebagai berikut:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Dimana \sim memiliki arti 'terdistribusi', N menunjukkan distribusi normal, μ merupakan rata-rata, dan σ^2 merupakan varians. Dengan demikian, variabel terdistribusi normal dilambangkan menjadi :

$$X \sim N(0,1)$$

Sementara itu, nilai Z dihitung melalui formula:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} \dots\dots\dots(3.10)$$

Z -statistic digunakan untuk menguji koefisien dari variabel independen secara parsial. Uji z bertujuan melihat tingkat signifikansi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan hipotesa sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_i = 0, \text{ dimana } i = 0, 1, 2, \dots$$

Artinya, tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan :

$$H_1 : \beta_i \neq 0, \text{ dimana } i = 0, 1, 2, \dots$$

Artinya, ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam Gujarati dan Poter (2009:131) dijelaskan bahwa uji z dilakukan dengan cara membandingkan nilai Z hitung dan Z tabel. H_0 ditolak apabila Z hitung $>$ Z tabel. Hal ini menandakan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan berlaku sebaliknya.

Namun, uji hipotesa dapat dilakukan dengan menguji hipotesis pada p -value. Uji p -value dilakukan dengan membandingkan nilai p -value terhadap α . H_0 ditolak apabila p -value $<$ α , yang memiliki arti bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap probabilitas kejadian status kerentanan kemiskinan individu.

2. Uji signifikansi koefisien secara simultan menggunakan *Likelihood Ratio (LR) statistic*

Likelihood Ratio (LR) statistic adalah uji hipotesis nol yang digunakan untuk pengujian signifikansi koefisien secara simultan, dimana semua koefisien slope sama dengan nol. *LR statistic* mirip dengan *F-test* pada model regresi linear. *LR statistic* mengikuti distribusi χ^2 dengan *df* sama dengan jumlah variabel independen.

Hipotesis yang digunakan dalam melakukan uji *Likelihood Ratio (LR) statistic* adalah sebagai berikut :

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

Artinya, secara simultan tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_1 : paling tidak ada salah satu parameter yang tidak sama dengan nol.

Artinya, secara simultan terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji *Likelihood Ratio (LR) statistic* dilakukan dengan membandingkan x_{hitung}^2 dengan x_{tabel}^2 . H_0 ditolak apabila $x_{hitung}^2 > x_{tabel}^2$, sedangkan H_0 diterima apabila $x_{hitung}^2 < x_{tabel}^2$. Adapun cara lain yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis ini, yaitu melalui *p-value*. Jika *p-value* $< \alpha$ maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa secara simultan ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, dan begitu pula sebaliknya.

3. Pengukuran *goodness of fit* menggunakan *pseudo R²*

Pengukuran *goodness of fit* bertujuan untuk melihat ketepatan model dalam variabel dependen. Dalam model dengan variabel dependen yang bersifat biner, pengukuran *goodness of fit* tidak dapat dianalisis dengan R^2 (Suwardi, 2011:52). Oleh karena itu, digunakan *pseudo R²* sebagai penggantinya. Program STATA 13 yang digunakan dalam penelitian ini, secara otomatis menyediakan McFadden R^2 untuk mengukur *goodness of fit*. McFadden R^2 sama seperti R^2 , yaitu bernilai antara 0 dan 1. Namun, dalam model regresi biner, *goodness of fit* merupakan kriteria terpenting nomor dua. Signifikansi nilai secara statistic dan kesesuaian arah positif dan negatif pada nilai koefisien variabel independen menjadi prioritas utama (Gujarati, 2012:1999).

Beberapa bentuk interpretasi yang dapat dilakukan dalam estimasi model logit, yaitu :

1. Interpretasi Logit

Interpretasi model logit pada model (3.5) dapat dilakukan dengan melihat pada β_i . β_i adalah koefisien pada variabel independen yang mengukur perubahan logit untuk setiap perubahan satu unit variabel independen. Apabila β_i bernilai positif, berarti ketika variabel independen meningkat, peluang variabel dependen sama dengan satu meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila β_i bernilai negatif, berarti ketika variabel independen meningkat, peluang variabel dependen menurun sama dengan satu. (Gujarati, 2012:189). Hal tersebut berlaku untuk variabel

independen yang kontinu atau diskrit. Untuk variabel yang independennya bersifat kategorik, tanda positif pada β_i memiliki arti bahwa peluang variabel dependen (terjadinya kerentanan kemiskinan) sama dengan satu lebih besar ketika $X=1$ dibandingkan $X=0$. Jika tanda β_i bernilai negatif, berarti peluang variabel dependen sama dengan satu lebih kecil ketika $X=1$ dibandingkan $X=0$.

Namun, menurut Gujarati dan Porter (2012:195), interpretasi logit dengan melihat estimasi nilai koefisiennya dinilai kurang menarik karena hanya melihat tanda dari koefisien. Hal tersebut yang menyebabkan diperlukan adanya interpretasi lain untuk melihat probabilitas terjadinya suatu kejadian.

2. Interpretasi *odds ratio*

Nilai rasio peluang (*odds ratio*) berupa $\frac{P_i}{1-P_i} = e^{Z_i}$ diperoleh dengan melakukan antilog pada hasil estimasi logit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel bebas akan memperbesar kemungkinan terjadinya perubahan status kerentanan kemiskinan sebesar e^{Z_i} . Pada variabel yang berbentuk kontinu atau diskrit, apabila nilai *odds ratio* lebih besar atau sama dengan satu, maka probabilitas terjadinya individu berstatus rentan miskin semakin besar. Namun, pada variabel independen yang bersifat kategorikal, kecenderungan terjadinya individu berstatus rentan miskin ($Y=1$) untuk setiap peningkatan X , peluang dari individu berstatus rentan miskin meningkat sebesar e^{Z_i} .

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi dan distribusi kemiskinan di Indonesia

Selama periode September 2010 hingga September 2014 jumlah penduduk berstatus miskin di Indonesia mengalami penurunan (Gambar 4.1). Pada September 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen dari total seluruh penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan *trend* yang menurun hingga September 2014. Pada September 2014 jumlah penduduk miskin menjadi 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen. Kondisi tersebut menandakan bahwa 2,08 persen penduduk miskin di Indonesia berubah statusnya menjadi tidak miskin.



Sumber: BPS, 2015

Gambar 4.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Periode September 2010-2014

Secara rinci, kondisi kemiskinan di Indonesia dapat dilihat melalui indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Seperti yang terlihat pada gambar 4.2 bahwa selama periode tahun 2010-2014 indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin membaik.



Sumber: BPS, 2016.

Gambar 4.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Di Indonesia Tahun 2010-2014

Pada Gambar 4.2 garis yang berwarna merah merupakan indeks P1 yang memperlihatkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan selama periode tahun 2010 hingga tahun 2014 menunjukkan adanya penurunan. Hal ini menandakan bahwa kondisi penduduk miskin di Indonesia mengalami perbaikan. Perbaikan kondisi tersebut disebabkan

adanya peningkatan pada pengeluaran penduduk di Indonesia dan mendekati garis kemiskinan yang ada di masing-masing wilayah.

Garis berwarna hijau pada Gambar 4.2 menunjukkan indeks P2 selama rentan waktu tahun 2010 hingga tahun 2014. Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan kondisi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Indonesia. Pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa nilai indeks P2 memiliki *trend* yang menurun selama lima tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil.

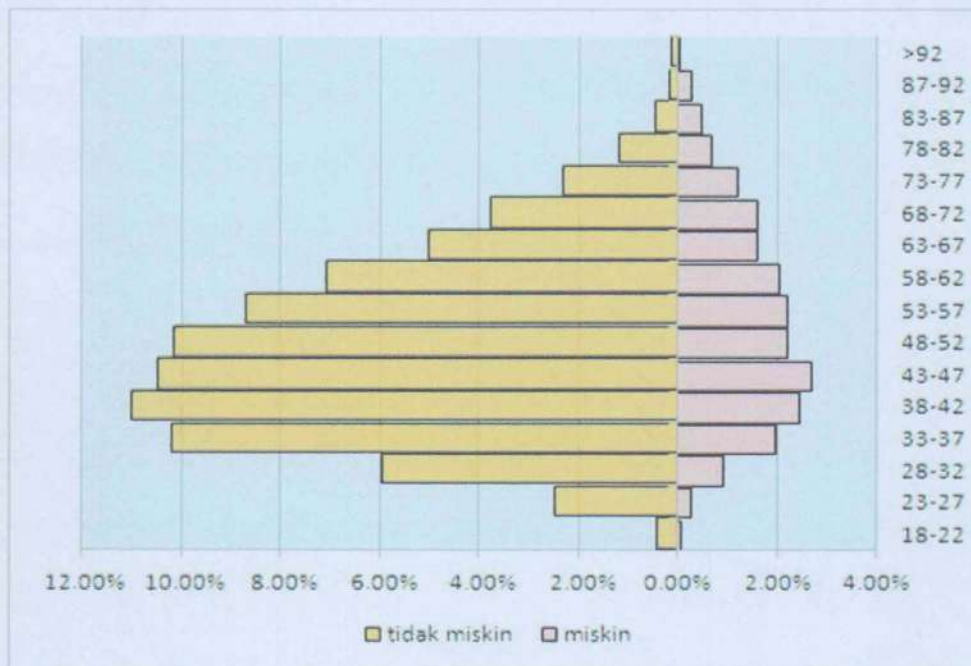
4.1.2 Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin di Indonesia

Kemiskinan dan kerentanan kemiskinan yang ada di Indonesia tidak terlepas dari karakteristik rumah tangga miskin dan rentan miskin pada masing-masing wilayah. Dalam studi ini, karakteristik rumah tangga miskin dan rentan miskin terdiri dari berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut adalah karakteristik demografi, karakteristik ekonomi, dan karakteristik sosial.

4.1.2.1 Karakteristik Demografi

Karakteristik demografi yang menjadi fokus dalam studi ini meliputi usia kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga. Berdasarkan usia kepala rumah tangganya, rumah tangga miskin pada tahun 2014 didominasi oleh kepala rumah tangga dengan rentang usia 43 hingga 47 tahun. Artinya, rumah tangga miskin memiliki kepala rumah tangga yang berada pada usia produktif. Pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tergolong miskin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Namun, setelah melewati rentang usia 43 hingga 47

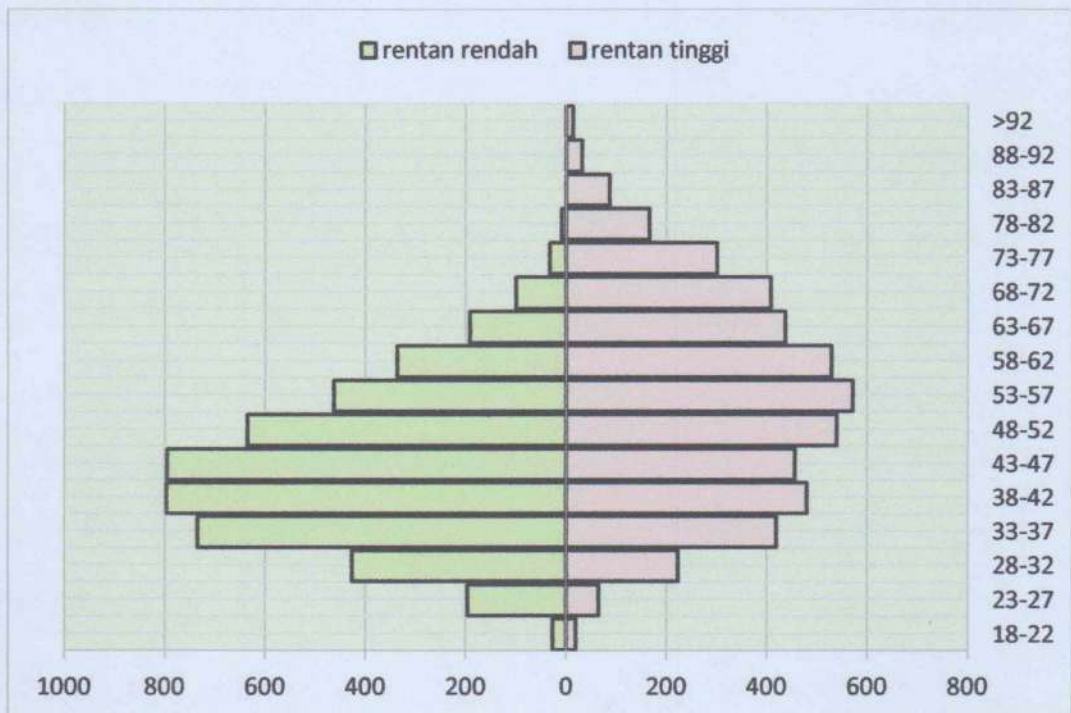
tahun, jumlah penduduk miskin tersebut berkurang. Secara rinci, kondisi usia kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin dapat dilihat melalui gambar 4.3 berikut ini :



Sumber: IFLS(2014)

Gambar 4.3
Distribusi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan
Usia Kepala Rumah Tangga Tahun 2014

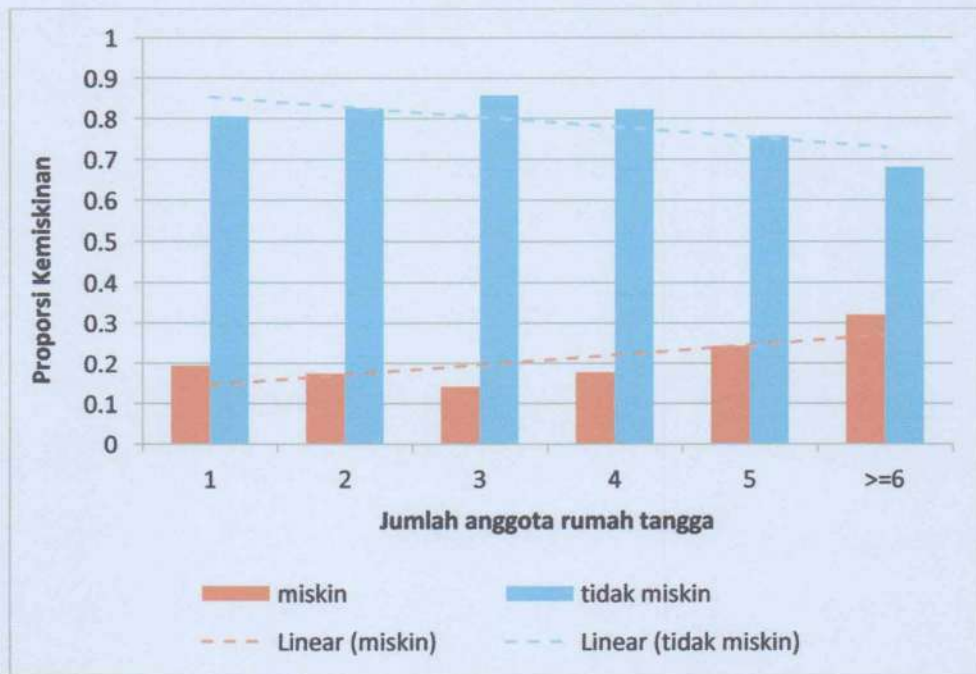
Selanjutnya, karakteristik rumah tangga rentan miskin terbagi menjadi dua, yaitu rentan tinggi dan rentan rendah. Berdasarkan data sampel tahun 2014, kepala rumah tangga yang berstatus rentan tinggi didominasi oleh usia 53-57 tahun, sedangkan yang berstatus rentan rendah didominasi oleh kepala rumah tangga yang berusia 38-42 tahun. Artinya, kepala rumah tangga yang berstatus rentan tinggi berada pada kelompok usia produktif. Secara detail, kondisi usia kepala rumah tangga terhadap kerentanan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini:



Sumber: IFLS(2014)

Gambar 4.4
Kondisi Usia Kepala Rumah Tangga
Berstatus Rentan Tinggi dan Rentan Rendah

Analisis selanjutnya mengenai jumlah anggota rumah tangga. Salah satu karakteristik rumah tangga miskin dan rentan miskin adalah memiliki jumlah anggota rumah tangga yang besar. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan yang terbatas harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga yang banyak. Hubungan antara jumlah anggota rumah tangga dengan proporsi kemiskinan terlihat melalui Gambar 4.5 berikut ini:

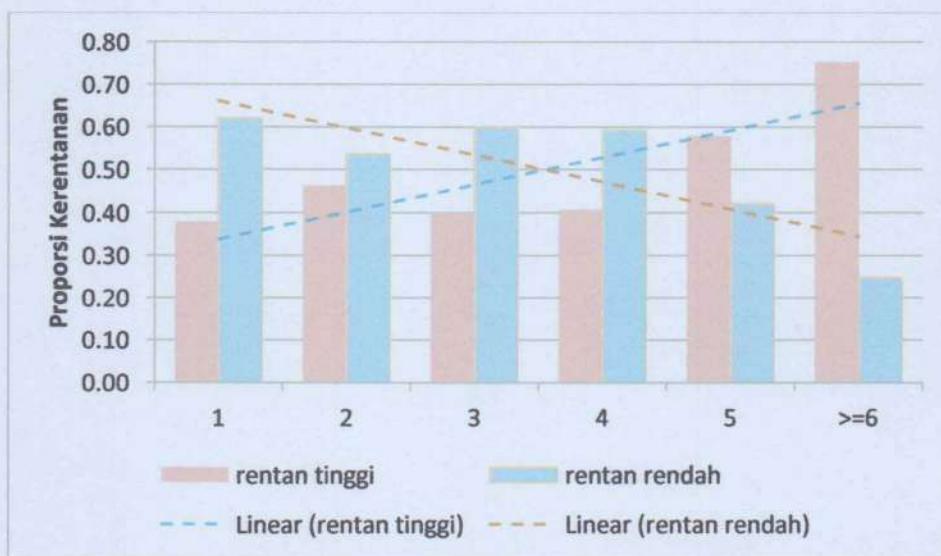


Sumber: IFLS (2014)

Gambar 4.5
Karakteristik Rumah Tangga Miskin Berdasarkan
Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2014

Berdasarkan gambar 4.5 di atas, terlihat dengan jelas bahwa pada rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga yang sedikit maka proporsi rumah tangga yang tergolong miskin juga rendah. Namun, ketika sebuah rumah tangga memiliki anggota rumah tangga yang lebih besar, proporsi rumah tangga miskin pun meningkat. Secara garis besar, *trend* pada karakteristik jumlah anggota rumah tangga ini menunjukkan bahwa ketika kelompok rumah tangga memiliki anggota keluarga yang lebih besar maka proporsi rumah tangga miskin juga menjadi lebih besar.

Permasalahan lain yang disebabkan oleh jumlah anggota dalam rumah tangga adalah kerentanan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada *trendline* antara jumlah anggota rumah tangga dan proporsi kerentanan kemiskinan. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang besar, lebih banyak mengalami kerentanan tinggi dibandingkan rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang sedikit. Secara rinci, kondisi jumlah anggota rumah tangga dengan status kerentanan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut ini:



Sumber: IFLS (2014)

Gambar 4.6
Karakteristik Rumah Tangga Rentan Tinggi
Berdasarkan Jumlah Anggota Rumah Tangga

4.1.2.2 Karakteristik Ekonomi

Pembahasan karakteristik rumah tangga miskin dan rentan miskin dilihat dari aspek ekonomi berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh rumah tangga. Variabel – variabel tersebut berupa kepemilikan tabungan dan kepemilikan tanah. Pada dasarnya,

kepemilikan aset oleh rumah tangga dapat menjadi penyangga (*buffer*) untuk menghadapi guncangan ekonomi, sehingga tidak jatuh miskin. Berdasarkan kepemilikan tabungan di tahun 2014, masih terdapat banyak rumah tangga yang tidak memiliki tabungan, yaitu sebesar 6.678 rumah tangga atau 70,41 persen dari total sampel. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki tabungan, yaitu sebesar 2.807 rumah tangga atau 29,59 persen. Sementara itu, rumah tangga yang tergolong miskin juga lebih banyak ditemukan pada rumah tangga yang tidak memiliki tabungan yakni sebesar 17,15 persen dibandingkan yang memiliki tabungan sebesar 3,46 persen. Distribusi rumah tangga miskin berdasarkan kepemilikan tabungan secara lengkap tercantum dalam Tabel (4.1) berikut ini:

Tabel 4.1
Distribusi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Kepemilikan Tabungan

Karakteristik ekonomi		Status kemiskinan	desa		kota		total		proporsi agregat
			Freq*	%	freq*	%	freq*	%	
Kepemilikan tabungan	memiliki tabungan	miskin	130	4.63	198	7.05	328	3.46	11.68%
		tidak miskin	717	25.54	1764	62.80	2481	26.16	88.32%
		total	847	30.17	1962	69.85	2809	29.62	
	tidak memiliki tabungan	miskin	916	13.72	712	10.66	1628	17.16	24.37%
		tidak miskin	2258	33.82	2794	41.83	5052	53.26	75.63%
		total	3174	47.54	3506	52.49	6680	70.43	

Keterangan: * mengindikasikan frekuensi dalam satuan rumah tangga

Sumber: IFLS (2014)

Sementara itu, berdasarkan data sampel IFLS tahun 2014 dapat diketahui bahwa rumah tangga yang tergolong rentan tinggi, baik di perdesaan maupun perkotaan, didominasi oleh rumah tangga yang tidak memiliki tabungan. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki tabungan dan tergolong rentan tinggi di perdesaan

adalah sebanyak 2.605 rumah tangga atau sebesar 39 persen, sedangkan diperkotaan sebanyak 1.661 rumah tangga atau sebesar 24,87 persen. Jika dilihat secara agregat, sebanyak 63,86 persen rumah tangga yang berstatus rentan tinggi ternyata tidak memiliki tabungan. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan rumah tangga yang memiliki tabungan dan berstatus rentan tinggi yang hanya sebesar 17,05 persen.

Tabel 4.2
Distribusi Rumah Tangga Rentan Tinggi Berdasarkan Kepemilikan Tabungan

Karakteristik ekonomi		Status kerentanan	desa		kota		total		proporsi agregat
			Freq*	%	freq*	%	freq*	%	
Kepemilikan tabungan	memiliki tabungan	rentan tinggi	230	8.19	249	8.86	479	5.05	17.05%
		rentan rendah	617	21.97	1713	60.98	2330	24.57	82.95%
		total	847	30.15	1962	69.85	2809	29.62	
	tidak memiliki tabungan	rentan tinggi	2605	39.00	1661	24.87	4266	44.98	63.86%
		rentan rendah	569	8.52	1845	27.62	2414	25.45	36.14%
		total	3174	47.51	3506	52.49	6680	70.43	

Keterangan: * mengindikasikan frekuensi dalam satuan rumah tangga

Sumber: IFLS (2014)

Karakteristik ekonomi berikutnya adalah terkait kepemilikan tanah. Pada tahun 2014, hanya terdapat 154 rumah tangga miskin atau sekitar 1,62 persen rumah tangga yang memiliki tanah. Di lain sisi, kondisi yang timpang muncul dari jumlah rumah tangga miskin yang tidak memiliki tanah yakni sebesar 1.801 rumah tangga atau 18,99 persen. Kondisi ini berbeda dengan 924 rumah tangga atau sebesar 9,74 persen yang memiliki tanah dan tergolong tidak miskin.

Tabel 4.3
Distribusi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Kepemilikan Tanah

Karakteristik ekonomi		Status kemiskinan	desa		kota		total		proporsi agregat
			Freq*	%	Freq*	%	Freq*	%	
Kepemilikan tanah	memiliki tanah	miskin	75	6.96	79	7.32	154	1.62	14.29%
		tidak miskin	374	34.69	551	51.07	925	9.75	85.73%
		total	449	41.65	630	58.39	1079	11.38	
	tidak memiliki tanah	miskin	971	11.55	831	9.88	1802	19.00	21.43%
		tidak miskin	2601	30.94	4007	47.65	6608	69.67	78.57%
		total	3572	42.49	4838	57.53	8410	88.67	

Keterangan: * mengindikasikan frekuensi dalam satuan rumah tangga
 Sumber: IFLS (2014)

Secara agregat, dapat dilihat bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki tanah didominasi rumah tangga yang tidak miskin. Rumah tangga tidak miskin tersebut mencapai proporsi 85,71 persen sebagai rumah tangga yang memiliki tanah. Sementara itu, rumah tangga miskin yang tidak memiliki tanah mencapai 21,42 persen.

Kepemilikan tanah oleh rumah tangga juga berkaitan dengan status kerentanan kemiskinannya. Secara keseluruhan, terdapat 8.410 rumah tangga yang tidak memiliki tanah dan sebanyak 4.400 rumah tangga atau sebesar 46,39 persen berstatus rentan tinggi. Sementara itu, rumah tangga yang memiliki tabungan dan berstatus rentan tinggi hanya sebesar 345 rumah atau 3,64 persen. Apabila dilihat secara agregat, proporsi rumah tangga yang tidak memiliki tabungan dan berstatus rentan tinggi lebih besar, yaitu sebesar 52,32 persen dibandingkan rumah tangga yang

memiliki tabungan, yaitu sebesar 14, 29 persen. Distribusi rumah tangga rentan tinggi dan rentan rendah berdasarkan kepemilikan tanah dapat dilihat pada Tabel 4.4:

Tabel 4.4
Distribusi Rumah Tangga Rentan Tinggi Berdasarkan Kepemilikan Tanah

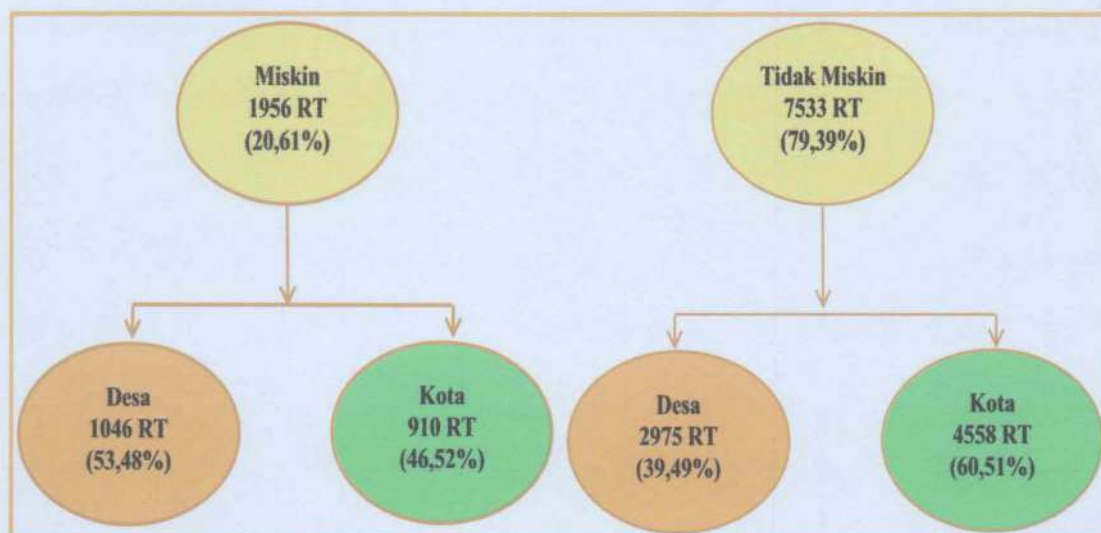
Karakteristik ekonomi		Status kerentanan	desa		kota		total		proporsi agregat
			Freq*	%	Freq*	%	Freq*	%	
Kepemilikan tanah	memiliki tanah	rentan tinggi	217	20.11	128	11.86	345	3.64	14.29%
		rentan rendah	232	21.50	502	46.52	734	7.74	68.03%
		total	449	41.61	630	58.39	1079	11.38	
	tidak memiliki tanah	rentan tinggi	2618	31.13	1782	21.19	4400	46.39	52.32%
		rentan rendah	954	11.34	3056	36.34	4010	42.28	47.68%
		total	3572	42.47	4838	57.53	8410	88.67	

Keterangan: * mengindikasikan frekuensi dalam satuan rumah tangga

Sumber: IFLS (2014)

4.1.2.3 Karakteristik Sosial

Paparan berikutnya mengarah pada analisis kemiskinan dan kerentanan kemiskinan berdasarkan karakteristik sosial. Kelompok variabel yang termasuk dalam karakteristik sosial dalam studi ini adalah lokasi tempat tinggal rumah tangga dan pendidikan kepala rumah tangga. Jika dilihat berdasarkan aspek lokasi, kemiskinan didominasi oleh rumah tangga yang berada di daerah perdesaan. Kondisi kemiskinan rumah tangga pada masing-masing daerah dapat dilihat melalui Gambar 4.7 berikut ini:



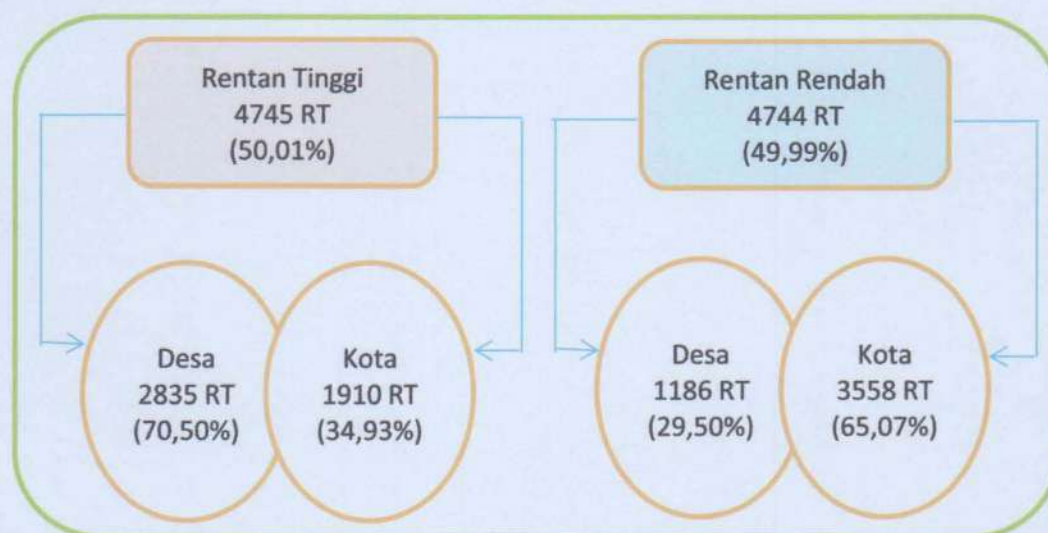
Sumber: IFLS (2014)

Gambar 4.7
Struktur Kemiskinan Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal Tahun 2014

Pada tahun 2014, total jumlah rumah tangga miskin mencapai 1.956 rumah tangga, sedangkan rumah tangga yang tidak miskin sebanyak 7.533 rumah tangga. Jika dilihat dari rumah tangga miskin, sebanyak 1.046 rumah tangga atau 53,48 persen dari total sampel berada di perdesaan. Sementara itu, 910 rumah tangga miskin lainnya atau sebesar 46,52 persen tinggal di perkotaan. Ketimpangan yang serupa juga terjadi pada rumah tangga yang tidak miskin. Rumah tangga yang tidak miskin terkonsentrasi pada rumah tangga di daerah perkotaan, yaitu sebesar 4.558 rumah tangga atau mencapai 60,51 persen, sedangkan di perdesaan hanya mencapai 2.975 rumah tangga atau 39,49 persen.

Di sisi lain, jumlah rumah tangga rentan tinggi dan rentan rendah tidak terpaut jauh, yakni masing-masing 4.745 rumah tangga dan 4.744 rumah tangga. Namun,

rumah tangga yang tergolong rentan tinggi kebanyakan berada di wilayah perdesaan, yaitu sebanyak 2.835 rumah tangga atau 70,50 persen, sedangkan di perkotaan sebanyak 1.910 rumah tangga atau sebesar 34,93 persen. Kondisi tersebut berseberangan dengan kelompok rumah tangga rentan rendah. Rumah tangga di wilayah perkotaan yang berstatus rentan rendah adalah sebanyak 3.558 rumah tangga. Sementara itu, di wilayah perdesaan terdapat 1.186 rumah tangga yang tergolong rentan rendah. Persebaran jumlah rumah tangga rentan tinggi dan rentan rendah di wilayah perdesaan dan perkotaan secara ringkas tercantum dalam Gambar 4.8 berikut ini:



Sumber: IFLS (2014)

Gambar 4.8
Persebaran Rumah Tangga Rentan Tinggi dan Rentan Rendah
Berdasarkan Wilayah

Pembahasan karakteristik sosial berikutnya adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga terbagi menjadi lima kelompok, yaitu belum atau tidak sekolah, lulus SD (Sekolah Dasar), lulus SMP

(Sekolah Menengah Pertama), lulus SMA (Sekolah Menengah Atas), dan lulus Diploma 1 (D-1) hingga Strata (S-1). Pada dasarnya, tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh individu tersebut berhubungan negatif terhadap kemiskinan rumah tangga. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang semakin tinggi akan menurunkan proporsi kemiskinannya. Kondisi kemiskinan pada masing-masing tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar (4.9) berikut ini:



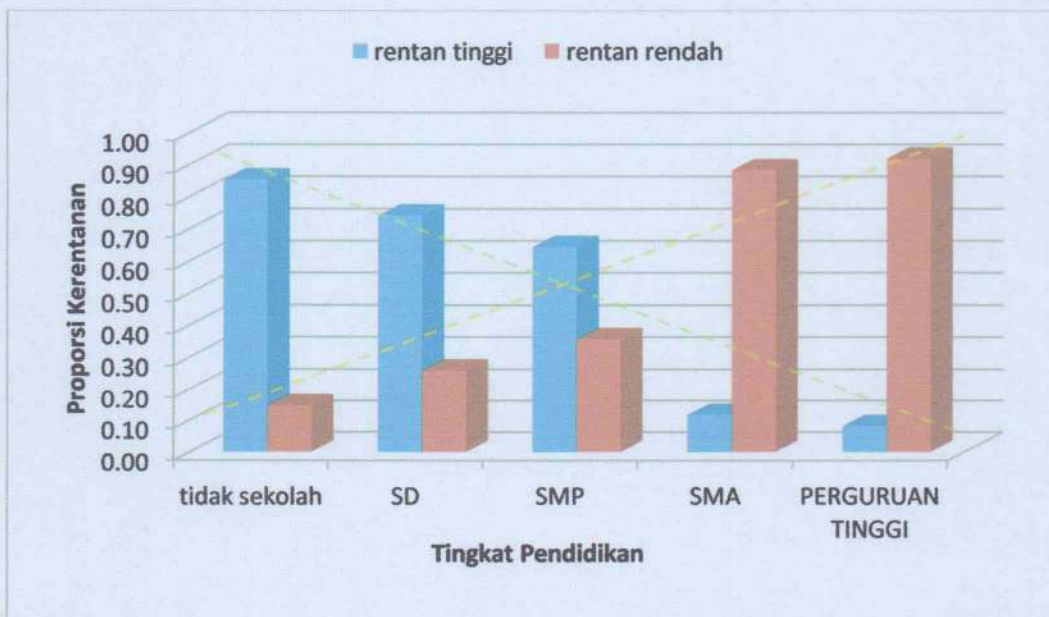
Sumber: IFLS (2014)

Gambar 4.9
Karakteristik Kemiskinan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Tahun 2014

Proporsi kemiskinan dari rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang tidak bersekolah adalah sebesar 0,38 dan kemudian semakin menurun menjadi 0,28 pada tingkat pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya, pada tingkat SMP, proporsi kemiskinan kembali menurun menjadi 0,19 dan pada tingkat SMA menjadi 0,13.

Proporsi kemiskinan yang terendah dimiliki oleh kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, yaitu sebesar 0,04.

Secara umum, hubungan tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan status kerentanan kemiskinan rumah tangga memiliki arah yang negatif. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah ditamatkan kepala rumah tangga, maka probabilitas rumah tangga untuk berstatus rentan miskin semakin kecil. Gambaran mengenai hubungan tingkat pendidikan dan kerentanan kemiskinan ditunjukkan melalui Gambar 4.10 berikut ini:



Sumber: IFLS (2014)

Gambar 4.10
Karakteristik Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Berdasarkan Gambar 4.10, diketahui bahwa proporsi kerentanan kemiskinan tinggi pada kepala rumah tangga yang tidak bersekolah adalah sebesar 0,85. Kemudian, besaran proporsi rentan tinggi tersebut semakin menurun menjadi 0,74 saat kepala rumah tangga berpendidikan sekolah dasar. Ketika kepala rumah tangga berpendidikan SMP, proporsi kerentanan kemiskinan kembali menurun menjadi 0,64 dan pada tingkat pendidikan SMA menurun menjadi 0,12. Kepala rumah tangga dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi memiliki proporsi kerentanan kemiskinan paling rendah, yaitu sebesar 0,08.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

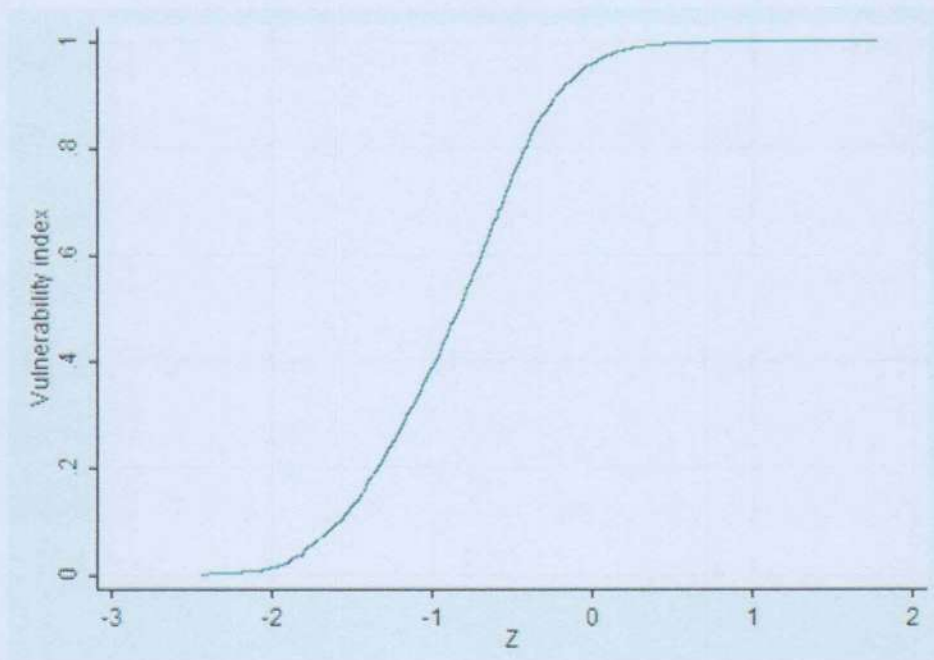
4.2.1 Hasil Penghitungan Nilai Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga

Berdasarkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, fokus pembahasan terletak pada nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga. Secara umum, hasil dari penghitungan nilai kerentanan kemiskinan melalui pendekatan *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP) menunjukkan besarnya resiko rumah tangga untuk jatuh miskin di tahun mendatang. Bila nilai kerentanan kemiskinan semakin mendekati angka satu, maka probabilitas rumah tangga untuk jatuh miskin di tahun mendatang juga semakin besar. Probabilitas rumah tangga untuk jatuh miskin di masa mendatang

diketahui melalui hasil penghitungan pada persamaan $\hat{v}_h = \Phi \left(\frac{\ln z - X_h \hat{\beta}}{\sqrt{X_h \hat{\theta}}} \right)$, dimana

$\left(\frac{\ln z - X_h \hat{\beta}}{\sqrt{X_h \hat{\theta}}} \right)$ merupakan skor Z dari variabel. Secara ringkas, hasil penghitungan

kerentanan kemiskinan rumah tangga tersaji dalam kurva *Standard Normal Cumulative Distribution Function* (CDF) berikut ini:



Sumber: IFLS (2014)

Gambar 4.11
Kurva CDF Hasil Penghitungan Skor Z Terhadap Nilai Kerentanan Kemiskinan

Berdasarkan Gambar 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa nilai skor Z dari hasil penghitungan yang terletak pada sumbu X berkisar antara -2,447 hingga 1,782. Sementara itu, nilai kerentanan kemiskinan berdasarkan standar normal distribusi kumulatif yang terletak pada sumbu Y berkisar antara 0 dan 1. Nilai skor Z sebesar -2,447 memiliki fungsi standar normal distribusi kumulatif atau nilai kerentanan kemiskinan sebesar 0.00010539. Selanjutnya, nilai skor Z sebesar 1,782 memiliki nilai kerentanan kemiskinan yang mencapai probabilitas maksimum, yaitu 1. Lebih lanjut, pada saat penghitungan skor Z menghasilkan nilai -0,829, maka nilai

kerentanan kemiskinannya adalah sebesar 0.50005269. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar nilai skor Z, maka nilai kerentanan kemiskinan yang dihasilkan juga semakin besar. Lebih jauh, semakin besar nilai kerentanan kemiskinannya menandakan bahwa rumah tangga tersebut memiliki probabilitas untuk jatuh miskin di masa mendatang yang semakin besar.

Berdasarkan perolehan angka kerentanan kemiskinan tersebut dapat dilakukan pengelompokan kerentanan kemiskinan rumah tangga. Pengelompokan kerentanan kemiskinan rumah tangga dibagi menjadi dua, yaitu kelompok rentan tinggi (*highly vulnerable*) dan kelompok rentan rendah (*low vulnerable*). Rumah tangga yang memiliki nilai kerentanan kemiskinan lebih dari atau sama dengan 0,5 dinyatakan rentan tinggi, sedangkan jika dibawah 0,5 tergolong rentan rendah. Berdasarkan penghitungan nilai kerentanan kemiskinan, maka diperoleh rata-rata agregat nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga tahun 2014 di 14 provinsi di Indonesia. Secara agregat, rata-rata nilai kerentanan kemiskinan 14 provinsi tergolong rentan tinggi, yaitu 0,517. Provinsi yang tergolong rentan tinggi (*highly vulnerable*) pada tahun 2014 adalah Lampung, Sumatra Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, dan NTB. Sementara itu, provinsi yang memiliki rata-rata agregat nilai kerentanan kemiskinan yang tergolong rentan rendah (*low vulnerable*) adalah Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DIY, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Berikut ini akan ditampilkan rata-rata agregat nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga pada 14 provinsi berdasarkan rentan tinggi dan rentan rendah di Indonesia tahun 2014:

Tabel 4.5
Rata-Rata Nilai Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga
Berdasarkan Provinsi Tahun 2014

Provinsi	rentan tinggi		Provinsi	rentan rendah	
	rata-rata	proporsi		rata-rata	proporsi
Lampung	0,658	72,26%	Banten	0,491	51,14%
Sumatra Barat	0,639	66,74%	Sumatra Selatan	0,492	55,02%
DKI Jakarta	0,626	66,15%	Jawa Tengah	0,481	46,83%
Kalimantan Selatan	0,574	59,91%	Jawa Timur	0,479	48,38%
Sumatra Utara	0,568	57,63%	Bali	0,477	48,55%
NTB	0,514	51,25%	DIY	0,445	39,96%
			Jawa Barat	0,409	36,98%
			Sulawesi Selatan	0,383	33,56%
RATA-RATA 14 PROVINSI					
0.517					

Sumber: IFLS (2014)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa Lampung merupakan provinsi yang memiliki nilai kerentanan kemiskinan tertinggi yakni sebesar 0,658 dengan proporsi rumah tangga rentan tinggi di wilayah tersebut sebanyak 72,26 persen. Bahkan, rata-rata nilai kerentanan kemiskinan di provinsi Lampung lebih tinggi dibandingkan rata-rata kerentanan kemiskinan di tingkat nasional. Rata-rata kerentanan kemiskinan tertinggi kedua adalah provinsi Sumatra Barat dengan nilai sebesar 0,639. Pada posisi ketiga, menyusul DKI Jakarta dengan rata-rata nilai kerentanan kemiskinan sebesar 0,626. Selanjutnya, Kalimantan Selatan dengan rata-rata 0,574, Sumatra Utara sebesar 0,568, dan posisi terakhir adalah Nusa Tenggara Barat dengan rata-rata sebesar 0,514.

Lebih lanjut, dari kelompok provinsi dengan rata-rata nilai kerentanan kemiskinan rendah tersebut, diketahui bahwa Sulawesi Selatan memiliki nilai kerentanan kemiskinan terendah, yaitu 0,383. Jika dilihat dari total rumah tangga di wilayah tersebut, proporsi rumah tangga rentan tinggi di Sulawesi Selatan hanya sebesar 33,56 persen. Rata-rata nilai kerentanan kemiskinan rendah pada tujuh provinsi lainnya adalah Banten sebesar 0,491 dengan proporsi rumah tangga rentan tinggi sebesar 51,14 persen, Sumatra Selatan sebesar 0,492 dengan proporsi 55,02 persen, Jawa Tengah 0,481 dengan proporsi 46,83 persen, Jawa Timur sebesar 0,479 dengan proporsi 48,83 persen, Bali sebesar 0,477 dengan proporsi 48,55 persen, D.I Yogyakarta sebesar 0,445 dengan proporsi 39,96 persen, dan Jawa Barat sebesar 0,409 dengan proporsi 36,98 persen.

4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Logit

Untuk mengetahui kemungkinan individu berstatus rentan miskin digunakan model regresi logit. Variabel dependen dalam model ini adalah status kerentanan kemiskinan rumah tangga. Sementara itu, variabel independen untuk status kerentanan kemiskinan rumah tangga adalah usia kepala rumah tangga, usia kuadratik kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, *dummy* tingkat pendidikan kepala rumah tangga, *dummy* kepemilikan tabungan, *dummy* kepemilikan tanah, dan *dummy* lokasi tempat tinggal. Hasil estimasi model regresi logit untuk status kerentanan kemiskinan pada masing-masing individu dapat dilihat pada Tabel (4.6) berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Estimasi Model Logit Status Kerentanan Kemiskinan

		Number of obs =		9489	
		LR chi2(8) =		8518,32	
		Prob > chi2 =		0,0000	
		Pseudo R2 =		0,6476	
vul	Coef.	Std. Err.	z	P> z	odds ratio
age	-0,35549	0,02275	-15,62	0,000	0,70082
agesqr	0,00442	0,00023	19,08	0,000	1,00444
hhszise	1,18718	0,03422	34,69	0,000	3,27785
Deduc	-4,39088	0,11411	-38,48	0,000	0,01238
Dlocation	-2,24239	0,08489	-26,41	0,000	0,10620
Dsaving	-3,72052	0,11293	-32,94	0,000	0,02422
Dlandown	-1,39200	0,12944	-10,75	0,000	0,24857
_cons	5,04819	0,53756	9,39	0,000	-

Sumber: IFLS (2014)

Berdasarkan hasil model regresi logit pada Tabel 4.4 maka dapat diperoleh model logistik status kerentana kemiskinan. Berikut ini adalah model logistik status kerentana kemiskinan:

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = & 5,04819 - 0,35549age + 0,00442agesqr + 1,18718hhszise \\ & - 4,39088Deduc - 2,24239Dlocation - 1,39200Dlandown \\ & - 3,72052Dsaving \end{aligned}$$

Sebelum melakukan interpretasi pada hasil persamaan regresi logit, perlu dipastikan bahwa nilai dari masing-masing parameter yang digunakan bisa diestimasi secara statistik. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya *misleading information*.

Beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk mengestimasi kemungkinan berstatus rentan miskin adalah sebagai berikut :

4.2.3 Uji Z-statistik

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilakukan uji signifikansi secara parsial terhadap model logistik status kerentanan kemiskinan rumah tangga. Uji signifikansi tersebut dilakukan dengan melihat $P > |Z|$ atau *p-value* untuk *Z test*. Batasan yang digunakan adalah nilai *critical value* pada tingkat α sebesar 1 persen.

Nilai $P > |Z|$ untuk variabel usia kepala rumah tangga, usia kuadratik kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, *dummy* tingkat pendidikan kepala rumah tangga, *dummy* kepemilikan tabungan, *dummy* kepemilikan tanah, *dummy* kepemilikan tanah, dan *dummy* lokasi tempat tinggal sebesar 0,000. Artinya, nilai tersebut berada pada area H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa parameter dari variabel-variabel tersebut dapat dijadikan estimator dan signifikan memengaruhi status rentan miskin secara parsial.

4.2.4 Uji Likelihood Ratio

Pengujian signifikansi secara simultan dilakukan dengan melihat nilai $\text{Prob} > \chi^2$ atau probabilitas *likelihood ratio* (LR). Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa probabilitas LR statistik untuk status kerentanan kemiskinan signifikan pada nilai *critical value* 1 persen, yaitu sebesar 0,0000. Artinya, nilai probabilitas LR model logistik status rentan miskin berada pada area H_0 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan variabel-variabel independen pada model logit signifikan dalam memengaruhi variabel dependen.

4.2.5 Uji *Goodness of Fit* pada *Pseudo R2*

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa model status kerentanan kemiskinan memiliki nilai *Pseudo R2* yang cukup tinggi yakni lebih dari 50 persen. Nilai *pseudo R2* adalah 0,6476 atau 64,76% persen. Angka ini dapat dimaknai bahwa variabel-variabel independen yang ada pada model logit mampu menjelaskan variabel dependennya yang berupa status kerentanan kemiskinan sebesar 64,76 persen. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa 64,76 persen dari variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya, yaitu usia kepala rumah tangga, usia kuadrat kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, *dummy* tingkat pendidikan kepala rumah tangga, *dummy* kepemilikan tabungan, *dummy* kepemilikan tanah, dan *dummy* lokasi tempat tinggal.

4.2.6 Pembuktian Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penghitungan nilai kerentanan kemiskinan, dan hasil regresi metode logit yang telah dijelaskan sebelumnya, maka didapatkan pembuktian hipotesis untuk studi ini sebagai berikut:

1. Rumah tangga yang mengalami kerentanan kemiskinan tinggi berada di Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, rumah tangga yang mengalami kerentanan kemiskinan rendah adalah Provinsi Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DIY, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

2. Secara simultan, variabel usia kepala rumah tangga, usia kuadratik kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tabungan, kepemilikan tanah, dan lokasi tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap status kerentanan kemiskinan rumah tangga. Sementara itu, secara parsial variabel usia kepala rumah tangga terbukti berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap status kerentanan kemiskinan, usia kuadratik kepala rumah tangga terbukti berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap status kerentanan kemiskinan, jumlah anggota rumah tangga terbukti berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap status kerentanan kemiskinan, tingkat pendidikan kepala rumah tangga berhubungan negatif terhadap status kerentanan kemiskinan, kepemilikan tabungan terbukti berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap status kerentanan kemiskinan, kepemilikan tanah terbukti berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap status kerentanan kemiskinan, dan lokasi tempat tinggal terbukti berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap status kerentanan kemiskinan.

4.3. Pembahasan

Kemiskinan masih menjadi masalah besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Namun, beberapa tahun terakhir masalah kemiskinan berkembang menjadi masalah kerentanan kemiskinan. Secara ekonomi, individu atau rumah tangga dikatakan rentan apabila hidup di atas garis kemiskinan, namun mudah jatuh miskin di tahun mendatang karena tidak mampu bertahan saat terjadi guncangan ekonomi. Secara sosial, penduduk rentan adalah individu atau rumah tangga yang tersingkir dari kehidupan sosial dan

kehilangan hak-hak dasarnya karena adanya resiko sosial berupa kehilangan pekerjaan, penyakit, kecacatan fisik, dan kondisi tidak menguntungkan lainnya. Berbagai jenis resiko dan guncangan yang menimpa rumah tangga rentan miskin tersebut secara umum meliputi resiko pada aset, pendapatan, dan kesejahteraan (*well-being*). Lebih detail, resiko-resiko kerentanan kemiskinan tertuang dalam tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.7
Jenis-jenis Resiko Kerentanan Kemiskinan

<u>Asset</u>	<u>Pendapatan</u>	<u>Kesejahteraan</u>
<ul style="list-style-type: none"> -Modal manusia -Modal fisik/finansial -Modal Sosial -<i>Public goods</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -Tabungan, kredit, dan investasi -<i>Returns from asset disposal</i> -Transfer dan remitansi -<i>Returns to activities and assets</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -konsumsi -kebutuhan nutrisi -pendidikan -kesehatan
<u>Resiko</u>	<u>Resiko</u>	<u>Resiko</u>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>unemployment</i> karena kehilangan <i>skill</i>, sakit, atau kualitas SDM yang rendah. - memiliki tanah yang tidak aman - kerusakan aset akibat bencana dan cuaca - kehilangan nilai aset finansial 	<ul style="list-style-type: none"> -Kenaikan harga <i>output</i> -Kegagalan <i>output</i> karena guncangan cuaca, konflik, dan penyakit -Penurunan <i>returns on financial assets</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Lonjakan harga di pasar makanan - Rendahnya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk umum. - Informasi dan pengetahuan yang terbatas mengenai nutrisi.

Sumber: Dercon(2001) dalam Haughton dan Khandker (2006:244)

Pembahasan pertama dalam studi ini mengarah pada profil kerentanan kemiskinan rumah tangga per provinsi tahun 2014. Kondisi kerentanan kemiskinan pada 14 provinsi menunjukkan bahwa Lampung, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan,

DKI Jakarta, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Barat termasuk dalam kelompok kerentanan tinggi. Bahkan, rata-rata nilai kerentanan kemiskinan pada keenam provinsi melebihi keseluruhan rata-rata nilai kerentanan kemiskinan dari 14 provinsi terpilih tersebut. Ini terjadi terkait dampak yang ditimbulkan dari berbagai jenis resiko dan guncangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara garis besar, tingginya rata-rata nilai kerentanan kemiskinan tersebut disebabkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, adanya bencana alam, dan lonjakan harga di pasar makanan.

Kondisi kerentanan kemiskinan menunjukkan bahwa provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Barat memiliki nilai kerentanan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, pada tahun 2014 rata-rata nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga di provinsi Lampung menduduki peringkat pertama, sedangkan Nusa Tenggara Barat berada di posisi ke lima. Hal ini dikarenakan kedua provinsi tersebut memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang lebih rendah jika dibandingkan 12 provinsi lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2014), nilai Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014 di provinsi Lampung adalah sebesar 66,42, sedangkan di provinsi Nusa Tenggara Barat hanya sebesar 64,31. IPM yang rendah tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 2014 saja. Pada tahun 2010 dan 2012, nilai IPM di dua provinsi tersebut juga terbilang rendah. Nilai IPM tahun 2010 di provinsi Lampung adalah sebesar 63,71, sedangkan di Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 61,16. Selanjutnya, pada tahun 2012, provinsi Lampung masih memiliki nilai IPM yang rendah, yaitu 64,87, sedangkan Nusa Tenggara Barat memiliki nilai 62,98. Secara garis besar, angka IPM di kedua provinsi tersebut masih berada di bawah nilai IPM Nasional selama periode

tahun 2010, 2012, dan 2014. Nilai Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing provinsi tahun 2014 terangkum secara lengkap pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.8
Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi Tahun 2010, 2012, dan 2014

Provinsi	2010	2012	2014
Lampung	63,71	64,87	66.42
Sumatra Barat	67,25	68,36	69.36
DKI Jakarta	76,31	77,53	78.39
Kalimantan Selatan	65,20	66,68	67.63
Sumatra Utara	67,09	67,74	68.87
Nusa Tenggara Barat	61,16	62.98	64.31
Jawa Timur	65,36	66,74	68.14
Jawa Tengah	66,08	67,21	68.78
D.I Yogyakarta	75,37	76,15	76.81
Bali	70,10	71,62	72.48
Banten	67,54	68,92	69.89
Jawa Barat	66,15	67,32	68.80
Sulawesi Selatan	66,00	67,26	68.49
Sumatra Selatan	64,44	65,79	66.75
Indonesia	66,53	67,70	68,90

Sumber: BPS, 2014

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator pencapaian pembangunan kualitas hidup manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (2014), IPM dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and happy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Komponen yang digunakan dalam IPM meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mewakili bidang kesehatan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur pembangunan di bidang pendidikan, serta

pengeluaran per kapita yang digunakan untuk melihat kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Berdasarkan pemahaman mengenai IPM tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila suatu wilayah memiliki nilai IPM yang tinggi, maka kualitas manusia pada wilayah tersebut juga tinggi.

Bagi provinsi dengan nilai IPM yang rendah seperti Lampung dan Nusa Tenggara Barat, tentu saja kondisi ini memengaruhi tingginya rata-rata nilai kerentanan kemiskinan di masing-masing wilayah. Sebab, kualitas modal manusia di wilayah tersebut masih rendah. Padahal, kualitas modal manusia merupakan salah satu cara utama untuk memperbesar aset, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mengurangi kerentanan kemiskinan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) menyebabkan rumah tangga tidak mampu menghadapi resiko guncangan. Ini terjadi karena tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah menurunkan produktivitas dan kapabilitas individu. Pada umumnya, individu dengan kualitas SDM yang rendah rawan kehilangan pekerjaan atau *unemployment* karena tenaga kerja yang banyak diserap adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Akibatnya pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga atau individu di wilayah dengan IPM rendah tidak setinggi pendapatan rumah tangga di wilayah yang memiliki IPM tinggi.

Temuan ini berimplikasi pada kebijakan pengentasan kemiskinan dan kerentanan di tingkat Nasional. Penanganan kerentanan kemiskinan memerlukan kebijakan yang bersifat struktural. Salah satu bentuk kebijakan struktural tersebut adalah investasi modal manusia (*human capital investment*). Kebijakan peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan dan pendidikan terus menjadi prioritas dalam

RPJMN 2010-2014 hingga RPJMN 2015-2019. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah menyusun program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan di bidang kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program BSM memberikan bantuan uang tunai untuk anak-anak miskin dan rentan miskin dari tingkat SD/MI hingga SMA/SMK/MA. Total jumlah siswa yang mendapatkan BSM mencapai 15,43 juta siswa. Namun, dalam realisasinya program ini hanya mampu menjangkau empat persen dari total rumah tangga miskin dan rentan miskin di tingkat SD hingga SMP dan dua persen di tingkat SMA. Sementara itu, keberadaan program JKN ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dan rentan, sehingga produktivitas ekonomi rumah tangga meningkat. Berdasarkan laporan Evalusia Paruh Waktu RPJMN 2010-2014, kendala pelaksanaan program JKN adalah masih banyak masyarakat miskin dan rentan yang belum memiliki kartu jamkesmas, sehingga ketika sakit sulit mengakses fasilitas kesehatan. Selain itu, 80 persen pemegang kartu jamkesmas belum mengetahui berbagai manfaat yang dapat diterima dari fasilitas jamkesmas.

Selanjutnya, berdasarkan penghitungan nilai kerentanan kemiskinan menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta dan Sumatra Utara juga memiliki rata-rata nilai kerentanan kemiskinan tinggi. Hal ini disinyalir dapat terjadi karena adanya resiko bencana alam berupa banjir di DKI Jakarta dan erupsi Gunung Sinabung di Sumatra Utara pada tahun 2014. Bencana alam merupakan bagian dari guncangan yang menimbulkan kerugian pada perekonomian. Bahkan, menurut Bank Indonesia

(2015), peristiwa bencana alam dapat mendorong bertambahnya jumlah penduduk yang berstatus rentan miskin.

Lebih lanjut, menurut Benson dan Clay (2007) dalam Negara dan Bary (2008) hubungan antara resiko bencana alam dengan kerentanan kemiskinan terbagi menjadi tiga. Pertama, kerugian finansial karena kerusakan dan hilangnya aset-aset yang dimiliki rumah tangga, seperti tempat tinggal, tanah pertanian, dan infrastruktur. Kedua, terhentinya proses produksi dan berkurangnya output akibat terhambatnya distribusi. Ketiga, meningkatnya angka kemiskinan di suatu negara atau wilayah yang terkena bencana alam. Negara dan Bary (2008) menambahkan bahwa bencana alam juga memberikan dampak jangka panjang dan jangka pendek. Dampak jangka pendek berkaitan dengan timbulnya keresahan dan ketidakpastian pada masyarakat. Sementara itu, dampak jangka panjang dapat menyebabkan terhambatnya penanganan pemerintah untuk mengurangi masyarakat miskin dan rentan miskin (*vulnerable people*).

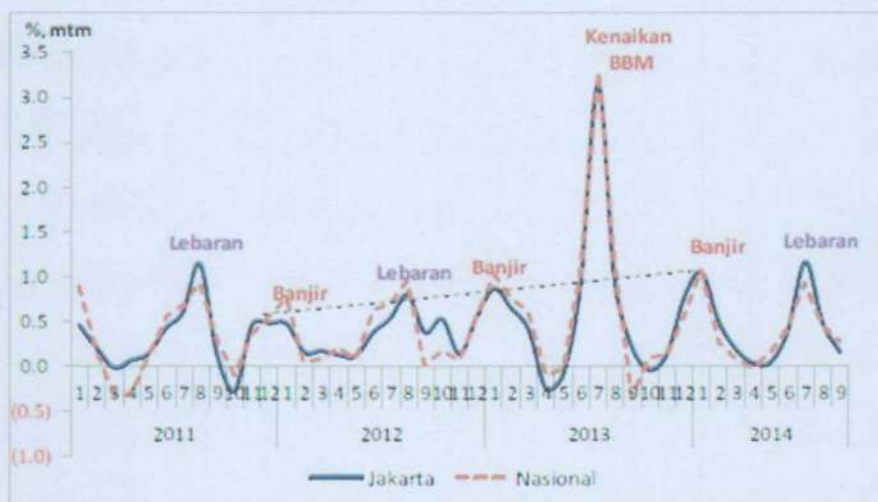
Bencana alam berupa erupsi gunung sinabung dan banjir pada pertengahan tahun 2013 hingga awal tahun 2014 juga disinyalir menjadi penyebab tingginya rata-rata kerentanan kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2014. Bank Indonesia (2014) menjelaskan bahwa erupsi Gunung Sinabung di Sumatra Utara menyebabkan terganggunya distribusi dan produksi bahan pangan khususnya kelompok *volatile food*. Hal ini terjadinya karena akses jalan terbatas untuk mendistribusikan barang. Debu vulkanik merusak tanaman pangan dan hortikultura di kecamatan karo dengan total kerugian pertanian mencapai 97,7 miliar rupiah.

Produksi pertanian berkurang sebesar 30 persen atau sekitar 2.959 luas areal pertanian yang terdiri dari 35 ha tanaman pangan dan 2.924 ha tanaman hortikultura. (Kemenko PMK, 2014). Padahal, penduduk pedesaan menggantungkan sebagian besar penghasilan utamanya dari sektor pertanian. Adanya bencana alam yang berdampak pada kerusakan hasil pertanian tersebut menyebabkan penduduk pedesaan kehilangan pendapatan, sehingga pengeluaran untuk konsumsi menurun. Akibatnya, terjadi penurunan kesejahteraan yang tercermin dari peningkatan persentase penduduk miskin. Penduduk miskin dan rentan miskin di desa bertambah menjadi 38.600 orang, sedangkan di perkotaan menjadi 35.300 orang. Adapun jumlah korban yang mengungsi mencapai 10.377 jiwa atau 2.762 kepala keluarga.

Sementara itu, permasalahan bencana alam di provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun memang belum berubah, yaitu masih berupa banjir dan kebakaran. Bank Dunia (2014) melaporkan bahwa banjir pada tahun 2014 menimbulkan kerugian bagi 132.000 orang. Jumlah korban mengungsi diperkirakan sebanyak 6.289 jiwa, sedangkan korban meninggal sebanyak 5 orang. Total kerugian ekonomi dan keuangan akibat banjir diperkirakan mencapai lima triliun rupiah. Selain itu, jika diukur menurut dampak sektoralnya, tertutupnya beberapa akses jalan dapat menghambat proses produksi dan distribusi barang-barang produksi dari dan ke dalam kota Jakarta.

Hal ini berdampak pada kenaikan harga kelompok bahan makanan sebesar 7,96 persen dan kelompok makanan jadi sebesar 4,92 persen, sehingga menyebabkan tingginya angka inflasi. Lonjakan harga di pasar makanan merupakan salah satu bentuk resiko atau guncangan pada komponen kesejahteraan (*well-being*) rumah

tangga. Kenaikan harga yang tajam menyebabkan daya beli masyarakat rendah, konsumsi per kapita rumah tangga menurun, dan terjadi peningkatan kerentanan kemiskinan. Lebih lanjut, berdasarkan *Laporan Keuangan Nusantara 2014*, inflasi karena banjir di DKI Jakarta menunjukkan *trend* meningkat dari tahun 2012 hingga 2014. Bahkan, sampai dengan Agustus 2014 angka inflasi Jakarta sebesar 3,96 persen berada di atas inflasi Nasional sebesar 3,42 persen. Perkembangan inflasi akibat banjir secara rinci tercantum dalam Gambar 4.12 berikut ini:



Sumber: Bank Indonesia (2014)

Gambar 4.12
Perkembangan Inflasi Jakarta dan Nasional Tahun 2014

Terkait dengan temuan ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta merumuskan kebijakan untuk menekan angka inflasi akibat banjir. Target sasaran inflasi yang ditetapkan adalah sebesar 4,5 persen \pm 1 persen. Namun, beberapa hal masih perlu dilakukan untuk mencapai sasaran inflasi, yaitu (1),

mengintensifkan koordinasi untuk menjamin ketersediaan pasokan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan pokok; (2) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui penerapan APBD untuk menjamin kelancaran produksi dan distribusi pangan; dan (3) mengelola ekspektasi masyarakat mengenai kesiapan pemerintah untuk memenuhi pasokan kebutuhan pangan dan energi wilayah. Di sisi lain, peran masyarakat dan pemerintah juga diperlukan dalam mitigasi banjir di provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membersihkan kanal, sungai, dan tanggul dari sampah, sehingga daerah resapan air dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan investasi dan pengembangan untuk teknologi pencegah banjir, serta rencana pengambilalihan tanah dan pemukiman kembali (*land acquisition and resettlement*) dengan berkonsultasi pada masyarakat yang terdampak banjir (Bank Dunia, 2016).

Provinsi dengan nilai kerentanan kemiskinan tinggi selanjutnya adalah Sumatra Barat dan Kalimantan Selatan. Pemicu tingginya nilai kerentanan kemiskinan di kedua provinsi tersebut disinyalir karena kenaikan harga yang tinggi pada *administered price* dan *volatile food*. Penyumbang kenaikan harga dari kelompok *administered price*, yaitu tarif angkutan umum akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Kenaikan harga BBM mengharuskan terjadi penyesuaian harga-harga pada kelompok *volatile food*, yaitu beras (Bank Indonesia, 2014).

Beras merupakan bagian dari kebutuhan dasar dan komponen penting bagi masyarakat miskin dan rentan. Adanya kenaikan harga beras menjadi guncangan tersendiri bagi kesejahteraan rumah tangga khususnya mereka yang konsumsi per

kapitanya berada di bawah atau tepat di atas garis kemiskinan. Masyarakat miskin dan rentan miskin mengalami pelemahan daya beli terhadap kebutuhan dasar, sehingga beresiko untuk jatuh miskin di tahun mendatang. Oleh karena itu, kenaikan harga dan inflasi perlu mendapat perhatian pemerintah karena dapat berimbas pada kenaikan angka kemiskinan dan kerentanan.

Peningkatan laju inflasi di Kalimantan Selatan adalah sebesar 11 persen (yoy), dimana angka inflasi di tahun 2014 ini lebih besar dibandingkan tahun 2013 sebesar 6,40 persen. Mengacu pada Laporan Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2014, kelompok yang mengalami inflasi terbesar adalah kelompok bahan makanan yang mencapai 10,13 persen, kelompok kesehatan sebesar 9,36 persen, dan makanan jadi sebesar 8,65 persen. Sementara itu, laju inflasi Sumatra Barat juga meningkat sebagai imbas dari penyesuaian harga BBM bersubsidi dan keterbatasan pasokan beras. Bank Indonesia (2014) melaporkan bahwa inflasi Sumatra Barat tahun 2014 tercatat sebesar 11,58 persen meningkat dari 6 persen pada tahun 2013. Kondisi ini pula yang mengakibatkan inflasi Sumatra Barat berada di atas inflasi nasional yang hanya sebesar 8,36 persen. Jika dikelompokkan berdasarkan kelompok barang dan jasa, penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok bahan makanan, yaitu beras dan cabai.

Terkait dengan inflasi akibat kenaikan harga bahan makanan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai kebijakan strategis, satu diantaranya adalah Operasi Pasar Khusus (OPK) untuk beras. Langkah ini dilakukan guna menstabilkan harga beras yang ada di pasaran. Pemerintah juga telah membuat

program Raskin yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat(RTS-PM) pada tahun 2013 dan 2014 mencapai 15.530.897 rumah tangga. Pada tahun 2014, RTS-PM Program Raskin mencakup sekitar 25 persen rumah tangga miskin dan rentan miskin (TNP2K, 2014) Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang harus dihadapi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima program Raskin. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tinggi juga menerima beras Raskin. Mengacu pada Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014, kondisi sarana dan prasarana moda serta angkutan jalan yang buruk menyebabkan proses distribusi beras Raskin belum berjalan dengan baik.

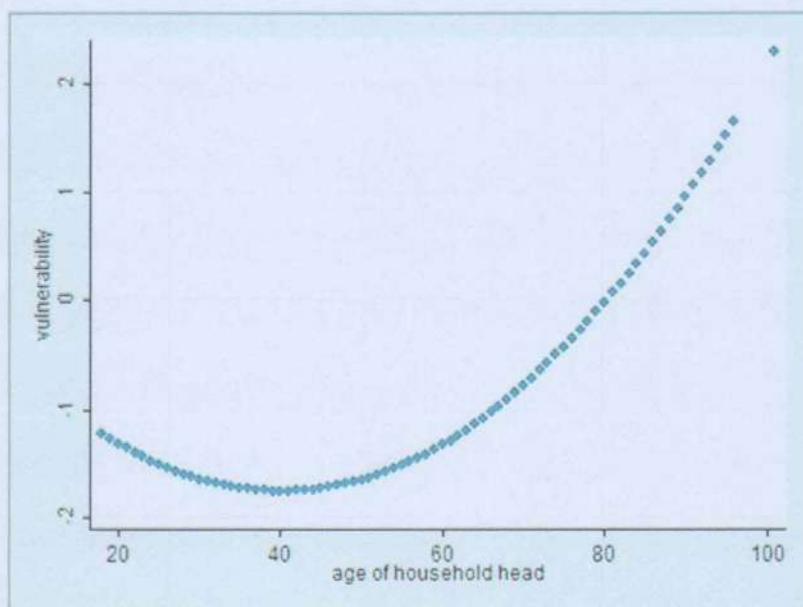
Setelah melakukan pembahasan mengenai provinsi-provinsi yang mengalami kerentanan kemiskinan tinggi, selanjutnya akan dibahas terkait variabel-variabel yang berpengaruh terhadap status kerentanan kemiskinan rumah tangga. Berdasarkan hasil regresi pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa determinan dari status kerentanan kemiskinan adalah usia kepala rumah tangga, usia kuadratik kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tabungan, kepemilikan tanah, dan lokasi tempat tinggal. Akan tetapi, terdapat perbedaan besaran koefisien *odds ratio* pada masing-masing variabel independen tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun kedelapan variabel independen tersebut sama-sama berpengaruh, namun pengaruhnya berbeda-beda untuk status kerentanan kemiskinan.

Variabel usia kepala rumah tangga memiliki hubungan negatif dengan status kerentanan kemiskinan. Artinya, seiring dengan pertambahan usia kepala rumah tangga maka kemungkinan rumah tangga untuk berstatus rentan miskin semakin kecil. Bertambahnya satu satuan pada usia kepala rumah tangga akan menurunkan resiko rumah tangga untuk berstatus rentan miskin sebesar 0,70082 kali. Hal ini bertentangan dengan Novignon (2012) yang menemukan bahwa usia kepala rumah tangga memiliki hubungan positif terhadap status kerentanan kemiskinan, namun sesuai dengan temuan Deressa (2013) dan Imai dkk (2009).

Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut karena usia dipandang sebagai tingkat kematangan dalam *skill* dan pengalaman kerja (Deressa, 2013). Oleh karena itu, semakin meningkatnya usia kepala rumah tangga maka *skill* dan pengalamannya dalam bekerja juga semakin tinggi, sehingga umumnya memiliki pendapatan yang tinggi. Selain itu, produktivitas kepala rumah tangga juga meningkat seiring dengan pertambahan usia, sehingga kesempatan untuk mencari penghidupan yang layak dari pendapatan juga semakin besar (Adepoju dan Yusuf,,2012).

Akan tetapi, pola penurunan resiko rumah tangga untuk berstatus rentan miskin tersebut hanya terjadi sampai titik usia tertentu saja, yaitu 40 tahun. Hal tersebut dikarenakan variabel kuadrat usia kepala rumah tangga berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap status kerentanan kemiskinan. Artinya, setelah melewati usia 40 tahun, maka pertambahan usia kepala rumah tangga akan menyebabkan kemungkinan untuk rentan miskin meningkat. Hasil penghitungan titik

minimum usia kepala rumah tangga terhadap kerentanan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut ini:



Gambar 4.13
Hubungan Usia Kepala Rumah Tangga
Terhadap Kerentanan Kemiskinan

. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 70 persen penduduk yang berusia di atas 40 tahun bekerja di sektor informal yang identik dengan minimnya perlindungan sosial (Salim, 2010:510). Selain itu, pekerja di sektor informal memiliki penghasilan reguler yang rendah dan fluktuatif, sehingga tidak mampu membayar asuransi kesehatan. Apabila pekerja di sektor informal ini sakit, maka mereka akan kehilangan penghasilan untuk biaya berobat. Titik minimum usia kepala rumah tangga yang berada pada usia 40 tahun tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi data sampel. Dalam studi ini, rata-rata usia kepala rumah tangga yang berstatus rentan tinggi berada pada usia di atas 40 tahun, yaitu sebesar 80,76 persen.

Sementara itu, proporsi kepala rumah tangga berusia 18-39 tahun yang berstatus rentan tinggi sebesar 19,24 persen. Lebih lanjut, penambahan usia mengarahkan kepala rumah tangga memasuki kelompok usia tidak produktif, yaitu di atas 64 tahun. Pada usia tidak produktif, kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang besar dan mempertahankan kesejahteraan semakin menurun. Usia tua juga rawan terhadap penyakit dan penurunan kemampuan fisik untuk bekerja, sehingga produktivitas ekonominya berkurang dan pendapatannya menurun saat melewati *middle age*. Hal tersebut yang menyebabkan mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk jatuh miskin di tahun mendatang.

Hasil selanjutnya terkait dengan jumlah anggota rumah tangga. Variabel ini berhubungan positif dengan status kerentanan kemiskinan rumah tangga. Artinya, peningkatan jumlah anggota rumah tangga akan meningkatkan kemungkinan rumah tangga untuk berstatus rentan miskin sebesar 3,27785 kali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah rumah tangga yang semakin besar akan menyebabkan kemungkinan resiko rumah tangga untuk jatuh miskin di tahun mendatang semakin besar pula. Sebab, tingkat pendapatan tertentu yang diperoleh harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar lebih banyak anggota. Disamping itu, kebutuhan terhadap biaya investasi untuk meningkatkan kualitas modal manusia dalam rumah tangga, seperti gizi dan pendidikan membutuhkan biaya lebih besar. Dengan demikian, jumlah rumah tangga yang besar identik dengan kemungkinan lebih besar untuk berstatus rentan miskin dibandingkan jumlah rumah tangga yang sedikit.

Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kasirye (2007) di Uganda dan Navignon (2012) di Ghana bahwa kerentanan kemiskinan berhubungan erat dengan jumlah anggota rumah tangga. Jumlah rumah tangga yang besar menyebabkan semakin besar pula rasio ketergantungan dalam rumah tangga (Kasirye, 2007). Lebih lanjut, Adepoju dan Yusuf (2013) di Nigeria menambahkan bahwa dengan besarnya ukuran rumah tangga maka pengeluaran per capita rumah tangga akan berkurang. Akibatnya, semakin sedikit tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh anggota rumah tangga, sehinggalah rentan untuk jatuh miskin.

Analisis berikutnya mengarah pada variabel *dummy* tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Hasil regresi logit pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga memiliki arah negatif. Artinya, rumah tangga yang dikepalai oleh kepala rumah tangga dengan pendidikan tinggi memiliki kemungkinan lebih kecil sebesar 0,012389 kali untuk mengalami kerentanan kemiskinan dibandingkan kepala rumah tangga yang berpendidikan menengah ke bawah. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa rumah tangga yang memiliki kepala rumah tangga berpendidikan rendah berpotensi lebih besar untuk mengalami kerentanan kemiskinan dibandingkan kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi. Dalam konteks ini, seseorang dikatakan berpendidikan rendah apabila belum atau sudah menyelesaikan pendidikan sampai jenjang menengah pertama, sedangkan dikatakan berpendidikan tinggi apabila sudah menyelesaikan jenjang menengah ke atas sampai perguruan tinggi.

Hasil estimasi ini sesuai dengan studi dari Baiyegunhi dan Fraser (2010) serta Jha dan Dang (2009) yang menemukan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan oleh kepala rumah tangga, maka kerentanan kemiskinan rumah tangga tersebut akan menurun. Temuan dari Suryahadi dan Sumarto (2003) juga menjelaskan bahwa melalui pendidikan yang tinggi, seorang kepala rumah tangga akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan peningkatan pada kesejahteraannya. Selain itu, kemungkinan untuk mendapatkan peluang usaha juga semakin besar, sehingga kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi mampu menghadapi resiko kerentanan kemiskinan (Kasirye, 2007). Lebih lanjut, menurut teori dari Becker (1993) mengenai *human capital* menyatakan bahwa pendidikan mampu meningkatkan kesejahteraan individu secara material dan non material. Hal ini dikarenakan pendidikan dinilai dapat meningkatkan produktivitas dan *skill* seseorang.

Determinan kerentanan kemiskinan selanjutnya adalah variabel *dummy* lokasi tempat tinggal rumah tangga. Variabel lokasi terbagi menjadi dua dengan basis rumah tangga yang tinggal di perkotaan. Lokasi rumah tangga yang berada di perkotaan ternyata memiliki arah negatif dengan status kerentanan kemiskinan. Artinya, rumah tangga yang berlokasi di perkotaan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengalami kerentanan kemiskinan dibandingkan rumah tangga yang tinggal di perdesaan. Besaran kemungkinan tersebut adalah sebesar 0,106203 kali. Hasil estimasi ini juga dapat diartikan bahwa kerentanan kemiskinan lebih banyak dialami oleh rumah tangga yang berada di wilayah perdesaan.

Hasil dari studi ini sesuai dengan penelitian mengenai kerentanan kemiskinan di Indonesia yang telah dilakukan oleh Princhett dkk (2000). Mereka menemukan bahwa rumah tangga yang tergolong rentan miskin di Indonesia didominasi oleh rumah tangga yang berada di perdesaan. Selanjutnya, studi dari Jha dkk (2009) di Fiji juga menunjukkan bahwa kerentanan kemiskinan merupakan fenomena yang banyak menimpa rumah tangga yang tinggal di desa. Pendapat tersebut sesuai dengan temuan Azam dan Imai (2009), dimana berdasarkan hasil penghitung total kerentanan kemiskinan diketahui bahwa proporsi penduduk di perdesaan yang tergolong rentan miskin lebih banyak dibandingkan penduduk di perkotaan.

Kondisi ini dapat terjadi karena fasilitas publik di perkotaan lebih lengkap dibandingkan wilayah perdesaan. Umumnya, infrastruktur dan transportasi umum di wilayah perdesaan belum berkembang. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang tinggal di desa kesulitan untuk mengakses pusat layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan pasar. Akibatnya, kegiatan ekonomi rumah tangga menjadi terhambat, sehingga rentan untuk jatuh miskin di tahun mendatang. Belum lagi sebagian besar penduduk di perdesaan yang masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian yang subsisten (Todaro, 2000). Padahal, pendapatan dari pertanian bersifat fluktuatif karena sangat bergantung pada kondisi cuaca, rentan terhadap banjir, dan harga pasar yang berfluktuasi. Akibatnya, pengeluaran per kapita rumah tangga di perdesaan umumnya lebih kecil dibandingkan rumah tangga di perkotaan. Berdasarkan data rumah tangga tahun 2014, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di perdesaan hanya sebesar Rp.675.366,81, sedangkan di perkotaan mencapai

Rp. 1.011.650,65. Distribusi pengeluaran per kapita rumah tangga di perkotaan dan perdesaan secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut ini:



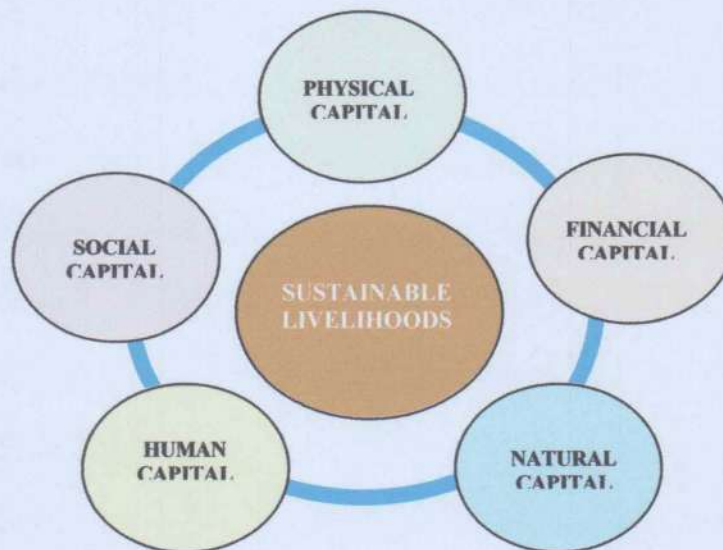
Sumber: IFLS (2014)

Gambar 4.14
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Rumah Tangga
Berdasarkan Wilayah
Tahun 2014

Pembahasan selanjutnya terkait variabel *dummy* aset rumah tangga berupa kepemilikan tabungan. Aset finansial merupakan salah satu determinan penting dalam memengaruhi kerentanan kemiskinan. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.4, variabel kepemilikan tabungan memiliki arah yang negatif terhadap kemungkinan rumah tangga berstatus rentan miskin. Basis dari variabel *dummy* kepemilikan tabungan ini adalah rumah tangga yang memiliki tabungan. Artinya, rumah tangga yang memiliki tabungan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk jatuh miskin pada tahun mendatang dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki tabungan, yaitu sebesar 0,02422 kali. Temuan ini sesuai dengan konsep kerentanan kemiskinan yang

disampaikan Philip dan Rayhan (2010) bahwa aset merupakan sebuah *buffer* bagi rumah tangga agar mampu bertahan saat terjadi guncangan finansial.

Tabungan adalah salah satu bentuk produk keuangan yang tergolong dalam aset likuid. Artinya, aset berupa tabungan dapat diubah menjadi uang kontan dalam waktu yang relatif cepat dengan nilai yang stabil. Tabungan dinilai dapat mengontrol pengeluaran rumah tangga dan meringankan dampak negatif saat terjadi guncangan pendapatan, sehingga mengurangi resiko rumah tangga mengalami kerentanan kemiskinan. Jika dikaitkan dengan teori *sustainable livelihoods* dari Chambers dan Conway (1992), aset finansial khususnya tabungan termasuk dalam lima besar aset yang berkontribusi terhadap penghidupan berkelanjutan untuk mengurangi resiko jatuh miskin di tahun mendatang. Kelima jenis modal tersebut secara lengkap terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal alam, dan modal finansial.



Sumber: Krantz (2001)

Gambar 4.15
Framework Asset and Sustainable Livelihoods

Analisis berikutnya membahas tentang aset fisik yang dimiliki oleh rumah tangga. Dalam studi ini, penulis menggunakan variabel *dummy* kepemilikan tanah non usaha tani oleh rumah tangga sebagai *proxy*. Basis variabel ini adalah rumah tangga yang memiliki tanah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara statistik variabel kepemilikan tanah berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap kemungkinan rumah tangga berstatus rentan miskin. Artinya, jika dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki tanah, rumah tangga yang memiliki tanah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk jatuh miskin di tahun mendatang yakni sebesar 0,24857 kali.

Terkait guncangan ekonomi yang identik dengan kerentanan kemiskinan, aset fisik dapat dijadikan penyelamat bagi rumah tangga agar mampu menghadapi guncangan ekonomi tersebut. Ini terjadi karena aset fisik menyediakan sumber pendapatan yang aman dalam menghadapi guncangan tersebut (Jha dan Dang, 2009). Semakin besar aset fisik yang dimiliki rumah tangga, maka kemungkinan resiko rumah tangga untuk berstatus rentan miskin semakin kecil. Sebaliknya, jika rumah tangga memiliki sedikit aset fisik, maka rumah tangga tersebut memiliki kemungkinan yang besar mengalami kerentanan kemiskinan (Baharoglu dan Kessides, 2008). Dalam konteks ini, aset fisik berupa tanah memiliki karakteristik khusus.

Tanah termasuk ke dalam aset tetap, yaitu aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen. Pada hakikatnya, tanah memiliki nilai dan harga yang stabil. Sebab, aset fisik berupa tanah tidak mengalami penyusutan (*depreciation*), sehingga dapat

dijadikan sumber proteksi rumah tangga agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan di tahun mendatang. Selain itu, tanah yang dimiliki rumah tangga dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti modal investasi dan membuka usaha. Oleh karena itu, keberadaan tanah dapat mengurangi kerentanan kemiskinan dan membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan (Moser, 2006). sebagai aset bagi rumah tangga diharapkan dapat memudahkan mereka untuk menggunakannya saat tertimpa guncangan negatif.

4.4 . Kelemahan Penelitian

Kelemahan dalam penelitian tentang kerentanan kemiskinan ini adalah :

1. Keterbatasan data yang dipakai dikarenakan sampel data IFLS yang relatif kecil dan tidak mencakup keseluruhan 33 provinsi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan hasil yang ditampilkan belum bisa mencerminkan kondisi kerentanan kemiskinan seluruh provinsi. Diharapkan, cakupan provinsi yang lebih luas akan memberikan gambaran mengenai kondisi kerentanan kemiskinan yang lebih mendalam.
2. Secara konseptual, kerentanan kemiskinan disebabkan oleh adanya guncangan (*shock*) atau resiko. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memasukkan variabel guncangan sebagai bagian dari analisis kerentanan kemiskinan.

BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

BAB 5**SIMPULAN DAN SARAN****5.1 Simpulan**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan pembahasan, maka simpulan dalam studi ini adalah:

1. Berdasarkan penghitungan nilai kerentanan kemiskinan dengan metode *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP), rata-rata nilai kerentanan kemiskinan rumah tangga di Indonesia pada tahun 2014 tergolong rentan tinggi, yaitu sebesar 0,517. Secara spesifik, rumah tangga yang memiliki rata-rata nilai kerentanan kemiskinan tinggi berada di provinsi Lampung, DKI Jakarta, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, rumah tangga di provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, D.I Yogyakarta, dan Bali.
2. Berdasarkan analisis regresi logistik, ditemukan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial variabel usia kepala rumah tangga, kuadrat usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan tabungan, kepemilikan tanah, dan lokasi tempat tinggal signifikan memengaruhi kerentanan kemiskinan rumah tangga.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka akan diberikan rekomendasi atau saran terkait kebijakan yang seharusnya diambil untuk mengatasi kerentanan kemiskinan:

1. Kebijakan terkait perbaikan pada dimensi pembangunan manusia yang meliputi pendidikan. Pembangunan pendidikan dilakukan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga pengajar dan pemerataan penyebarannya ke seluruh pelosok daerah, penyediaan bantuan pendidikan yang tepat sasaran, serta mengadakan pelatihan keterampilan kerja.
2. Meningkatkan peran BKKBN untuk sosialisasi perencanaan jumlah anak agar sesuai dengan kondisi ekonomi rumah tangga.
3. Perbaikan terhadap akses mikro untuk memudahkan penduduk rentan miskin dalam memperoleh asuransi dan tabungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun hubungan yang kuat di sektor mikro, seperti memberikan akses bagi koperasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada bank-bank komersial.
4. Pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk rentan miskin melalui percepatan program sertifikasi tanah dan pengajian ulang adanya kemungkinan tanah milik perusahaan negara yang tidak digunakan untuk diberikan kepada masyarakat rentan miskin yang tidak memiliki tanah.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. 2010. *Analisis Kerentanan dan Determinan Kemiskinan Berdasarkan Karakteristik Wilayah di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan*. Disertasi tidak diterbitkan. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Adepoju, A.O & S.A Yusuf. 2012. Poverty and Vulnerability in Rural South-West Nigeria. *ARPN Journal of Agricultural and Biological Science*, 7(6).
- Alawang, Jeffrey dkk. 2001. Vulnerability: A View From Different Disciplines. *Social Protection Discussion Paper Series (0115)*. Washington DC: The World Bank.
- Azam, Md. Shaiful & Katsushi S. Imai. 2009. Vulnerability and Poverty in Bangladesh. *Working Paper (141)*. Manchester: Chronic Poverty Research Centre.
- Bah, Adama. 2013. Estimating Vulnerability to Povert Using Panel Data: Evidence from Indonesia. *TNP2K Working Paper 02-2013*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Baiyegunhi, LSJ & Fraser GCG. 2010. *Determinants of Household Poverty Dynamics in Rural Regions of the Eastern Cape Province, South Africa* (Online), (<http://ageconsearch.umn.edu/>, diakses 20 Maret 2016).
- Bank Dunia. 2014. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (Laporan Nusantara)*. Jakarta: Bank Dunia.
- Bappenas. 2003. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) (Online), (<http://p3b.bappenas.go.id/handbook/docs/>, diakses 20 Maret 2016).
- , 2008. *Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia*. Jakarta.
- Borguignon, F & Satya R. Chakravarty. 2003. The Measurement of Multidimensional Poverty. *Journal od Economic Inequality* 1:25-49. Paris, France: Kluwer Academic Publishers.
- Cahyat, Ade dkk. 2007. *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*. Bogor: Center of International Forestry Research.

- Ceriani, Lidia. 2007. *Vulnerability to Poverty. Criss Working Paper (22)*. CRISS.
- Chaudhuri, Subhan dkk. 2002. *Assessing Household Vulnerability to Poverty from Cross-sectional Data: A Methodology and Estimates from Indonesia. Discussion paper (0102-52)*. New York: Department of Economics Columbia University.
- Dartanto, Teguh & Nurkholis. 2011. *Finding Out of the Determinants of Poverty Dynamics in Indonesia: Evidence from Panel Data. MPRA Paper (41185)*. Munich MPRA.
- Dercon, Stefan. 2001. *Assessing Vulnerability*. Jesus College and CSAE, Department of Economics, Oxford University.
- Deressa, Dereje F. 2013. *Assessing Households Vulnerability to Poverty in Rural Oromiya – Ethiopia. Journal of Economics and Sustainable Development Vol.4, No.8*. Nekemete, Ethiopia: HSTE.
- Dutta, Indranil dkk. 2010. *On Measuring Vulnerability to Poverty*, (Online), (<http://www.bu.edu/econ/>, diakses 15 Maret 2016).
- EAPN Explainer. 2009. *Poverty and Inequality in the EU*.
- Easterlin, Richard A. 2003. *Building a Better Theory of Well-being*, (Online), (<http://www-bcf.usc.edu/>, diakses 4 Februari 2016).
- Gaiha, Raghav & Katsushi Imai. 2006. *Measuring Vulnerability and Poverty: Estimates for Rural India. Research Paper No. 2008/40*. Helsinki: UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).
- Gaiha, Raghav dkk. 2007. *Vulnerability and Poverty Dynamics in Vietnam. Economics Discussion Paper (0708)*. United Kingdom: Manchester 1824.
- Gujarati, Damodar N & Porter Daw C. 2009. *Basic Econometrics*. Edisi kelima. Singapura: McGraw-Hill.
- , 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Haq, Rashida. *Quantifying Household Vulnerability to Poverty in a Developing Economy*, (Online), (<http://pide.org.pk/>, diakses 29 April 2016).
- Haughton, Jonathan & Shahidur R. Khadker. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, DC: The World Bank.

- Hoddinot, John & Agnes Quisumbing. 2003. *Methods for Microeconometric Risk and Vulnerability Assessments. Social Protection Discussion Paper Series*, (0324). Washington, DC: The World Bank.
- Instituto Nacional de Estadística (INE). 2010. *Poverty and Its Measurement: the Presentation of a Range of Methods TO Obtain Measures of Poverty*, (online), (<http://www.ine.es/>, diakses 20 Maret 2016).
- Iqbal, Mohiburrahman. 2013. *Vulnerability to Expected Poverty in Afghanistan. ASARC Working Paper 2013/14*. Australia National University.
- Jha, Raghendra dkk. 2008. *Economic Vulnerability and Poverty in Tajikistan. Working Papers in Trade and Development (2008/09)*. The Australian National University.
- 2009a. *Vulnerability to Poverty in Fiji. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies (6-1)*.
- 2009b. *Vulnerability to Poverty in Select Central Asian Countries. The European Journal of Comparative Economics 6(1): 17-50*.
- 2012. *Vulnerability as Expected Poverty in Rural India. ASARC Working Paper*.
- Kamanou, G & Moorduch J. 2002. *Measuring Vulnerability to Poverty. World Institute Development Economics Research Paper 2002(58)*. Helsinki, Finland: UNU World Institute Development Economics Research.
- Kasirye, Ibrahim. 2007. *Vulnerability and Poverty Dynamics in Uganda, 1992-1999. Research Series (51)*. Uganda: Economic Policy Research Centre (EPRC).
- Kuhl, Jesper J. 2003. *Disaggregating Household Vulnerability-Analyzing Fluctuations in Consumptions Using a Simulations Approach (Online)*, (<http://www/csae.ox.ac.uk/>, diakses 15 April 2016).
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Ligon, Ethan & Laura Scheschter. 2004. *Evaluating Different Approaches to Estimating Vulnerability. Social Protection Discussion Paper Series (0410)*. Washington, DC: The World Bank.

- Matul, Michal. 2009. *Financial Behaviours and Vulnerability to Poverty: In Low – Income Households in Transition Context*, (Online) , (www.microfinancegateway.org/, diakses 28 April 2016).
- Maxwell, Simon. 1999. *The Meaning and Measurement of Poverty*. UK: Overseas Development Institute.
- Milcher, Susanne. 2009. Household Vulnerability Estimates of Roma in Southeast Europe. *Cambridge Journal of Economics* 2010(34): 773-792. Oxford University Press on Behalf of The Cambridge Political Economy Society.
- Narayan, Deepa & Patti Petesch. 2007. Moving Out of Poverty: Cross –Disciplinary Perspectives on Mobility. *A Copublication of Palgrave Macmillan and The World Bank*, volume 1. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.
- Novignon, Jacob dkk. 2012. Health and Vulnerability Top Poverty in Ghana: Evidence from The Ghana Living Standards Survei Round 5. *Springer Open*.
- Okrasa, Wlodzimierz. 1999. Who Avoids and Who Escape from Poverty During the Transition: Evidence from Polish Panel 1993-96. *Policy Research Working Paper* (2218). Washington, DC: The World Bank.
- Philip, Damas & Md. Israt Rayhan. 2004. Vulnerability and Poverty: What are the Causes and How They Related?. *Term Paper for Interdisciplinary Course*. Bonn: ZEF Bonn.
- Pindyck, Robert S & Daniel L. Rubinfeld. 2009. *Microeconomics*. Edisi Ketujuh. New Jersey: Prentice Hall.
- Pritchett, Lant dkk. 2000. Quantifying Vulnerability to Poverty: A Proposed Measure, with Application to Indonesia. *Social Monitoring and Early Resport Unit*. Jakarta: SMERU.
- Ray, Debraj. 1998. *Development Economics*. New Jersey: Princeton University Press.
- Azis, Iwan J. dkk (Eds.). 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Suryahadi, Asep & Sudarni Sumarto. 2001. The Chronic Poor, The Transient Poor, and The Vulnerable in Indonesia Before and After the Crisis. *Working Paper* (May 2001). Jakarta: The SMERU Research Institute.

- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM-Press.
- The World Bank. 2006. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bank Dunia.
- Thirwall, A.P. 2006. *Growth and Development with Special Reference to Developing Economies*. 8th edition. United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2010. *Penanggulangan Kemiskinan: Situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan*. Jakarta: TNP2K.
- , 2016. *Situasi Permasalahan Kesejahteraan dan Upaya Mengatasinya*. Jakarta: TNP2K.
- Todaro, Michael E & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi kesembilan. Terjemahan oleh Haris Munandar. 2006. Jakarta: Erlangga.
- Wooldridge, Jeffrey M. 2006. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 2nd Edition. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- World Bank. 2015. *World Bank Supports Increased Access to Safe Drinking Water and Improved Sanitation in Sri Lanka*, (Online), (<http://www.worldbank.org/>, diakses 28 April 2016).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Deskripsi variabel untuk analisis profil dan determinan kerentanan kemiskinan

Contains data from result/kerentanan2014.dta

obs: 9,489
 vars: 23 19 Jun 2016 23:06
 size: 948,900

variable name	storage type	display format	value Label	variable Label
hhid14_9	long	%10.0g		2014 Household ID (9-digit)
pid14	double	%12.0g		2014 PID
hhsz	float	%9.0g		household size
location	float	%9.0g	location	location
mexp	float	%9.0g		mean percapita expenditure
lnpce	float	%9.0g		natural logarithm of mean percapita expenditure
age	float	%9.0g		age of household head
agesqr	float	%9.0g		age square
educ	float	%9.0g	educ	Education of household head
savingown	double	%12.0g		saving ownership
saving	float	%23.0g	saving	saving ownership
landown	float	%20.0g	Landown	land ownership
GK	float	%9.0g		Poverty line
lnGK	float	%9.0g		natural logarithm of poverty line
e	float	%9.0g		Residuals
u	float	%9.0g		square error
gi	float	%9.0g		Fitted values
li	float	%9.0g		linear prediction
varu	float	%9.0g		variance
yhat	float	%9.0g		linear prediction
vhh	float	%9.0g		vulnerability index
vhh	float	%13.0g	vhh	vulnerability group
provinsi	float	%9.0g	provinsi	province



LAMPIRAN 2: Statistik deskriptif variabel

. sum

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
hhid14_9	9489	1.67e+08	9.33e+07	1060000	3.21e+08
pid14	9489	1.695331	1.630502	1	18
hhsize	9489	4.022763	1.781577	1	17
location	9489	.5762462	.4941784	0	1
mexp	9489	869159.2	1276111	2500	3.99e+07
lupce	9489	13.2728	.8487063	7.824046	17.50251
age	9489	49.49605	14.08145	18	101
agesqr	9489	2648.125	1500.741	324	10201
educ	9489	.3686374	.4824608	0	1
saving	9489	.296027	.4565271	0	1
landown	9489	.1137106	.3174762	0	1
GK	9489	309637	49615.25	205145	459560
lnGK	9489	12.63156	.1492705	12.23147	13.03802
e	9489	-.0007308	.7450149	-5.173932	4.148913
u	9489	.5549892	1.131212	4.00e-09	26.76957
gi	9489	.5495893	.1765577	.0907268	2.107744
ki	9489	.5493143	.1105088	.2128563	1.249331
varu	9489	.737647	.0720532	.4613635	1.117735
yhat	9489	13.27341	.4032361	11.7767	14.33984
vhhh	9489	.5000527	.2886903	.0001054	1
vhh	9489	.5000527	.5000263	0	1
provinsi	9489	7.355464	3.542979	1	14

. tab vhh

vulnerability group	Freq.	Percent	Cum.
rentan rendah	4,744	49.99	49.99
rentan tinggi	4,745	50.01	100.00
Total	9,489	100.00	

. tab landown

Land ownership	Freq.	Percent	Cum.
tidak memiliki lahan	8,410	88.63	88.63
memiliki lahan	1,079	11.37	100.00
Total	9,489	100.00	

. tab location

location	Freq.	Percent	Cum.
desa	4,021	42.38	42.38
kota	5,468	57.62	100.00
Total	9,489	100.00	

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

. tab saving

saving ownership	Freq.	Percent	Cum.
tidak memiliki tabungan	6,680	70.40	70.40
memiliki tabungan	2,809	29.60	100.00
Total	9,489	100.00	

. tab educ

Education of household head	Freq.	Percent	Cum.
pendidikan rendah	5,991	63.14	63.14
pendidikan tinggi	3,498	36.86	100.00
Total	9,489	100.00	

. tab hsize

household size	Freq.	Percent	Cum.
1	567	5.98	5.98
2	1,257	13.25	19.22
3	1,878	19.79	39.01
4	2,538	26.75	65.76
5	1,639	17.27	83.03
6	859	9.05	92.09
7	397	4.18	96.27
8	180	1.90	98.17
9	85	0.90	99.06
10	50	0.53	99.59
11	22	0.23	99.82
12	6	0.06	99.88
13	3	0.03	99.92
14	3	0.03	99.95
15	4	0.04	99.99
17	1	0.01	100.00
Total	9,489	100.00	

LAMPIRAN 4: Hasil penghitungan titik minimum usia kuadratik kepala rumah tangga terhadap kerentanan kemiskinan

Marginal effects after Logit

$$y = \text{Pr}(vhh) \text{ (predict)}$$

$$= .44745238$$

variable	dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[95% C.I.]	X
age	-.0878911	.0057	-15.43	0.000	-.099059	-.076723		49.496
agesqr	.0010952	.00006	18.76	0.000	.000981	.00121		2648.12
hhsizex	.2935189	.0085	34.55	0.000	.276867	.31017		4.02276
educ*	-.7552089	.00981	-76.99	0.000	-.774434	-.735983		.368637
saving*	-.6532556	.01166	-56.04	0.000	-.676104	-.630408		.296027
landown*	-.2960123	.02153	-13.75	0.000	-.338216	-.253808		.113711
location*	-.5082707	.01578	-32.22	0.000	-.539194	-.477348		.576246

```
. gen kerentanan=-.0878911*age+{.0010952*agesqr}
```

```
. scatter kerentanan age
```

```
. di -0.5*_b{vhh:age}/_b{vhh:agesqr}
40.124019
```

**LAMPIRAN 5: Garis Kemiskinan per Provinsi berdasarkan desa/kota tahun
2014 menurut Badan Pusat Statistik**

Provinsi	desa	kota
Sumatra Utara	312493	349372
Sumatra Barat	349824	390862
Sumatra Selatan	285791	346238
Lampung	307818	350024
DKI Jakarta	0	459560
Jawa Barat	285076	294700
Jawa Tengah	277802	286014
D.I Yogyakarta	296429	333561
Jawa Timur	293391	286798
Banten	296241	324902
Bali	279140	316235
Nusa Tenggara Barat	285205	315470
Kalimantan Selatan	313954	336782
Sulawesi Selatan	219109	246416